



Dinas Perempuan dan Anak
Provinsi Jawa Tengah



RENCANA STRATEGIS

Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah

2025
-
2029



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dra. Ema Rachmawati, M.Hum
NIP : 19660517 199008 2 001
Jabatan : Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

Berdasar SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 800.1.3.3/290/2025 tanggal 7 Mei 2025. Bertugas untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. Berkedudukan di Jalan Pamularsih Raya Nomor 28, Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. Untuk mewujudkan tujuan, sasaran, dan serta program kerja berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2025-2029 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, September 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah


Dra. EMA RACHMAWATI, M.Hum
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19660517 199008 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat dan HidayahNya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Renstra ini disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan terhadap pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029.

Penyusunan Renstra ini disusun secara partisipatif dan melibatkan banyak pihak baik internal maupun eksternal. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang selama ini diberikan, sehingga Renstra ini dapat selesai dan akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah selama periode 5 tahun. Oleh karena itu, semua komponen unit kerja internal harus berkomitmen untuk mewujudkan tercapainya indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang sudah ditetapkan.

Semoga apa yang kita harapkan kedepan terkait urusan PPPA dan Dalduk KB, dapat bermanfaat bagi masyarakat Jawa Tengah pada umumnya dan perempuan dan anak pada khususnya.

**KEPALA DP3AP2KB
PROVINSI JAWA TENGAH**



Dra. EMA RACHMAWATI, M.Hum)

DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PERNYATAAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	10
2.1.2 Uraian Tugas	12
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	14
2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)	14
2.2.2 Sarana dan Prasarana (<i>Asset</i>)	16
2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	47
2.5 Isu Strategis Perangkat Daerah	49
2.5.1 Permasalahan Perangkat Daerah.....	49
2.5.2 Isu Strategis Lingkungan Dinamis.....	50
2.5.3 Potensi Daerah.....	52
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	55
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	55
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	59
3.2.1 Strategi	59
3.2.2 Arah Kebijakan	59
3.2.3 Tahapan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Tengah	65
3.3 Manajemen Risiko Perangkat Daerah	69
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	76
4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	76
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah.....	122
BAB V PENUTUP	128
5.1 Catatan Penting.....	128
5.2 Kaidan Pelaksanaan	128
5.3 Rencana Tindak Lanjut	129

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	15
Tabel 2. 2 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	15
Tabel 2. 3 Jumlah PPPK Berdasarkan Golongan Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	16
Tabel 2. 4 Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	17
Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian	21
Tabel 2. 6 Capaian Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2022	30
Tabel 2. 7 Anggaran Responsif Gender (ARG) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 – 2024	30
Tabel 2. 8 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik Dan Jenis Kelamin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.....	32
Tabel 2. 9 Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.....	33
Tabel 2. 10 Rincian Kategori Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2024	35
Tabel 2. 11 Jumlah Disabilitas Di Jawa Tengah s/d Tahun 2024	37
Tabel 2. 12 Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Provinsi Jawa Tengah	40
Tabel 2. 13 Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024.....	40
Tabel 2. 14 Unmetneed Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024.....	41
Tabel 2. 15 Capaian Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 – 2023	42
Tabel 2. 16 Capaian Sakip dan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 – 2024 ...	43
Tabel 2. 17 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024.....	44
Tabel 2. 18 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	47
Tabel 2. 19 Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah	50
Tabel 3. 2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	57
Tabel 3. 3 Tujuan dan Sasaran serta indikator Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai berikut :.....	58
Tabel 3. 4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	61
Tabel 3. 5 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah	65
Tabel 3. 6 Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029	71

Tabel 4. 1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029	81
Tabel 4. 2 Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029	118
Tabel 4. 3 Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029	122
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Kunci.....	123
Tabel 4. 5 Target Penyelarasan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 – 2029	127

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 2 Keterkaitan Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Lainnya	2
Gambar 2. 1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2020-2024.....	31
Gambar 2. 2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2019-2024.....	31
Gambar 2. 3 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024.....	32
Gambar 2. 4 Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2019-2023	34
Gambar 2. 5 Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.....	35
Gambar 2. 6 Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023.....	36
Gambar 2. 7 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023.....	36
Gambar 2. 8 Grafik Perkawinan Dibawah Usia 19 Tahun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024	37
Gambar 2. 9 Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024	38
Gambar 2. 10 Grafik Angka Kelahiran Menurut Umur (ASFR) Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	41
Gambar 2. 11 Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024.....	42

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pohon Kinerja Urusan PPPA dan Dalduk KB
2. Casdading Urusan PPPA dan Dalduk KB
3. Manajemen Resiko Perangkat Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah atau Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 – 2023 dan Penjabat Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 – 2025 serta dimulainya pemerintahan yang baru pada tahun 2025, dibutuhkan langkah strategis untuk menyusun arah pembangunan Jawa Tengah selama lima tahun ke depan. Pada tahun 2024 lalu, telah terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode Tahun 2025 - 2030, sehingga diperlukan penyusunan program dan kegiatan strategis untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah terpilih serta sekaligus mendukung program prioritas pemerintah pusat yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2024 - 2029.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 65 Ayat (1) huruf c menjelaskan bahwa Kepala Daerah terpilih berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan yaitu salah satunya adalah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD. RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan tahap pembangunan jangka menengah pertama pada periode RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045. **Visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah “Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045”.**

Sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan mendukung capaian visi dan misi Kepala Daerah, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah menyusun Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, RTRW, KLHS dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Rencana strategis dapat dilihat sebagai formulasi secara menyeluruh atau *roadmap* yang menjelaskan bagaimana usaha-usaha

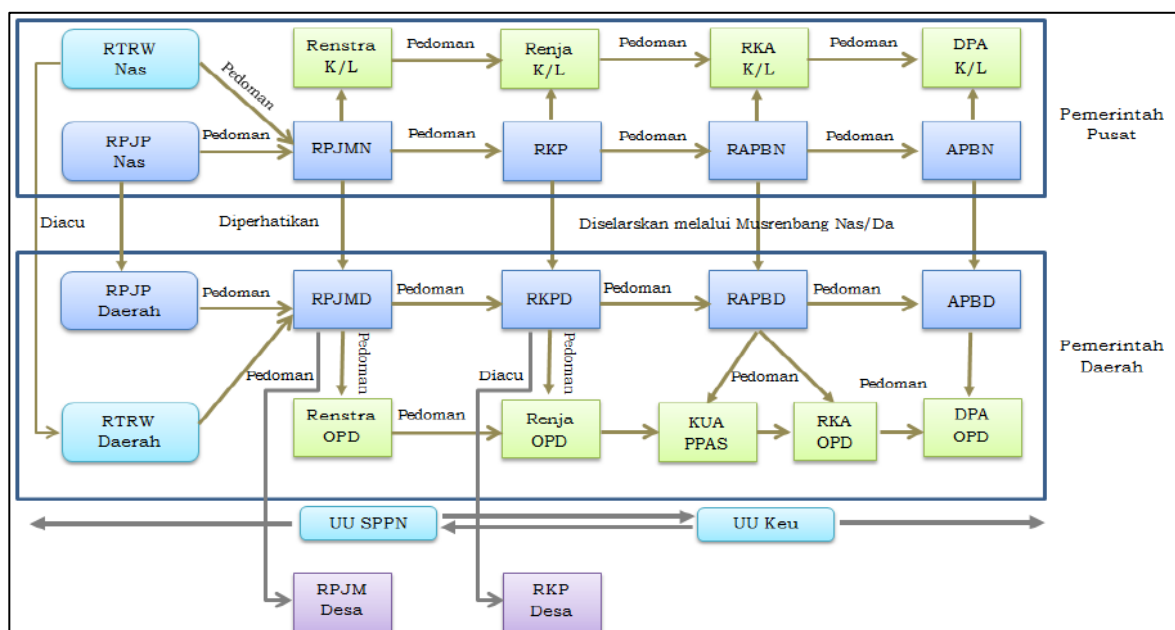
dilakukan untuk mencapai tujuan melalui penerapan strategi-strategi yang dipilih.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui tahapan sebagai berikut : 1) Persiapan penyusunan Renstra meliputi pembentukan tim penyusun, orientasi mengenai renstra PD, penyusunan agenda kerja serta penyiapan data dan informasi 2) penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah meliputi penyusunan pohon kinerja, cascading, manajemen resiko dan penyusunan dokumen renstra 3) penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah 4) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 5) perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah dan 6) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis 5 tahunan ini juga memperhatikan arah kebijakan pusat yakni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (KemendukBangga/BKKBN). Keterkaitan dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan dokumen perencanaan lainnya secara detail dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:

Gambar 1. 1
Keterkaitan Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Lainnya



Selanjutnya Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana

Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana setiap tahunnya dan dijadikan pedoman dalam mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan jangka menengah sesuai dengan target pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang telah ditetapkan.

Dokumen Renstra ini juga diharapkan menjadi panduan bagi kabupaten/kota untuk menyusun Renstra/Renja Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di daerah dan dunia usaha maupun masyarakat dalam ikut serta bersama membangun Jawa Tengah selama lima tahun ke depan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
6. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

10. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
15. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
 22. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
 23. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 24. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 25. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
 27. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Pelaksanaan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 52);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (6/85/2017) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 2, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (2-12/2018) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 96);
 30. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 2, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (2-2/2021), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 126);
 31. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 2, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (2-54/2022), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 135);
 32. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 4, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (4-56/2022), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 137);

33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (5-93/2022) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 155);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
39. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
40. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
41. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender Dan Anak;
42. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Pelaksanaan Keluarga Berencana (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 51);
43. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Satu Data Jawa Tengah;
44. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban

- Kekerasan, Eksploitasi, Diskriminasi dan yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 21);
45. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Aman, Shelter dan Rumah penampungan Sementara bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 22);
 46. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pencegahan Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi Terhadap Perempuan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 33);
 47. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 6);
 48. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu, Data dan Informasi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, eksploitasi dan Diskriminasi (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 24).
 49. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2045;
 50. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
 51. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 52. Kepmendagri No 900.1.155-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah tahun 2024;
 53. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 54. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 55. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.10.2/0004464 Tahun 2025 tentang Kecamatan Berdaya;
 56. Surat Edaran Sekda Provinsi Jawa Tengah nomor 000.7.2.2/0002764 tanggal 9 April 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029, sesuai dengan tugas dan fungsi serta Urusan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sedangkan Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

- a. Menjabarkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, serta menetapkan strategi dan kebijakan Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode 2025-2029;
- b. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- c. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 5 (lima) tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
- d. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, tujuan, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah serta Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah identifikasi

permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, dan Arah Kebijakan.

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah, termasuk indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci perangkat daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun kesesuaian anggaran dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Kepala Dinas;

1. Sekretariat, membawahi :

- a. Sub bagian Program;
- b. Sub bagian Keuangan;
- c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.

2. Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan, membawahi:

- a. Sub Koordinator Kesetaraan Gender;
- b. Sub Koordinator Perlindungan Perempuan.

3. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, membawahi :

- a. Sub Koordinator Perlindungan Anak;
- b. Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak.

4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, membawahi:

- a. Sub Koordinator Pengendalian Penduduk;
- b. Sub Koordinator Keluarga Sejahtera.

5. Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi, membawahkan :

- a. Sub Koordinator Keluarga Berencana;
- b. Sub Koordinator Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi.

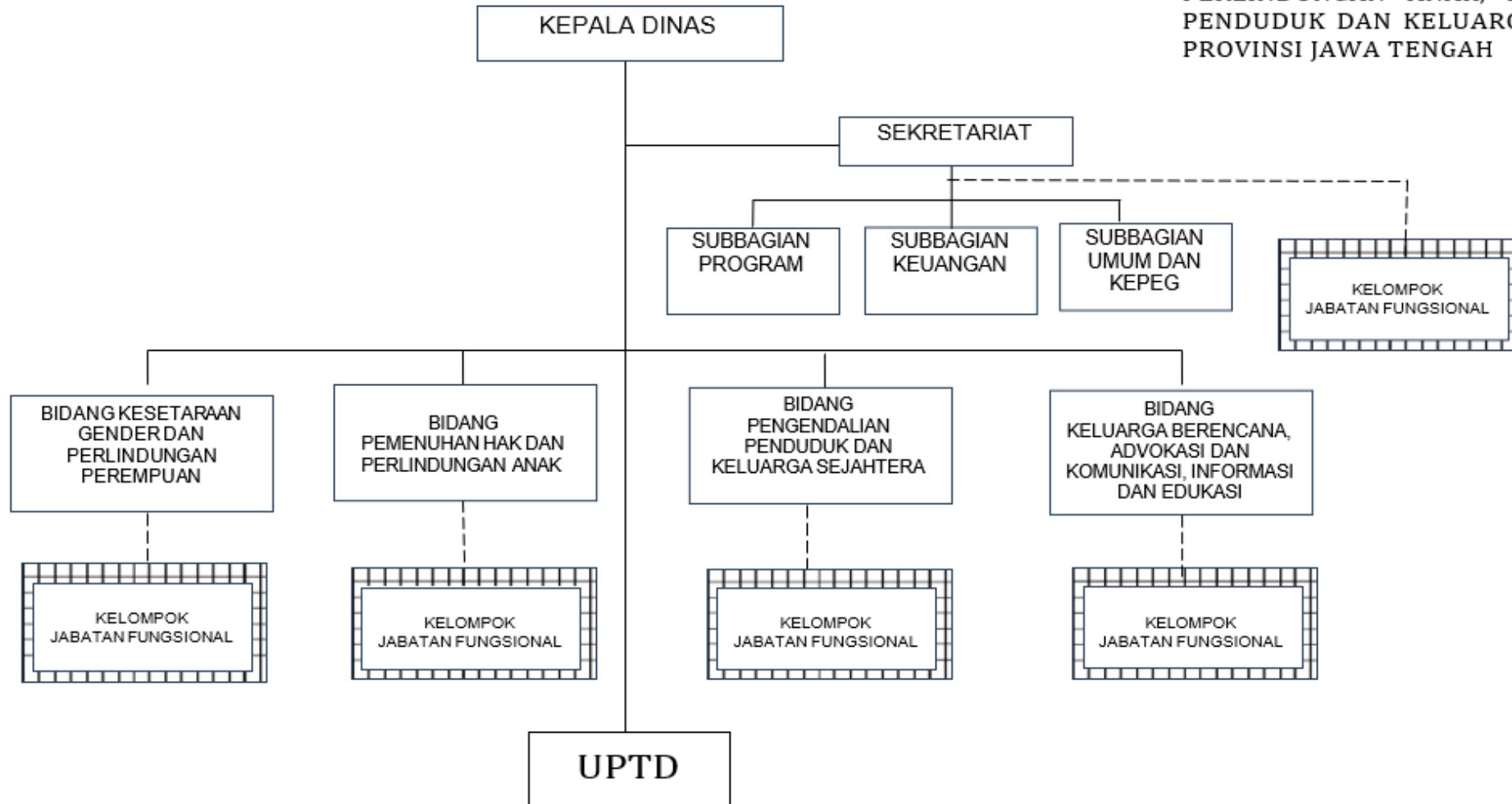
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 15 TAHUN 2023
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
 PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 PROVINSI JAWA TENGAH



2.1.2 Uraian Tugas

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, dan Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, dan Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, dan Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
2. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
3. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan,

kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;

4. Penyiapan bahan koordinasi Pendataan dan informasi di lingkungan Dinas;
5. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
6. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
7. Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Dinas;
8. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan

Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesetaraan gender dan perlindungan perempuan. Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesetaraan Gender;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di perlindungan perempuan;
3. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak. Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemenuhan hak anak;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan anak; dan
3. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera melaksanakan tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera. Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk;

2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga sejahtera;
3. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi. Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga berencana;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
3. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak mempunyai tugas memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya tingkat daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak, melaksanakan fungsi :

1. Pelaksanaan pelayanan pengaduan masyarakat;
2. Pelaksanaan penjangkauan korban;
3. Pelaksanaan pengelolaan kasus;
4. Pelaksanaan penampungan sementara;
5. Pelaksanaan mediasi;
6. Pelaksanaan pendampingan korban;
7. Pelaksanaan penatausahaan di lingkungan UPTD; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah dalam menjalankan roda organisasi sangat ditentukan oleh kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana yang dimilikinya sebagai elemen penting dalam organisasi sekaligus sebagai faktor yang berpengaruh dan menentukan dalam mencapai tujuan organisasi.

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Tabel 2. 1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	PNS/PPPK			Non PNS			Jumlah Total
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
1	SMP Sederajat	-	-	-	1		1	1
2	SMA Sederajat	3	-	3	2		2	5
3	D1	1	-	1	-	-	-	1
4	D3	1	3	4	-	-	-	4
5	DIV	-	2	2		2	2	4
6	S1	6	22	28	8	5	13	41
7	S2	3	21	24	1	1	2	26
Jumlah		14	48	62	12	8	20	82

Sumber : Sub Bagian Umpeg DP3AP2KB, Per-Desember 2024

Formasi pegawai sesuai beban tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 sebanyak 82 orang, terdiri dari PNS sebanyak 59 orang, PPPK sebanyak 3 dan Non PNS sebanyak 20 orang. Kondisi tersebut telah dipandang cukup baik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, namun perlu ditingkatkan kemampuan teknis.

Sementara itu, jika dilihat jumlah pegawai berdasarkan golongan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah terbagi atas golongan II sebanyak 4 orang, golongan III sebanyak 40 orang dan golongan IV sebanyak 15 orang serta golongan VII sebanyak 1 dan Golongan XI sebanyak 2 orang. Jumlah pegawai berdasarkan golongan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Tabel 2. 2

Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	I	-	-	-
2	II	3	1	4
3	III	8	32	40
4	IV	1	14	15
Jumlah		12	47	59

Sumber : Sub Bagian Umpeg DP3AP2KB, Desember 2024

Tabel 2. 3
Jumlah PPPK Berdasarkan Golongan Dinas Perempuan dan Anak
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Golongan/ Pangkat	L	P	Jumlah
1	VII	1	-	1
2	VIII	-	-	-
3	IX	2	-	2
Jumlah		3	0	3

Sumber : Sub Bagian Umpeg DP3AP2KB, Desember 2024

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagian besar masih dalam kondisi baik, meskipun demikian, beberapa hal yang harus segera diperbaiki adalah kondisi plafon, ubin pada lantai 1-3 dan perbaikan pada dinding, kamar mandi dan beberapa ruangan kosong yang rusak. Sedangkan kebutuhan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu pemenuhan sarana dan prasarana perlengkapan kantor seperti sarana prasarana komputer dan sarpras teknologi informasi untuk mendukung era digitalisasi membutuhkan *upgrade* dan tambahan unit.

Di samping itu, kelengkapan ruang pendukung lain seperti ruang rapat untuk *zoom*, ruang *podcast* maupun ruang lain yang mendukung kinerja sangat diperlukan keberadaannya kedepan, sehingga diperlukan perencanaan yang matang dan berkesinambungan. Terkait dengan kebutuhan kendaraan dinas, pada saat ini terdapat 10 kendaraan operasional roda 4, dari 10 kendaraan tersebut, 6 kendaraan atau 60% nya berusia lebih dari 10 tahun sehingga diperlukan peremajaan. Sedangkan kebutuhan untuk sepeda motor operasional, masih mencukupi.

Kebutuhan pemenuhan sarana prasarana pada unit pelayanan terpadu daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) juga masih diperlukan, mengingat hal tersebut merupakan layanan masyarakat secara langsung, seperti penyediaan sarpras ruang pelayanan, gedung, *meubelair* dan peralatan kantor pendukung lainnya. Keterbatasan sarana dan prasarana perlengkapan kerja menjadikan perhatian dalam perencanaan ke depan guna mendukung capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah secara optimal.

Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 4
Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
I	Tanah	3	0	3
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	0	1
II	Peralatan dan Mesin	1	0	1
1	Alat-Alat Besar	1	0	1
	<i>Portable Generating Set</i>			
	<i>Stationary Generating Set</i>	6	0	6
	Lain-lain	4	0	4
	<i>Stationary Water Pump</i>	2	0	2
2	Alat-Alat Angkut	23	0	23
	Sedan	1	0	1
	<i>Jeep</i>	1	0	1
	<i>Multi Purpose Vehicle (MPV)</i>	7	0	7
	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	13	0	13
	Sepeda Motor	1	0	1
	<i>Rescue Car</i>	3	0	3
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	754	-	754
	Mesin Ketik Listrik	2	-	2
	Lemari Besi/Metal	41	-	41
	Filing Cabinet Besi	27	-	27
	Brandkas	1	-	1
	Lemari Kaca	2	-	2
	Alat Penyimpanan Perlengkapan KTR. Filing Cabinet	17	-	17
	Alat Penyimpanan Perlengkapan KTR. Rak Arsip	3	-	3
	<i>White Board</i>	6	-	6
	Mesin Absensi	4	-	4
	Alat Pemotong Kertas	2	-	2
	<i>White Board Electronic</i>	1	-	1
	<i>LCD Projector/Infocus</i>	2	-	2
	Papan Pengumuman	3	-	3
	Papan Tulis	1	-	1
	Alat Kantor Lainnya. LCD Proyektor	1	-	1
	Alat Kantor Lainnya. Speaker	1	-	1
	Alat Kantor Lainnya. Pompa Air Dabb	1	-	1
	Meja Kerja Kayu	10	-	1
	Kursi Besi/Metal	3	-	3
	Sice	17	-	17
	Meja Rapat	53	-	53
	Tempat Tidur Besi	3	-	3
	Tempat Tidur Kayu	2	-	2
	Meja Resepsionis	2	-	2
	Meja Tambahan	2	-	2
	Kursi Rapat	75	-	75
	Kursi Putar	93	-	93
	Meja Komputer	3	-	3
	Sofa	8	-	8
	Meubelair Rak Kayu	1	-	1

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
	Meubelair Meja Kayu/Rotan	14	-	14
	Meubelair Tikar	1	-	1
	Meubelair Lemari Pakaian	6	-	6
	Meubelair Lemari Kayu	2	-	2
	Meubelair Meja Kecil	1	-	1
	Mesin Penghisap Debu/Vaccum Cleaner	2	-	2
	Lemari Es	5	-	5
	AC Sentral	9	-	9
	AC Split	16	-	16
	Kipas Angin	8	-	8
	Exhaust Fan	4	-	4
	Televisi	10	-	10
	Amplifier	7	-	7
	Loudspeaker	19	-	19
	Sound System	4	-	4
	Wireless	7	-	7
	Microphone	2	-	2
	Mic Conference	1	-	1
	Unit Power Supply (UPS)	3	-	3
	Stabilisator	1	-	1
	Tustel	1	-	1
	Lambang Garuda Pancasila	1	-	1
	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	-	1
	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya/Home Use)	1	-	1
	Tangga Aluminium	3	-	3
	Dispenser	15	-	15
	Mimbar/Podium	2	-	2
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use). Cassete Recorder	2	-	2
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use). Kotak Saran	1	-	1
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use). Kotak Sound System	1	-	1
	Lain-lain	13	-	13
	Alat Pemadam/Portable	4	-	4
	Panel Pengontrol Kebakaran	1	-	1
	Hidran Kebakaran	1	-	1
	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	-	4
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	122	-	122
	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	-	1
	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	-	1
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	-	1
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	11	-	11
	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	45	-	45
	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	6	-	6
	Buffet Kayu	3	-	3
	Lemari dan Arsip Pejabat. Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	1	-	1
	Lemari dan Arsip Pejabat. Buffet Kaca	3	-	3

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
4	Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	33	-	33
	Power Amplifier	1	-	1
	Chairman/ <i>audio Conference</i>	1	-	1
	Peralatan Studio Visual. Camera + <i>Attachment</i>	2	-	2
	Peralatan Studio Visual. Proyektor + <i>Attachment</i>	2	-	2
	Lain-Lain	9	-	9
	<i>Video Switcher</i>	1	-	1
	<i>Mixer Pvc</i>	2	-	2
	Layar Film/Projector	1	-	1
	Camera Digital	1	-	1
	Lain-Lain	3	-	3
	<i>Telephone (Pabx)</i>	4	-	4
	<i>Facsimile</i>	3	-	3
	Alat Komunikasi Telephone. Handphone	1	-	1
	Lain-Lain	2	-	2
5	Alat Komputer	140	-	140
	P.C Unit	68	-	68
	Laptop	8	-	8
	<i>Note Book</i>	10	-	10
	<i>Webcam</i>	2	-	2
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	48	-	48
	<i>Scanner</i> (Peralatan Personal Komputer)	3	-	3
	<i>Server</i>	1	-	1
III	Bangunan dan Gedung			
1	Bangunan Gedung	3	-	3
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	-	1
	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	1	-	1
	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	1	-	1
2	Monument	3	-	3
	Tugu Peringatan Baleho	3	-	3
IV	Aset Tetap Lainnya			
1	Bahan Perpustakaan	732	-	732
	Referensi	14	-	14
	Ilmu Pengetahuan Umum	630	-	630
	<i>Encyclopedia</i> , Kamus, Buku Referensi	1	-	1
	Umum. Buku. Perpustakaan	22	-	22
	Ilmu Jiwa	2	-	2
	Agama Islam	1	-	1
	Agama Hindu	1	-	1
	Hukum	50	-	50
	Pendidikan	1	-	1
	Pengetahuan Bahasa Indonesia	1	-	1
	Ilmu Kedokteran	1	-	1
	Ilmu Kerumah Tanggaan	6	-	6
	Management dan Perkantoran	1	-	1
	Sejarah	1	-	1
2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	4	-	4
	Alat Kesenian. Alat Musik/Band	1	-	1
	Lain-lain	3	-	3

Sumber : Sub Bagian umum dan Kepegawaian, Desember 2024

2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2. 5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

No	Indikator Kinerja Program Sesuai Tugas Persngkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun / Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun / Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23
A	Renstra PD Tahun 2018-2023																			
1	IDG (Index Pemberdayaan Gender)	Nilai				75,14	72,6	71,62	72,7	-	71,73	71,64	73,78	74,18	-	95,46	98,68	103,01	101,76	-
2	Persentase Kab/Kota Menuju Layak Anak	%				85,71	88,57	91,43	100	-	91,43	100	100	100	-	106,67	112,9	109,37	100	-
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	per 100.000				8,29	8,22	8,15	8,07	-	8,99	8,97	8,1	8,02	-	92,21	91,64	109,37	100,62	-
4	Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	%				34,21	34,24	N/A	N/A	-	34,31	34,29	N/A	N/A	-	100,29	100,15	N/A	N/A	-
5	Persentase Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Pemerintah Daerah	%				N/A	N/A	34,27	34,3	-	N/A	N/A	36,11	51,42	-	N/A	N/A	105,37	132,25	-
6	Persentase kabupaten/ kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	%				25,71	28,57	60	82,85	-	54,28	62,85	71,42	82,85	-	211,12	219,99	119,03	100,01	-

No	Indikator Kinerja Program Sesuai Tugas Persngkat Daerah	Satuan	Targe t NSPK	Targe t IKK	Target Indikato r Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun / Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun / Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23
7	Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan PUG	%				N/A	N/A	80	90	-	N/A	N/A	80	90	-	N/A	N/A	87,5	100	-
8	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	per 100,000				8,13	7,78	8,05	8,02	-	8,49	8,35	7,47	7,44	-	95,75	93,17	107,76	107,8	-
9	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	angka				2,24	2,3	2,2	2,19	-	2,23	2,09	2,15	2,04	-	100,45	110,04	102,33	107,35	-
10	Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR	angka				75,1	75,25	64,76	65,17	-	73,26	70,35	65,18	65,7	-	97,55	93,49	100,65	100,81	-
11	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	%				21,14	21,14	N/A	N/A	-	22,25	21,99	N/A	N/A	-	105,25	104,02	N/A	N/A	-
12	Indeks pembangunan keluarga	indeks				N/A	N/A	54,38	56,29	-	N/A	-	58,16	63,07	-	N/A	N/A	106,95	112,04	-
13	Nilai Kepuasan Masyarakat	nilai				74	77	80	85	-	81,75	81,75	87,81	90,25	-	110,47	106,17	109,76	106,18	-
14	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	nilai				78,52	78,54	79,05	79,1	-	84,6	87,5	86,99	86,7	-	107,74	111,41	110,04	109,61	-
15	Persentase peningkatan perempuan yang mendapatkan pendampingan	%				30	30	N/A	N/A	-	30	30	N/A	N/A	-	100	100	N/A	N/A	-

No	Indikator Kinerja Program Sesuai Tugas Persngkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun / Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun / Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23
	yang menjadi pelaku ekonomi																			
16	Persentase Partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan	per 100,000				N/A	N/A	6,42	6,84	-	N/A	N/A	7,9	23,62	-	N/A	N/A	123.05	345,32	-
17	Persentase keluarga yang berkonsultasi peningkatan kualitas keluarga dalam, mewujudkan kesetaraan gender terlayani	%				100	100	N/A	N/A	-	100	100	N/A	N/A	-	100	100	N/A	N/A	-
18	Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis gender	%				N/A	N/A	35	40	-	N/A	N/A	63,88	63,88	-	N/A	N/A	182.51	159,7	-
19	Rasio Korban kekerasan terhadap perempuan	%				5,81	5,76	5,7	5,64	-	5,75	5,11	4,38	4,64	-	101.04	112.72	130.14	121,55	-
20	Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis	%				N/A	N/A	35	40	-	N/A	N/A	63,88	63,88	-	N/A	N/A	182.51	159,7	-

No	Indikator Kinerja Program Sesuai Tugas Persngkat Daerah	Satuan	Targe t NSPK	Targe t IKK	Target Indikato r Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun / Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun / Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23
	pemenuhan hak anak																			
21	Persentase kabupaten/kota menuju layak anak minimal tingkat pratama	%				88,57	91,43	94,28	100	-	88,57	88,57	100	100	-	100	96,87	100	100	-
22	Persentase keluarga yang berkonsultasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan hak anak terlayani	%				100	100	N/A	N/A	-	100	100	N/A	N/A	-	100	100	N/A	N/A	-
23	Rasio korban kekerasan terhadap anak	rasio				12,66	12,44	12,46	12,36	-	12,15	11,02	10,33	9,86	-	104.20	112.89	120.62	125,35	-
24	Persentase data dan informasi PPPA yang tersedia	%				83,33	100	N/A	N/A	-	83,33	100	N/A	N/A	-	100	100	N/A	N/A	-
25	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki kebijakan pengendalian kuantitas penduduk	%				8,33	11,42	N/A	N/A	-	6,33	19,44	N/A	N/A	-	75,99	170,23	N/A	N/A	-

No	Indikator Kinerja Program Sesuai Tugas Persngkat Daerah	Satuan	Targe t NSPK	Targe t IKK	Target Indikato r Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun / Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun / Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23
26	Persentase Pemerintah Daerah yang menyusun GDPK (Grand Desain Pembangunan Kependudukan) 5 Bidang	%				N/A	N/A	19,44	27,7	-	N/A	N/A	44,44	61,11	-	N/A	N/A	228.60	220,61	-
27	Persentase kelompok tribina yang aktif	%				93	85,57	96,25	96,3	-	99,01	114,46	97,79	96,6	-	106,46	133,76	101.60	100,31	-
28	Persentase UPPKA yang aktif	%				88	68,25	90,5	91	-	96,59	112,61	91,53	92,07	-	109,76	165	101.14	101,18	-
29	Persentase penggunaan kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%				28,15	26,39	29,5	30	-	28,69	28,42	29,58	30,38	-	101,92	107,69	100.27	101,27	-
30	Unmeetneed KB	%				13,1	12,66	12,89	12,76	-	12,9	14,29	11,63	8,6	-	101.55	88.59	110.83	148,37	-
31	Persentase organisasi masyarakat/mitra kerja dalam program KB tingkat daerah provinsi yang aktif	%				100	100	N/A	N/A	-	100	100	N/A	N/A	-	100	100	N/A	N/A	-
32	Persentase ketercapaian pelayan umum, kepegawaian dan	%				90	90	N/A	N/A	-	90	90	N/A	N/A	-	100	100	N/A	N/A	-

No	Indikator Kinerja Program Sesuai Tugas Persngkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun / Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun / Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23
	keuangan perangkat daerah																			
33	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%				N/A	N/A	90	90	-	N/A	N/A	90	90	-	N/A	N/A	100.00	100	-
34	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%				100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
B	Renstra PD																			
	Tahun 2024-2026																			
1	Pengeluaran Perempuan PerKapita	Ribu Rupiah per orang per tahun				-	-	-	-	9.900	-	-	-	-	10.892	-	-	-	-	107,84
2	Rasio kekerasan Terhadap Perempuan	Per 100.000				-	-	-	-	5,6	-	-	-	-	4,38	-	-	-	-	123,29
3	IPA	Indeks				-	-	-	-	66	-	-	-	-	64,34*	-	-	-	-	97,49
4	% Peningkatan Kampung Keluarga Berkualitas yang mandiri dan berkelanjutan	%				-	-	-	-	2	-	-	-	-	4,36	-	-	-	-	218

No	Indikator Kinerja Program Sesuai Tugas Persngkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun / Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun / Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23
5	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Indeks				-	-	-	-	73,5	-	-	-	-	87,51	-	-	-	-	119,06
6	Persentase Perempuan yang Dilatih Pemberdayaan Ekonomi Menjadi Wirausaha	%				-	-	-	-	40	-	-	-	-	40	-	-	-	-	100
7	Rasio Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	Per 100.000				-	-	-	-	4,25	-	-	-	-	4,25	-	-	-	-	100
8	IPHA	Indeks				-	-	-	-	70	-	-	-	-	60,76*	-	-	-	-	86,8
9	IPKA	Indeks				-	-	-	-	75	-	-	-	-	77,86*	-	-	-	-	103,81
10	Angka Kelahiran Total (TFR)	angka				-	-	-	-	2,13	-	-	-	-	2,03	-	-	-	-	104,93
11	% Peningkatan kelompok UPPKA yang menjadi wirausaha	%				-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
12	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks				-	-	-	-	87,9	-	-	-	-	88,87	-	-	-	-	101,1
13	Indeks Manajemen Risiko	Indeks				-	-	-	-	2,75	-	-	-	-	2,92					106,18
14	Persentase pemda yang mereplikasi PPEP atau Program Pemberdayaan	%				-	-	-	-	60	-	-	-	-	80	-	-	-	-	133,33

No	Indikator Kinerja Program Sesuai Tugas Persngkat Daerah	Satuan	Targe t NSPK	Targe t IKK	Target Indikato r Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun / Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun / Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23
	Ekonomi Perempuan																			
15	% Kab/Kota yang menyediakan layanan Kualitas Keluarga Terstandar (jumlah puspage terstandar , KPPPA)	%				-	-	-	-	14,29	-	-	-	-	22,86	-	-	-	-	159,97
16	% Ketersediaan Data Pilah Gender dan Anak oleh kab/kota dan OPD Prov pada Aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA Prov)	%				-	-	-	-	25	-	-	-	-	25,71	-	-	-	-	102,84
17	Persentase kab/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standart	%				-	-	-	-	11	-	-	-	-	28,57	-	-	-	-	259,73
18	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%				-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
19	Persentase Kab/kota yang	%				-	-	-	-	77,14	-	-	-	-	100	-	-	-	-	120,7

No	Indikator Kinerja Program Sesuai Tugas Persngkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun / Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun / Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23
	mencapai predikat KLA minimal tingkat Madya																			
20	Rasio korban kekerasan terhadap anak	per 100.000				-	-	-	-	11,9	-	-	-	-	11,8	-	-	-	-	103,14
21	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	%				-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
22	Persentase mCPR	%				-	-	-	-	65.58	-	-	-	-	65,5	-	-	-	-	
23	Unmetneed KB	%				-	-	-	-	10	-	-	-	-	9,3	-	-	-	-	128,37
24	Persentase Pemerintah Daerah yang menyusun GDPK (Grand Desain Pembangunan Kependudukan) 5 Bidang	%				-	-	-	-	51	-	-	-	-	75	-	-	-	-	122,73
25	Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan	%				-	-	-	-	32	-	-	-	-	36,45	-	-	-	-	130,18
26	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%				-	-	-	-	90	-	-	-	-	90	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Program Sesuai Tugas Persngkat Daerah	Satuan	Targe t NSPK	Targe t IKK	Target Indikato r Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun / Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun / Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23
27	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%				-	-	-	-	45	-	-	-	-	45	-	-	-	-	100

Pada tabel 2.5 diatas, bahwa kinerja indikator tujuan, sasaran dan program pada Renstra Perangkat Daerah (PD) tahun 2018-2023 serta realisasi capaian Renstra PD tahun 2024 - 2026, hampir tidak ada kesenjangan antara target dan realisasinya. Hampir semua capaian kinerja selalu diatas target yang ada.

Beberapa capaian kinerja indikator terkait urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di Jawa Tengah antara lain :

Tabel 2. 6
Capaian Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2022

TAHUN	KATEGORI
2013	UTAMA
2014	MENTOR
2016	MENTOR
2018	MENTOR
2020	MENTOR
2022	MENTOR

Sumber : KPPA RI

Provinsi Jawa Tengah sudah mendapatkan 5 (lima) kali berturut-turut Provinsi Jawa Tengah memperoleh Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) Kategori Mentor 5 kali berturut-turut. Kategori Mentor merupakan Kategori tertinggi yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA RI) kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah atas komitmen dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui Pengarusutamaan Gender (PUG). Hal tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah telah mendukung implementasi PUG sebagai upaya menciptakan pembangunan kesetaraan gender dan penguatan peran perempuan dan anak sebagaimana Asta Cita ke-4.

Tabel 2. 7
Anggaran Responsif Gender (ARG) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2022 - 2024

Tahun	Pagu Belanja Operasi Dan Modal	Anggaran Responsif Gender	%
2022	15.170.639.064.973	2.000.603.046.000	13,19
2023	4.124.573.082.000	491.029.670.000	11,90
2024	10.294.183.557.000	1.069.116.041.338	10,39

Sumber : Bidang KGPP, 2024

Anggaran Responsif Gender (ARG) di Jawa Tengah masih belum optimal dalam pelaksanaannya. Beberapa upaya yang dilakukan adalah pendampingan dan evaluasi menyeluruh di masing-masing OPD dan peningkatan kapasitas pelaksana di masing-masing OPD untuk

menganalisis dan mencermati anggaran yang sudah disusun agar mempunyai dukungan untuk berkontribusi dalam pembangunan responsif gender dan anak di Jawa Tengah.

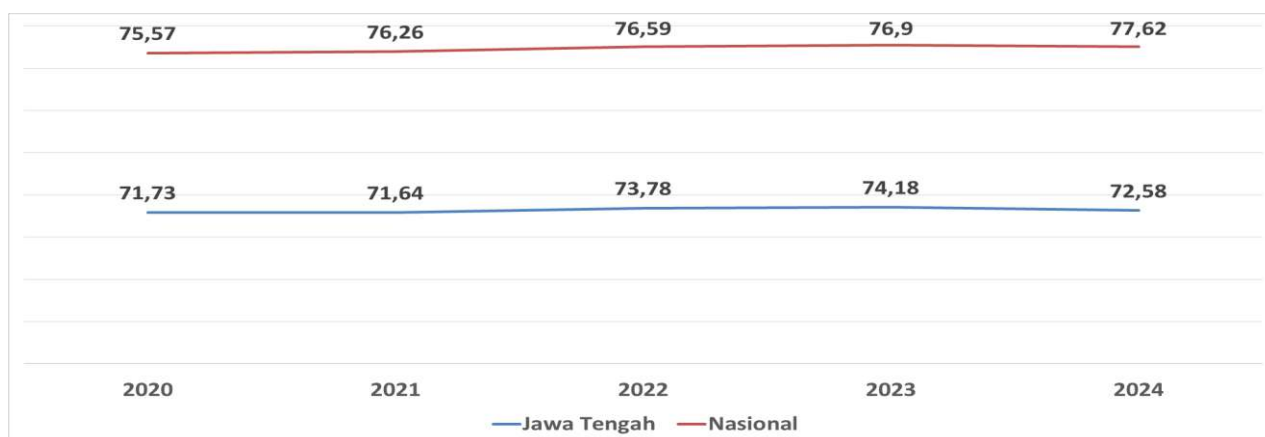
Gambar 2. 1
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: *bps.go.id* | Publikasi Gender BPS 2024 menggunakan metode *longform*

Tren positif peningkatan IPG terjadi di Jawa Tengah maupun secara nasional selama periode 2020 hingga 2024. Kenaikan IPG ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Jawa Tengah semakin baik dari waktu ke waktu. Jawa Tengah selalu berada di atas angka nasional selama periode ini. Capaian ini mencerminkan keberhasilan berbagai program terkait pendidikan, kesehatan, dan akses ekonomi yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan, walaupun belum sepenuhnya berdampak secara optimal.

Gambar 2. 2
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2019-2024

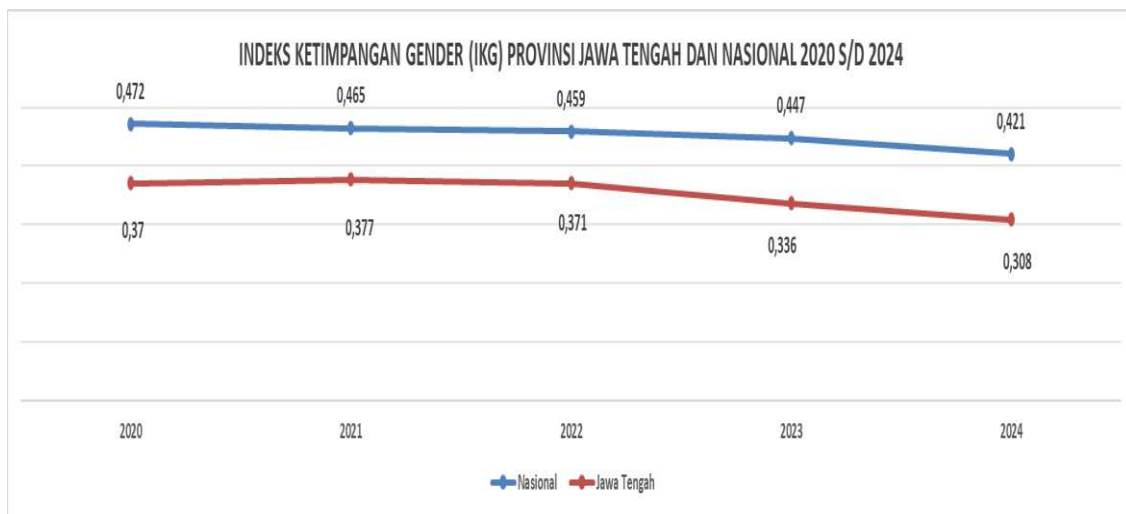


Sumber: *bps.go.id* | Publikasi Gender BPS April 2024

IDG Jawa Tengah Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,6 dari 74,18 menjadi 72,58, tetapi sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024

IDG Jawa Tengah selalu berada dibawah angka nasional. Hal tersebut dikarenakan bahwa pengaruh keterwakilan perempuan di parlemen sangat tinggi. Secara akumulatif jumlah keterwakilan perempuan di parlemen Provinsi Jawa Tengah selalu dibawah 30%, sehingga saat ini upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kapasitas perempuan dalam proses pengambilan keputusan dalam berbagai bidang dan level terus dilakukan secara masif.

Gambar 2. 3
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020 – 2024



Sumber : BPS Jawa Tengah

Nilai IKG Jawa Tengah masih dibawah angka nasional, beberapa komposit yang mempengaruhi antara lain proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan di beberapa daerah masih tinggi, adanya angka perkawinan anak mendorong kenaikan proporsi perempuan yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun, dan persentase keterwakilan perempuan yang duduk di legislatif mengalami stagnasi atau bahkan penurunan. Sedangkan persentase perempuan usia 25 tahun keatas dengan pendidikan SMA dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada Perempuan lebih rendah dari laki-laki.

Tabel 2. 8
Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik Dan Jenis Kelamin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Partai Politik	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Demokrat	6	1	7
2	Gerindra	14	3	17
3	Golkar	14	3	17
4	Amanat Nasdem Solidaritas	9	0	9
5	PDIP	24	9	33
6	PKB	15	5	20
7	PKS	10	1	11
8	PPP	4	2	6
Total		96	24	120

Sumber : *dprd.jatengprov.go.id*

Berdasarkan tabel diatas jumlah anggota legislatif perempuan sebanyak 24 orang atau 20% dari total keseluruhan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah hasil pemilihan umum tahun 2024 lalu. Hal ini menunjukkan masih timpangnya keterwakilan antara perempuan dan laki-laki yang duduk di parlemen. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain, masih adanya budaya patriarkhi di masyarakat, peran ganda perempuan, kapasitas politik dan kader potensial perempuan yang belum optimal.

Tabel 2. 9
Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

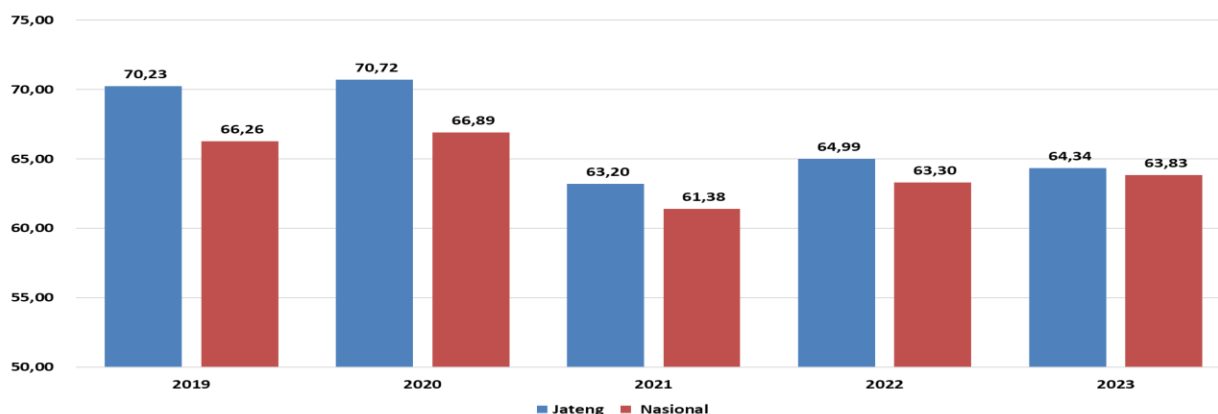
No	Kabupaten Kota	Kepala Keluarga Perempuan	Kepala Keluarga Perempuan Miskin	%
1	CILACAP	87.175	36.946	42
2	BANYUMAS	81.921	11.459	14
3	PURBALINGGA	38.045	21.016	55
4	BANJARNEGARA	37.183	14.643	39
5	KEBUMEN	56.736	19.665	35
6	PURWOREJO	41.129	11.715	28
7	WONOSOBO	32.549	11.403	35
8	MAGELANG	57.125	20.714	36
9	BOYOLALI	46.474	7.070	15
10	KLATEN	70.160	17.014	24
11	SUKOHARJO	41.978	2.288	5
12	WONOGIRI	47.759	19.463	41
13	KARANGANYAR	41.206	3.404	8
14	SRAGEN	55.425	3.074	6
15	GROBOGAN	78.896	29.008	37

16	BLORA	46.038	13.567	29
17	REMBANG	29.253	5.768	20
18	PATI	78.642	13.973	18
19	KUDUS	40.632	4.007	10
20	JEPARA	61.659	7.333	12
21	DEMAK	54.705	24.882	45
22	SEMARANG	47.576	9.783	21
23	TEMANGGUNG	29.445	14.687	50
24	KENDAL	52.405	4.666	9
25	BATANG	35.002	13.905	40
26	PEKALONGAN	41.822	4.691	11
27	PEMALANG	60.030	17.242	29
28	TEGAL	54.726	5.542	10
29	BREBES	59.113	16.022	27
30	KOTA MAGELANG	7.259	1.748	24
31	KOTA SURAKARTA	32.074	7.445	23
32	KOTA SALATIGA	10.403	2.782	27
33	KOTA SEMARANG	74.312	11.592	16
34	KOTA PEKALONGAN	16.379	1.973	12
35	KOTA TEGAL	15.446	1.532	10
TOTAL		1.660.682	412.022	25

Sumber : Dinsos Provinsi Jawa Tengah

Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah masih di angka 9,48% pada bulan maret 2025, turun 0,10% dari 9,58% pada bulan september 2024, kemiskinan tersebut tentu berpengaruh terhadap perempuan dan anak yang terdampak kemiskinan. Permasalahan perempuan dari keluarga miskin di Jawa Tengah bukanlah isu tunggal, melainkan menjadi persoalan yang bersifat multidimensi: ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, dan politik, sehingga hal tersebut mempengaruhi secara nyata kualitas hidup perempuan itu sendiri dan anak sebagai bagian dari keluarga. Tanpa intervensi yang terintegrasi, perempuan miskin akan terus berada dalam lingkaran kerentanan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih responsif gender dan berpihak pada kelompok rentan, melalui penguatan akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan secara menyeluruh.

Gambar 2. 4
Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional
Tahun 2019-2023



Sumber : Kementerian PPPA RI

Capaian IPA di Provinsi Jawa Tengah masih lebih tinggi dari capaian nasional, meskipun demikian upaya untuk mendorong implementasi kebijakan perlindungan anak terus dilakukan. Peraturan Daerah Jawa Tengah nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, menegaskan kewajiban pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk ikut mendorong kebijakan ramah anak di semua bidang kehidupan.

Gambar 2. 5
Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2024



Sumber : KPPPA RI

Tabel 2. 10
Rincian Kategori Kabupaten/Kota Layak Anak
Tahun 2024

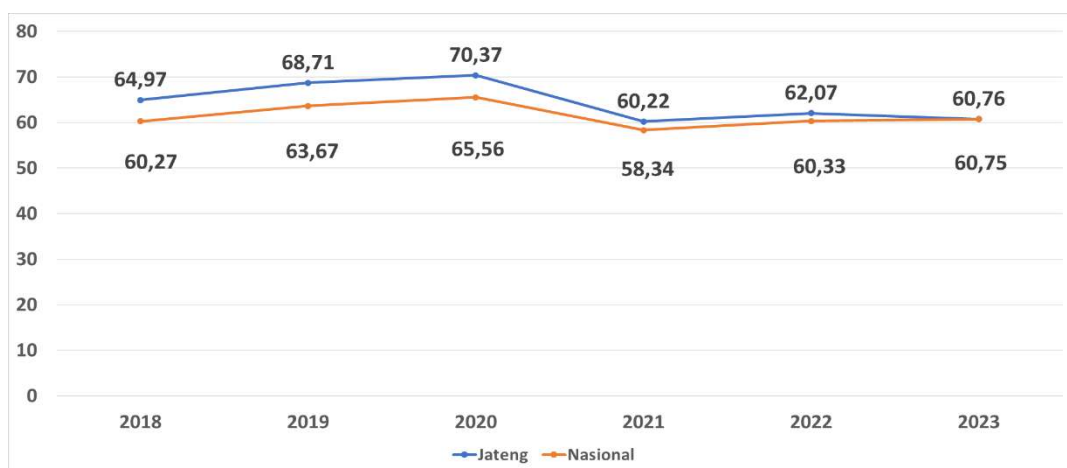
Kategori KLA	Kabupaten/Kota	Jumlah
Pratama	Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Purwoejo, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Wonosobo	5
Madya	Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal,	15

	Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, dan Kota Salatiga	
Nindya	Kota Surakarta, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Blora, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kota Tegal, Kabupaten Rembang, dan Kota Magelang	13
Utama	Kota Semarang, dan Kabupaten Sragen	2

Sumber : KPPPA RI

Pada tahun 2024, Jawa Tengah mendapat predikat Provinsi Layak Anak (Provila). Hal tersebut menunjukkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan semua Kabupaten/Kota menjadi Layak Anak, sebagai bagian dari upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak. Capaian ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang menempatkan isu perempuan dan anak sebagai prioritas pembangunan sosial, serta mendukung implementasi Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak, penghapusan kekerasan terhadap anak, dan pemenuhan hak dasar anak.

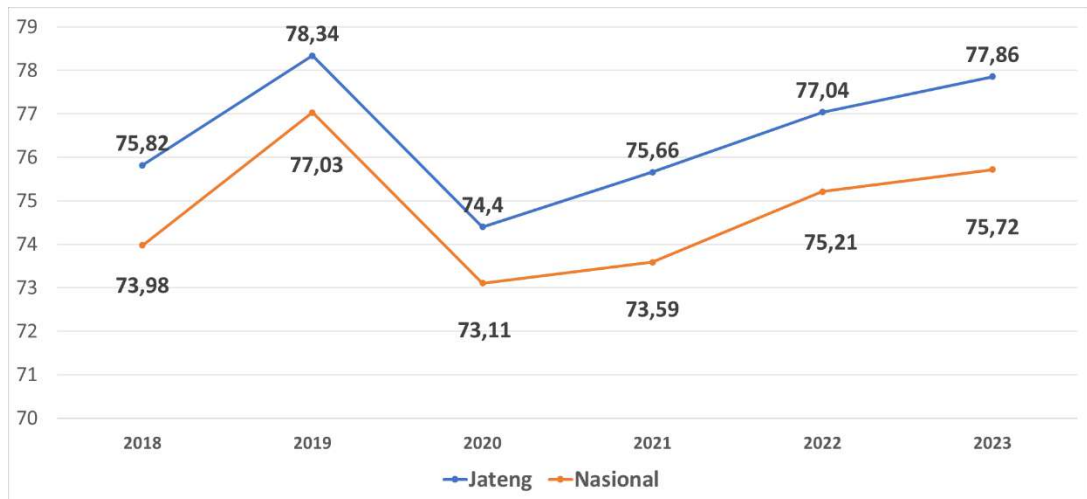
Gambar 2. 6
Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 – 2023



Sumber : siga.kemenppa.go.id

Kondisi capaian IPHA di Jawa Tengah mengalami penurunan tajam pada tahun 2021 karena adanya pandemi *covid-19*, kemudian naik pada tahun 2022 tetapi menurun lagi pada tahun 2023, hal tersebut terjadi karena beberapa faktor diantaranya adalah implementasi komposit pembentuk indeks pemenuhan hak anak masih rendah, aspek tersebut meliputi pendidikan waktu luang/budaya dan kesejahteraan dasar seringkali relatif masih rendah di daerah.

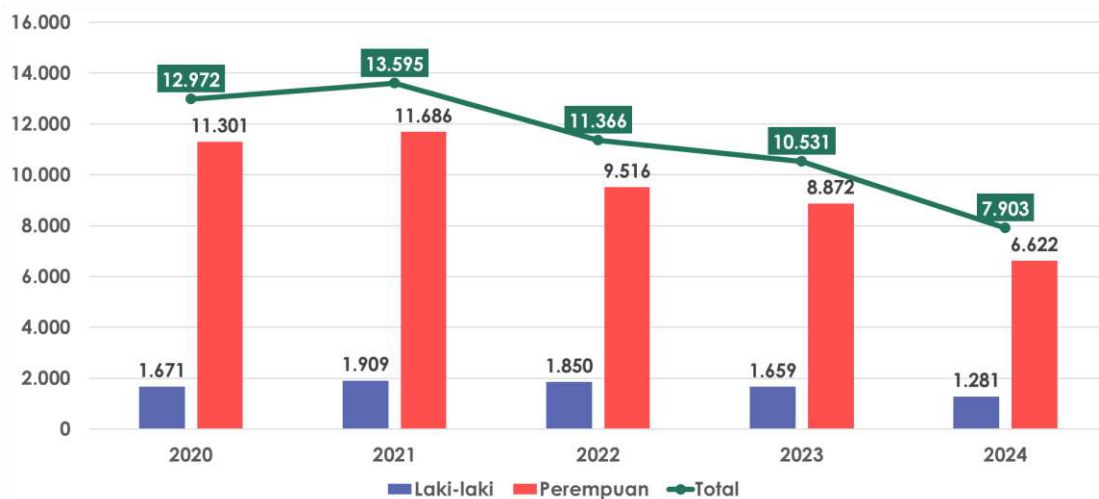
Gambar 2. 7
Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 – 2023



Sumber : siga.kemenppa.go.id

Capaian IPKA Jawa Tengah menunjukkan kenaikan yang signifikan meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup tajam karena wabah pandemi. Meski demikian, dari tahun ke tahun angka IPKA Jawa Tengah berada diatas rata-rata nasional. Beberapa kendala dalam meningkatkan IPKA didaerah antara lain masih tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak, masih banyaknya anak tidak sekolah (ATS) dan anak putus sekolah, sistem perlindungan anak berbasis masyarakat kurang optimal. Oleh karena itu, penggerakan unsur *pentahelix* sebagai upaya mendorong sistem yang berpihak kepada hak-hak anak harus terus dilakukan secara masif.

Gambar 2. 8
Grafik Perkawinan Dibawah Usia 19 Tahun Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020-2024



Sumber : Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah

Angka perkawinan anak di tingkat Provinsi Jawa Tengah semakin menurun, tetapi angkanya masih mengkhawatirkan. Perbandingan jumlah perempuan dan laki-laki yang melakukan perkawinan pada usia anak sangat timpang. Perkawinan anak yang didominasi perempuan mencerminkan adanya ketidaksetaraan gender struktural. Perempuan lebih rentan dinikahkan muda karena faktor ekonomi, norma sosial budaya, serta kontrol atas tubuh dan seksualitasnya masih rendah. Jika tidak ada intervensi serius, perkawinan anak akan terus memperkuat lingkaran kemiskinan dan ketidaksetaraan gender, serta menghambat tercapainya target pembangunan manusia.

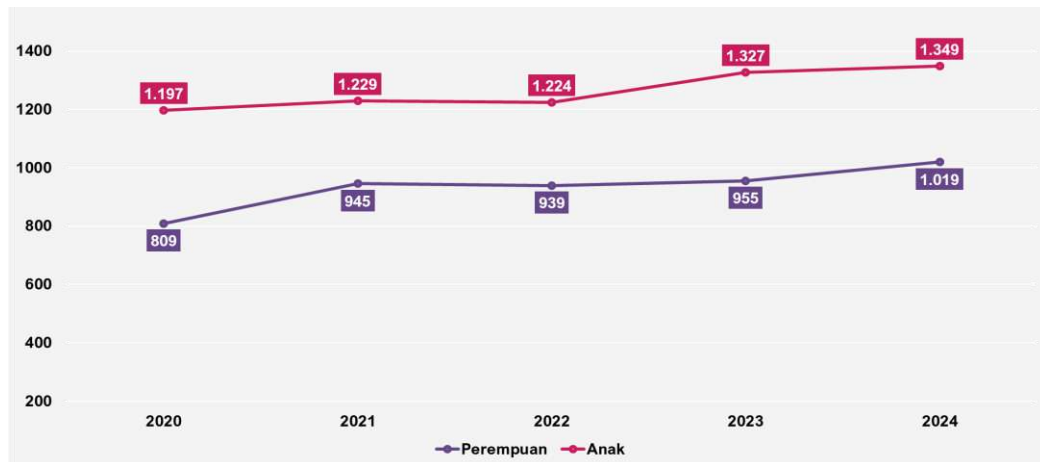
Tabel 2. 11
Jumlah Disabilitas Di Jawa Tengah s/d Tahun 2024

JENIS DISABILITAS	TOTAL 59.354
Disabilitas Fisik	6.331
Disabilitas Sensorik	2.648
Disabilitas Mental	5.185
Disabilitas Ganda	2.258
JUMLAH DISABILITAS ANAK	<u>16.422</u>
Disabilitas Fisik	16.408
Disabilitas Sensorik	8.126
Disabilitas Mental	15.331
Disabilitas Ganda	3.067
JUMLAH DISABILITAS PEREMPUAN	<u>42.932</u>

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Perempuan dan anak penyandang disabilitas di Jawa Tengah menghadapi tantangan ganda yaitu sebagai kelompok miskin dan rentan, serta karena stigma dan diskriminasi yang membatasi hak-hak mereka. Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Perda dan program inklusi sudah ada, namun masih perlu optimalisasi dalam implementasinya. Arah kebijakan harus berfokus pada pendidikan inklusif, perlindungan dari kekerasan, akses kesehatan dan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan regulasi berbasis data terpilih.

Gambar 2. 9
Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020-2024



Sumber : Simfoni PPA, Kementerian PPPA

Meningkatnya Angka kekerasan perempuan dan anak di Jawa Tengah, salah satunya karena makin tingginya *bullying* dan kekerasan berbasis gender *online* (KBGO). Upaya melalui kegiatan pencegahan membutuhkan pendekatan komprehensif & kolaboratif, mulai dari memperkuat ekonomi keluarga, memperbarui norma budaya, edukasi digital, hingga memperluas akses dan efektivitas lembaga perlindungan serta penegakan hukum yang responsif perempuan dan anak.

Secara umum, beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja terkait urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Jawa Tengah antara lain :

- a. Program gerakan Jo Kawin Bocah untuk mendukung penurunan angka perkawinan usia anak serta merupakan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di daerah.
- b. Kerjasama lintas sektor unsur *Pentahelix* dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak baik melalui perjanjian kerjasama maupun kolaborasi kegiatan.
- c. Peningkatan kapasitas tenaga dan SDM Penyedia layanan Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk mendorong kualitas layanan dalam penanganan korban kekerasan perempuan dan anak.
- d. Kerjasama lintas sektor untuk optimalisasi pemberdayaan ekonomi perempuan dengan mendorong pembiayaan non APBD seperti Baznas dan CSR lainnya.

Beberapa hal yang masih menjadi kendala dalam pencapaian kinerja urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Jawa Tengah antara lain :

- a. Semakin banyaknya kasus kekerasan berbasis gender *online* (KBGO).
- b. Masih banyaknya kasus kekerasan dilingkungan pendidikan atau dipondok pesantren.
- c. Sistem Perlindungan Anak berbasis masyarakat belum optimal.

- d. Terkendalanya akses pemasaran perempuan yang sudah dilatih ketrampilan ekonomi.
- e. Masih banyaknya Kabupaten/Kota yang belum membentuk UPTD PPA dalam rangka optimalisasi penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak.
- f. Pemanfaatan Data Pilah Gender dan Anak belum optimal dalam mendorong kebijakan responsif perempuan dan anak di daerah.

Capaian indikator terkait urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain :

Berdasarkan hasil proyeksi BKKBN, *Total Fertility Rate (TFR)* Jawa Tengah tercatat sebesar 2,03 pada tahun 2024, lebih tinggi dari capaian tahun 2023 sebesar 2,04. Capaian ini lebih rendah dibanding rata-rata nasional 2,2 pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan Jawa Tengah sudah mencapai *replacement level fertility*, yang menjadi fondasi penting dalam menciptakan keluarga berkualitas dan mendukung pembangunan kependudukan berkelanjutan. Tantangan disparitas antar wilayah dan isu perkawinan anak harus segera diatasi, agar capaian ini tidak hanya terjaga tetapi juga memberi dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Tabel 2. 12
Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Provinsi Jawa Tengah

TAHUN	PASANGAN USIA SUBUR	PESERTA KB AKTIF	CPR
2020	6.525.048	4.757.722	73,26
2021	6.408.024	4.508.188	70,35
2022	6.669.158	4.346.881	65,18
2023	5.689.002	3.938.332	69,23
2024	5.784.989	4.026.574	65,5

Sumber: *newsiga-siga.bkkbn.go.id*

Capaian *CPR* di Jawa Tengah yang berada di kisaran 65–69% pada 2022–2024 mencerminkan keberhasilan program KB dalam menjangkau masyarakat luas. Kontribusi ini sangat signifikan dalam menekan *TFR* ke level dibawah 2,1. Ke depan, tantangan utama terletak pada peningkatan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dan integrasi program KB dengan agenda pembangunan keluarga berkualitas.

Tabel 2. 13
Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020 – 2024

Tahun	Peserta KB Aktif	Peserta KB MKJP					
		IUD	MOW	MOP	IMPLAN	Jumlah	%
2020	4.757.722	447.567	232.244	25.658	659.332	1.364.801	28,69
2021	4.508.188	419.097	222.844	22.017	617.177	1.281.135	28,42
2022	4.346.881	386.774	199.958	19.219	679.991	1.285.942	29,58
2023	3.938.332	350.929	166.690	8.802	495.974	1.022.395	25,96
2024	4.026.574	363.362	169.528	7.921	543.737	1.084.548	26,93

Sumber : BKKBN Jawa Tengah

Persentase capaian penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Provinsi Jawa Tengah selama lima tahun terakhir. Pada saat pandemi *covid-19*, capaian masih relatif stabil, tetapi pasca pandemi capaian KB MKJP menurun, hal tersebut disebabkan masyarakat lebih cenderung memilih KB jangka pendek atau KB alami yang lebih praktis dan tidak memerlukan operasi.

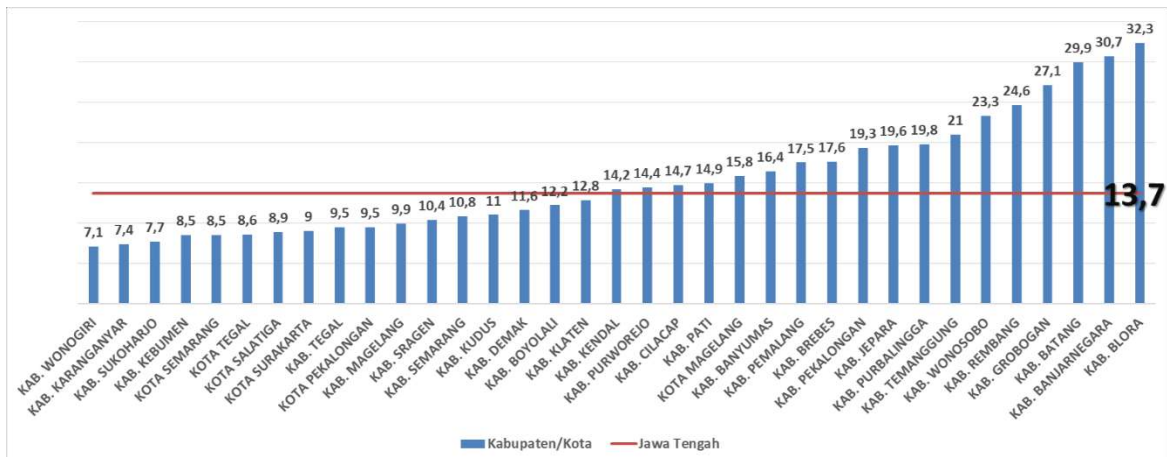
Tabel 2. 14 Unmeetneed Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah PUS	Jumlah (orang)	Unmet Need KB (%)
2020	6.525.048	839.434	12,86
2021	6.408.024	915.523	14,28
2022	6.669.158	687.858	11,63
2023	5.689.002	660.799	11,62
2024	5.784.989	538.004	9,3

Sumber : BKKBN Provinsi Jawa Tengah

Tingginya *Unmeetneed* pada tahun 2020 dan 2021, disebabkan oleh dampak pandemi *covid-19* yang membatasi akses layanan KB dan menyebabkan banyak pasangan tidak mendapatkan alat/layanan kontrasepsi. Setelah puncaknya di 2021, angka *unmetneed* mulai menurun secara konsisten ke 11,63% di 2022 dan stabil di 11,62% di 2023. Ini bisa menunjukkan mulai pulihnya layanan kesehatan, termasuk akses KB. *Unmetneed* turun drastis menjadi 9,3 %. Hal ini mencerminkan keberhasilan program KB yang lebih intensif, peningkatan edukasi, serta kesadaran pasangan usia subur terhadap penggunaan alat kontrasepsi.

Gambar 2. 10
Grafik Angka Kelahiran Menurut Umur (ASFR) Berdasarkan Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024



Sumber : BKKBN Provinsi Jawa Tengah

Capaian *ASFR* remaja (15–19 tahun) di Jawa Tengah sebesar 13,7 per 1.000 perempuan pada tahun 2024, menurun dibanding tahun 2023 sebesar 17,3 dan 2022 sebesar 23,09 per 1000 perempuan. Upaya yang sudah dilakukan untuk mendorong peningkatan capaian *ASFR* antara lain edukasi reproduksi remaja, akses KB inklusif, dan program pencegahan pernikahan dini.

Gambar 2. 11
Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020 – 2024

Tahun	Ketentraman	Kemandirian	Kebahagiaan	iBangga
2020	62,17	61,8	56,83	60,27
2021	58,46	54,6	55,22	56,1
2022	60,54	54,31	59,62	58,16
2023	60,69	55,39	73,13	63,07
2024	62,7	55,1	73,9	63,9

Sumber : BKKBN Jawa Tengah

Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) di Jawa Tengah menunjukkan hasil yang positif karena meningkat setiap tahun. Walaupun mengalami penurunan pada tahun 2021, tetapi naik sampai di angka 63,9 pada tahun 2024. 2 dari 3 dimensi mengalami kenaikan kecuali dimensi kemandirian yang menurun, sehingga kedepannya komposit pembentuk dari dimensi kemandirian harus ditingkatkan.

Tabel 2. 15
Capaian Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) Nasional dan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 – 2023

Tahun	Jawa Tengah	Indonesia
2021	67,21	63,87
2022	67,22	64,16
2023	72,63	69,51

Sumber : BPS

Capaian IPKK Jawa Tengah sudah diatas capaian nasional, walaupun kenaikan capaian Jawa Tengah hampir stagnan pada tahun 2021-2022, tetapi pada tahun 2023 sudah naik secara signifikan. Kenaikan nilai indeks ini merefleksikan perbaikan dalam berbagai dimensi ketahanan keluarga, mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga kualitas pengasuhan dan perlindungan anggota keluarga. Kenaikan indeks juga menunjukkan bahwa keluarga semakin berdaya dalam menghadapi tantangan sosial ekonomi, ditandai dengan meningkatnya tingkat partisipasi keluarga dalam kegiatan ekonomi produktif dan semakin meningkatnya praktik pengasuhan yang ramah anak.

Secara umum, beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja terkait urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain :

- a. Adanya Kader KB ditingkat Desa dalam rangka mendukung peran dan fungsi PLKB meningkatkan KIE KB dan keluarga di Desa;
- b. Mitra lintas sektor untuk mendukung penggerakan KB dari tingkat Kabupaten sampai tingkat Desa;
- c. Komitmen Kabupaten/Kota untuk menyusun GDPK 5 pilar;
- d. Meningkatnya sekolah yang sudah mengimplementasikan program Sekolah Siaga Kependudukan.

Beberapa hambatan terkait urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain :

- a. Kurangnya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada masyarakat karena keterbatasan jumlah tenaga penyuluh KB dilapangan, terutama pada masyarakat didaerah terpencil maupun perbatasan;
- b. Belum optimalnya peran kader Tribina (BKB, BKR dan BKL) dalam mendorong ketahanan keluarga;
- c. Belum Kabupaten/Kota yang sudah menyusun GDPK 5 pilar, mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan di daerahnya masing-masing.

Capaian indikator terkait urusan Penunjang Pemerintahan antara lain :

Tabel 2. 16
Capaian Sakip dan Indeks Reformasi Birokrasi (RB)
Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2022 – 2024

Tahun	NILAI SAKIP	INDEKS RB
2022	86,70	-
2023	87,90	83,90
2024	87,30	87,57

Sumber : Sub bagian Umpeg dan Program, 2024

Capaian nilai Sakip dan indeks RB pada Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah selalu dinamis tetapi cenderung mengalami kenaikan. Hal tersebut menunjukkan tata kelola pada internal dinas sudah mengalami perbaikan dari waktu ke waktu. Tata kelola pemerintahan yang dinamis diwujudkan melalui penguatan aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program urusan PPPA dan Dalduk KB. Hal ini berarti setiap kebijakan dan program kerja perlu dukungan data yang akurat, responsif terhadap kebutuhan perempuan, anak dan keluarga serta mampu menjawab isu-isu strategis yang ada di daerah.

Tabel 2. 17
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					Anggaran pada Tahun ke-APBD Tahun (Rp.000)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Belanja	12.401.286	20.601.602	20.748.444	22.021.292	22.414.825	12.401.286	20.601.602	20.748.444	22.021.292	22.414.825
3	Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.159.198.935	19.888.357.988	20.202.033.061	21.516.700.427	21.882.164.193	98,05	96,54	97,37	97,71	97,62	2.002.707.800	1.944.593.052
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada Tabel 2.17 diatas, rasio anggaran belanja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 95% yang berarti bahwa serapan anggaran untuk mendukung target kinerja sudah optimal, dengan tetap memperhatikan faktor efisiensi dan efektifitas kegiatan. Beberapa permasalahan keterserapan anggaran paling rendah yaitu pada tahun 2021, sebesar 96,54%, karena munculnya wabah *covid-19* yang mengakibatkan anggaran mengalami *refocusing*, banyak pegawai yang terdampak *covid-19* sehingga pelayanan dan kegiatan dilakukan secara daring/*zoom*, sedangkan kegiatan yang tetap harus dilakukan secara *offline*, dibatasi oleh waktu dan jumlah peserta. Walaupun demikian, target kinerja urusan PPPA dan Dalduk KB yang sudah direncanakan sebelumnya tetap tercapai.

Analisis terhadap potensi dan permasalahan merupakan langkah krusial untuk memetakan kekuatan yang dapat dimanfaatkan dan tantangan yang harus diatasi dalam periode Renstra Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Sintesis dari evaluasi kondisi umum tahun sebelumnya menunjukkan adanya modalitas yang kuat sekaligus hambatan struktural yang signifikan dalam 4 (empat) area utama: kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta tata kelola pemerintahan.

Dinas Perempuan dan anak Provinsi Jawa Tengah merupakan institusi pemerintah yang memiliki mandat strategis dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan dan pemenuhan hak anak. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan mandat tersebut dan menjadi motor penggerak perubahan sosial, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Keluarga melalui kebijakan, program dan regulasi yang telah disahkan, seperti Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.

Jejaring lintas sektor mitra kerja dinas, tidak terbatas pada Dinas/UPTD PPA di daerah maupun instansi vertikal seperti BKKBN Perwakilan Jawa Tengah, jaringan lintas sektor juga telah dibangun mencakup organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, lembaga profesi dan dunia usaha yang diinisiasi ataupun tumbuh secara organik yang bergerak untuk mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Upaya kolaborasi efektif lintas sektor dengan mitra terkait dibangun agar keberlanjutan program kegiatan dapat dilaksanakan secara komprehensif dan integratif serta memberikan dampak pada pencapaian target secara optimal.

Kolaborasi tersebut mendorong adanya pembiayaan selain non APBD melalui CSR, Baznas dan sumber lain yang tidak mengikat seperti

kerjasama kegiatan dengan UNICEF yang memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya anak di Jawa Tengah, kerjasama dengan perguruan tinggi melalui KKN tematik untuk pencegahan perkawinan anak dan masih banyak kolaborasi lain yang membantu meningkatkan kinerja urusan PPPA dan Dalduk KB.

2.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2. 18
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya peran perempuan dalam pembangunan	Masih adanya kesenjangan gender di berbagai bidang	Belum optimalnya implementasi kebijakan PUG di Provinsi maupun daerah
			Belum optimalnya implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota
			Masih terdapat ketimpangan gender dalam bidang pendidikan, kesehatan, politik dan ekonomi yang menjadi indikator pembangunan gender
			Belum optimalnya kualitas dan kuantitas data dan informasi pilah gender diberbagai level baik di Provinsi dan Kabupaten/Kota
			Masih rendahnya proporsi belanja anggaran responsif gender dibanding total pagu di perangkat daerah maupun APBD secara keseluruhan
			Masih rendahnya ketrampilan perempuan di sektor non formal
			Belum adanya layanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan terintegrasi di level Kecamatan atau Desa
2	Belum optimalnya implementasi pemenuhan hak anak didaerah	Komitmen pengambil kebijakan didaerah masih kurang	Belum semua stakeholder di Kabupaten/Kota memahami regulasi Kabupaten/Kota Layak Anak
			Implementasi Pengarusutamaan hak anak belum menjadi isu prioritas dan strategis bagi Lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha didaerah
			Belum optimalnya partisipasi anak dalam pembangunan di berbagai level mulai dari desa, kecamatan hingga tingkat Kabupaten/Kota
			Belum adanya sistem pelibatan anak dalam forum pengambilan keputusan secara berjenjang dan integratif
4	Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Semakin banyaknya jenis kasus kekerasan dan perundungan perempuan dan anak	Sebagian besar Layanan penanganan kekerasan perempuan dan anak didaerah masih terpusat pada level Kabupaten/Kota

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>Belum optimalnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak lintas sektor di daerah</p> <p>Belum optimalnya implementasi sistem perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di daerah</p> <p>Belum optimalnya perlindungan bagi perempuan anak kelompok rentan sebagai upaya pengurangan resiko</p> <p>Belum optimalnya sinergitas Lembaga penyedia layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> <p>Belum semua Kabupaten/Kota membentuk UPTD PPA</p> <p>Masih terbatasnya kapasitas SDM pada lembaga penyedia layanan di daerah</p> <p>Belum adanya layanan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak secara terpadu di level Kecamatan/Desa</p>
5	Belum optimalnya implementasi pembangunan kependudukan di daerah	Belum semua Kabupaten/Kota yang menyusun dan mengintegrasikan GDPK 5 pilar kedalam dokumen perencanaan	<p>Belum optimalnya advokasi dan pendampingan terkait pemanfaatan GDPK 5 pilar di Kabupaten/Kota</p> <p>Masih rendahnya komitmen pengambil kebijakan di Kabupaten/Kota untuk menyusun GDPK 5 pilar serta mengintegrasikan ke dokumen perencanaan</p> <p>Belum semua satuan pendidikan jenjang SMA/SMK membentuk Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)</p>
6	Masih rendahnya Kepesertaan KB Pasangan Usia Subur	Masih rendahnya kepesertaan KB terutama KB MKJP.	<p>Kurangnya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada masyarakat karena keterbatasan jumlah tenaga penyuluh KB (PLKB) dilapangan</p> <p>Masih terbatasnya akses dan layanan KB gratis utamanya KB MKJP bagi masyarakat kurang mampu di daerah pedesaan atau terpencil/perbatasan</p> <p>Kurangnya motivasi dan kapasitas Kader PPKBD, Sub PPKBD dalam memberikan KIE KB MKJP kepada masyarakat</p>
7	Belum optimalnya peran kelembagaan kelompok Tribina (BKB, BKR dan BKL) dalam mendukung peningkatan Ketahanan Keluarga.	Masih kurangnya peran aktif dan kapasitas kader kelompok Tribina (BKB, BKL dan BKR) dalam membina anggota kelompoknya	Belum optimalnya advokasi dan pendampingan serta peningkatan kapasitas bagi kader kelompok Tribina (BKB, BKL dan BKR)
8	Belum optimalnya peran kader dan kelompok UPPKA dalam mendorong peningkatan pendapatan keluarga keluarga	Masih rendahnya kapasitas kader dan anggota kelompok UPPKA dalam menciptakan wirausaha mandiri	<p>Masih rendahnya pelatihan ketrampilan ekonomi kader dan anggota UPPKA</p> <p>Terbatasnya akses sumber permodalan bagi kader dan anggota</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			kelompok UPPKA
			Kualitas produksi dan pemasaran produk hasil anggota UPPKA
9	Belum optimalnya tata kelola organisasi perangkat daerah	Belum optimalnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Belum optimalnya layanan administrasi perkantoran, sarana prasarana, informasi layanan publik dan keuangan perangkat daerah

2.5 Isu Strategis Perangkat Daerah

2.5.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Permasalahan dan Tantangan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan di level Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan belum optimal yang menyebabkan capaian kinerja dalam PPE Kabupaten/Kota belum banyak yang dilevel mentor atau utama;
- 2) Kelompok kerja PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota belum optimal dalam mendorong, mendampingi dan mengawasi implementasi kebijakan PPRG didaerah yang menyebabkan capaian ARG di level provinsi masih 10-11% dari total pagu;
- 3) Rendahnya kapasitas, ketrampilan dan akses ekonomi serta pemasaran bagi perempuan wirausaha;
- 4) Kurangnya kapasitas perempuan di bidang politik serta kurangnya minat dan dukungan masyarakat untuk dipilih dan memilih calon legislatif perempuan yang menyebabkan keterwakilan perempuan di parlemen masih rendah;
- 5) Kuatnya budaya patriarki yang menghambat kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat dan keluarga;
- 6) Belum optimalnya kualitas perencanaan dan penganggaran yang responsif anak di Kabupaten/Kota dalam mendukung pemenuhan indikator KLA;
- 7) Rendahnya partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan di level desa dan kecamatan;
- 8) Tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama kasus KDRT dan bullying;
- 9) Layanan penanganan bagi korban kekerasan perempuan dan anak yang terintegrasi belum sampai pada level kecamatan;
- 10) Masih tingginya angka perkawinan usia anak;
- 11) Penggunaan media sosial dan aplikasi internet dalam interaksi di dunia maya pada masyarakat semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki gawai, sehingga menjadi tantangan

dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan secara online.

12) Masih rendahnya jumlah petugas pendamping hukum atau paralegal di level Kecamatan/desa yang berperspektif gender dan hak anak.

b. Permasalahan dan Tantangan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 1) Belum semua Kabupaten/Kota yang menyusun pedoman Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar serta mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan;
- 2) Masih rendahnya keaktifan peran kader tribina (BKR, BKB dan BKL) dalam mendukung ketahanan keluarga;
- 3) Masih rendahnya penggunaan alat kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
- 4) Rasio Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dengan jumlah desa yang didampingi tidak proporsional;
- 5) Kurangnya kapasitas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dalam membantu tugas PLKB dan mendukung program KB secara komprehensif;
- 6) Masih banyaknya sekolah yang belum mengimplementasikan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK);

2.5.2 Isu Strategis Lingkungan Dinamis

**Tabel 2. 19
Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Urusan Pemberdayaan Perempuan	Belum optimalnya peran perempuan dalam pembangunan	1. Masih tingginya kemiskinan pada kelompok rentan yaitu perempuan, kaum marginal dan difabel 2. Kaum Perempuan merupakan kaum rentan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan perubahan iklim	1. Peran perempuan dalam pembangunan khususnya terkait isu lingkungan (perubahan iklim, degradasi lingkungan, krisis air) masih belum optimal 2. <i>Gender Gap Index</i> (WEF) menunjukkan kesenjangan cukup tinggi pada dimensi ekonomi dan politik.	Keterbatasan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi dan lingkungan (modal, pekerjaan layak, keterampilan, air bersih, dll).	Jawa Tengah sebagai wilayah rawan bencana (banjir, tanah longsor, kekeringan) menempatkan perempuan sebagai kelompok paling rentan	Belum optimalnya Pembangunan kesetaraan gender, peran perempuan, dan perlindungan terhadap perempuan dan anak

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Urusan Perlindungan Anak	Belum optimalnya implementasi pemenuhan hak anak	Belum meratanya akses pendidikan dan kesehatan yang berpengaruh terhadap kualitas hidup anak	Perubahan iklim, pencemaran, krisis air, degradasi lahan, serta meningkatnya bencana alam membawa dampak serius bagi kualitas hidup anak.	Anak belum sepenuhnya dilibatkan dalam forum perencanaan pembangunan yang ramah anak	Jawa Tengah termasuk Provinsi dengan jumlah dispensasi nikah tertinggi, faktor yang memengaruhi adalah anak putus sekolah/ATS, kemiskinan dan minimnya akses informasi kespro.	
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Masih adanya ketimpangan gender dan rendahnya perlindungan hak-hak anak	Kondisi darurat akibat bencana lingkungan sering kali memicu krisis kemanusiaan (kekerasan, eksploitasi, TPPO dll) yang membuat perempuan dan anak menjadi kelompok paling rentan	Kasus dan korban kekerasan perempuan dan anak semakin tinggi	Kekerasan berbasis gender <i>online</i> /KBGO dan <i>bullying</i> anak semakin meningkat	
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Masih rendahnya Kepesertaan KB Pasangan Usia Subur	Belum optimalnya pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Rendahnya <i>Total Fertility Rate (TFR)</i> pada beberapa negara maju di Dunia, seperti Jepang, Singapura, China.	Bonus demografi bisa menjadi bencana demografi. banyak usia produktif yang menganggur, kualitas rendah, dan berpotensi menambah beban negara, bukan menjadi penggerak pembangunan.	<i>ASFR</i> , anemia remaja putri, rendahnya tentang kespro bagi remaja dan stunting menjadi isu utama pembangunan kependudukan	Belum optimalnya pembangunan kependudukan di Provinsi Jawa Tengah
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Belum optimalnya peran kelembagaan kelompok Tribina (BKB, BKR dan BKL) dalam mendukung	Belum optimalnya pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif	Globalisasi, urbanisasi, dan migrasi internasional membuat banyak keluarga mengalami disrupsi fungsi dan rentan	Perubahan pola hidup, tekanan ekonomi akibat kerusakan lingkungan, serta meningkatnya	Siklus kerentanan keluarga berulang, Ketahanan sosial masyarakat melemah dan capaian	

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	peningkatan Ketahanan Keluarga.		ekonomi terutama pada negara berkembang	risiko bencana berdampak langsung pada stabilitas keluarga, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, pola asuh anak, pembinaan remaja, dan kualitas kehidupan lansia.	pembangunan keluarga tidak merata	
Program Penunjang urusan Daerah	Belum optimalnya tata kelola organisasi perangkat daerah	Tata kelola pemerintah yang berbasis teknologi informasi dan peningkatan kapasitas fiskal daerah yang belum optimal	Tata kelola lokal yang kuat, transparan, dan inklusif sangat penting untuk menjawab tantangan lingkungan global—mulai dari adaptasi iklim hingga pembangunan berkelanjutan	Belum optimalnya Teknologi berbasis Aplikasi dalam pengelolaan administrasi dan tatakelola organisasi	Belum optimalnya Sarpras dan kapasitas SDM internal	Belum optimalnya tata kelola organisasi perangkat daerah

2.5.3 Potensi Daerah

Adanya peluang/potensi dalam urusan PPPA dan Dalduk KB di Daerah menjadi sumber potensi penting dalam mendorong kinerja PPPA dan Dalduk KB secara berkelanjutan dan sinergis antara pusat dan daerah.

a. Peluang/Potensi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak (Perda PUG, Perda penyelenggaraan Perlindungan Perempuan, Perda Perlindungan Anak, Perda Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dan lainnya);
- 2) Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam Asta Cita Presiden ke-1 dan ke-4.
- 3) Adanya program *Quick Wins* dari Kementerian PPPA yaitu Ruang Bersama Indonesia (RBI), Perluasan jangkauan layanan SAPA, Satu data Berbasis Desa.
- 4) Program Aksi Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Kecamatan Berdaya sebagai upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.

- 5) Program taktis Gubernur dan Wakil Gubernur dalam mendorong terciptanya Pengarusutamaan Gender yang berkeadilan;
- 6) Program intervensi Gubernur yang mendukung perlindungan perempuan dan anak yaitu Pembentukan Kecamatan Berdaya dengan mendorong pembentukan rumah perlindungan perempuan, anak dan disabilitas di setiap kecamatan serta bantuan hukum bagi perempuan, anak dan disabilitas;
- 7) Tersedianya pedoman pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- 8) Tersedianya kebijakan teknis yang mengatur tentang pelaksanaan penyelenggaraan Perda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- 9) Dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak;
- 10) Kerjasama antar Provinsi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta TPPO;
- 11) Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Akademisi se-Jawa Tengah untuk implementasi 136 program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur;
- 12) Nota Kesepakatan Gubernur Jawa Tengah dan Pimpinan Aparat Penegak Hukum tingkat Jawa Tengah serta Perjanjian Kerja Sama (MOU) antara Kepala OPD PPPA dan Aparat Penegak Hukum dan Peradi terkait akses keadilan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam sistem peradilan (SPPT-PKKTP);
- 13) Adanya kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF;
- 14) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030;
- 15) Adanya kerjasama terkait perlindungan perempuan dan anak dengan unsur *pentahelix*, seperti Kerjasama Gojek dan Grab serta akademisi, organisasi perempuan, pelatihan kader paralegal oleh organisasi keagamaan dan kerjasama lainnya;
- 16) Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Baznas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha berupa CSR yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

b. Peluang/Potensi Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 1) Adanya Peraturan Perundang-undangan tingkat Nasional dan Daerah yang mendukung program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga;
- 2) Adanya program prioritas *Quick Wins* Kemendukbangga yang selaras dengan prioritas daerah yaitu Taman Asuh dan Sayang Anak

(Tamasya), Gerakan Orang Tua Cegah Stunting (Genting), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (Genting), *Supperapps* tentang Keluarga dan Lansia berdaya (Sidaya).

- 3) Adanya kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Tengah terkait Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar untuk menjadi pedoman di Daerah;
- 4) Komitmen Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mendukung program KKBPK;
- 5) Adanya dukungan dari Mitra Kerja (PKBI, TP PKK, TNI, POLRI, Lembaga/organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya) dalam pelaksanaan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga;
- 6) Adanya kebijakan terkait Kampung KB yang menjadikan potensi peningkatan kesertaan KB dan ketahanan keluarga di Desa/Kelurahan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

3.1.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan pada hakikatnya merupakan hasil akhir yang akan dicapai atas pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam rangka mendukung rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tujuan Pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan yaitu **"Mewujudkan Jawa Tengah Yang Maju dan Berkelanjutan"**. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, Visi atau tujuan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 – 2029 adalah **"Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045"**.

Sedangkan 6 (enam) Misi Jawa Tengah yaitu 1. Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global; 2. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan; 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas; 4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif; 5. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan; 6. Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Dalam rangka pencapaian sasaran Provinsi Jawa Tengah pada misi ke-5, yaitu Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan dengan **Fokus Kerja "Jateng Nyaman" melalui transformasi sosial** dengan sasaran **Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing dan berkarakter melalui indikator Indeks Modal Manusia** yang terjabarkan dalam Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (Ibangga) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG), maka Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan yang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, antara lain :

1. Meningkatkan kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak serta Perlindungan Perempuan dan Anak;
2. Meningkatkan Keluarga berkualitas;
3. Meningkatkan tata kelola perangkat daerah yang berintegritas dan dinamis.

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka perlu ditetapkan sasaran jangka menengah. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

3.1.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025 – 2029 dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran dan kapasitas perempuan dalam bidang pembangunan;
2. Meningkatnya perlindungan anak;
3. Terkendalinya jumlah penduduk;
4. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan resiko perangkat daerah;
6. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.

Secara rinci tujuan, sasaran, serta indikator kinerja dan target sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3. 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak serta Perlindungan Perempuan dan Anak		IKG (Indeks Ketimpangan Gender)	Angka	0,336	0,308	0,306	0,304	0,301	0,3	0,297	0,296	0,296
		Meningkatnya Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	64,34	-	65	65,35	66,7	66,95	67,2	67,5	67,5
		Meningkatnya peran dan kapasitas perempuan dalam bidang pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	93,31	93,44	93,45	93,47	93,49	93,5	93,52	93,55	93,55
2	Meningkatnya Keluarga Berkualitas		IPKK (Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga)	Angka	72,63	74,8	76,1	77,06	77,79	78,37	78,84	79,25	79,25
		Terkendalnya Jumlah Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2,04	2,03	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
		Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	63,07	63,9	64,25	64,5	64,75	65	65,3	65,5	65,5

Tabel 3. 2

Tujuan dan Sasaran serta indikator Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Angka	83,90	87,51	87,6	87,70	87,80	87,90	88	88,10	77,10
		Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Angka	2,75	2,92	2,93	2,95	2,98	3	3,05	3,08	3,08
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	90,25	88,87	88,9	89	89,10	89,30	89,50	89,80	89,80

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi dan kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dijabarkan sebagai berikut :

3.2.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong implementasi pemberdayaan perempuan pada Kecamatan Berdaya di Kabupaten/Kota;
- b. Memperkuat implementasi PUG di berbagai aspek melalui pelembagaan PUG, pemberdayaan perempuan, peningkatan peran keluarga dalam pemenuhan hak perempuan, serta optimalisasi penyediaan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan;
- c. Meningkatkan upaya pengurangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui KIE, penguatan kerjasama kelembagaan dan partisipasi masyarakat, serta penguatan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO melalui Rumah Perlindungan Perempuan, Anak dan Disabilitas di setiap Kecamatan;
- d. Meningkatkan kualitas penanganan kasus kekerasan perempuan, anak, disabilitas melalui bantuan hukum bagi disabilitas, perempuan dan anak dengan lokus Kecamatan;
- e. Meningkatkan pemenuhan hak anak melalui advokasi dan koordinasi lintas sektor;
- f. Meningkatkan kualitas pembangunan kependudukan, ketahanan keluarga serta mendorong peran serta lembaga dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. Mendorong penyusunan dokumen GDPK 5 pilar di daerah serta mendorong integrasinya ke dalam dokumen perencanaan
- h. Meningkatkan akses, komunikasi, informasi dan edukasi tentang KB
- i. Meningkatkan Akses terhadap Layanan Dasar Keluarga.
- j. Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan melalui perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien, pengelolaan SDM dan keuangan yang profesional, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja, serta pelaksanaan evaluasi secara berkala.

3.2.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman yang ditetapkan dalam melakukan setiap aktivitas dan kegiatan yang akan dilakukan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan yang diambil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan pengarusutamaan dan pembangunan gender serta pemberdayaan perempuan;
- b. Peningkatan upaya perlindungan kepada perempuan dan anak dengan prioritas pada upaya preventif tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kecamatan;
- c. Peningkatan layanan penanganan kekerasan perempuan dan anak melalui Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kecamatan;
- d. Penguatan kerjasama dan kemitraan dalam pemenuhan hak-hak anak di berbagai sektor dan level;
- e. Meningkatkan ketahanan keluarga
- f. Penguatan komitmen dan advokasi implementasi GDPK 5 Pilar di Kabupaten/Kota
- g. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
- h. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- i. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
- j. Peningkatan kapasitas PPKBD dalam rangka mendukung peran dan fungsi Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
- k. Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah;
- l. Peningkatan kapasitas Kader Satyagraha di Kecamatan;
- m. Penguatan forum genre melalui PIK-Remaja di Kecamatan;
- n. Penerapan prinsip-prinsip good governance secara menyeluruh dan berkelanjutan;
- o. Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan berbasis resiko;
- p. Mendorong pelaksanaan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan dan dinamis.

Penerapan prinsip-prinsip good governance secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan tujuan, sasaran perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan RPJMD : Mewujudkan Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan			
Sasaran RPJMD : Terwujudnya Sumber Daya Manusia berdaya saing dan berkarakter			
Tujuan/Sasaran	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatnya peran dan kapasitas perempuan dalam bidang pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui penyediaan kesempatan yang setara terhadap akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, serta penguasaan atas sumber daya pendidikan, kesehatan, dan ekonomi; 2. Penguatan Tata Kelola dan Regulasi PUG; 3. Peningkatan Partisipasi Perempuan di segala bidang; 4. Peningkatan kualitas data terpilah gender; 5. Penguatan kolaborasi multipihak dan sektor; 6. Pemantauan dan evaluasi kinerja PUG di daerah; 7. Mendorong peningkatan peran dan kapasitas perempuan dan anak di level Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pembangunan berbasis gender 2. Meningkatkan ketahanan keluarga 3. Mendorong implementasi Kecamatan Berdaya sebagai upaya sinergisitas untuk pemberdayaan ekonomi perempuan di daerah 4. Perluasan penyelenggaraan upaya peningkatan produktivitas ekonomi perempuan 5. Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di OPD melalui pembentukan Pokja PUG aktif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 6. Integrasi Gender <i>Equality Goals</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (RPJMD, Renstra, Renja, RKPD, KUA-PPAS). 7. Afirmasi keterwakilan perempuan dalam jabatan strategis di pemerintahan, legislatif, dan organisasi masyarakat. 8. Peningkatan ketersediaan data pilah gender dan anak provinsi dan kab/kota; 9. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan PUG di daerah.

Tujuan RPJMD : Mewujudkan Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan			
Sasaran RPJMD : Terwujudnya Sumber Daya Manusia berdaya saing dan berkarakter			
Tujuan/Sasaran	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya Perlindungan perempuan dan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong implementasi kebijakan undang-undang TPKS, Perda, Pergub maupun kebijakan perlindungan perempuan dan anak ditingkat Kab/Kota; 2. Meningkatkan kerjasama baik stakeholder baik pemerintah maupun lembaga non pemerintah ditingkat pusat, provinsi, Kab/Kota maupun antar provinsi untuk penanganan dan pencegahan kasus kekerasan perempuan dan anak; 3. Mendorong sinergisitas program dan kegiatan antar lembaga dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak; 4. Peningkatan Kapasitas SDM tenaga pada lembaga penyedia layanan; 5. Mendorong Komunikasi, Infomasi dan Edukasi tentang perlindungan anak; 6. Peningkatan Layanan Perlindungan Khusus Anak 7. Penguatan data dan sistem informasi pencatatan kekerasan perempuan dan anak 8. Penguatan peran Bunda Forum Anak dalam mendorong pemenuhan hak dan perlindungan anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender, serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak 2. Mendorong Pembentukan dan optimalisasi fungsi rumah perlindungan anak Kecamatan di Kabupaten/Kota 3. Integrasi isu perlindungan perempuan anak dalam dokumen perencanaan dan kebijakan sektoral lainnya 4. Mendorong Kabupaten/Kota dalam pembentukan dan penguatan Forum Anak tingkat Kecamatan. 5. Mendorong Kabupaten/Kota dalam pembentukan Unit Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). 6. Pencegahan perkawinan anak melalui intervensi lintas sektor 7. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Kab/Kota Layak Anak (KLA) 8. Pelatihan kader paralegal di tingkat kecamatan untuk mendorong implementasi Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Tujuan RPJMD : Mewujudkan Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan			
Sasaran RPJMD : Terwujudnya Sumber Daya Manusia berdaya saing dan berkarakter			
Tujuan/Sasaran	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Keluarga berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkendalinya jumlah penduduk 2. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong penyusunan dokumen GDPK 5 pilar di daerah serta mendorong integrasinya kedalam dokumen perencanaan 2. Peningkatan akses, komunikasi, informasi dan edukasi tentang KB 3. Peningkatan Ketahanan ekonomi Keluarga; 4. Penguatan Ketahanan Anak dan Remaja; 5. Peningkatan Akses terhadap Layanan Dasar Keluarga. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketahanan keluarga 2. Penguatan komitmen dan advokasi implementasi GDPK 5 Pilar di Kabupaten/Kota 3. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 4. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 5. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 6. Peningkatan kapasitas PPKBD dalam rangka mendukung peran dan fungsi Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 7. Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah; 8. Peningkatan kapasitas Kader Satyagraha di Kecamatan; 9. Penguatan forum genre melalui PIK-Remaja di Kecamatan.
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan melalui perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien, pengelolaan SDM dan keuangan yang profesional, pemenuhan kebutuhan sarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan prinsip-prinsip good governance secara menyeluruh dan berkelanjutan;

Tujuan RPJMD : Mewujudkan Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan			
Sasaran RPJMD : Terwujudnya Sumber Daya Manusia berdaya saing dan berkarakter			
Tujuan/Sasaran	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	dan prasarana yang mendukung kinerja, serta pelaksanaan evaluasi secara berkala	<ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan berbasis resiko; 3. Mendorong pelaksanaan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan dan dinamis.

3.2.3 Tahapan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Tengah

- a. Tahun 2026 merupakan tahap “Penguatan Landasan Pembangunan Daerah” dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah lima tahun ke depan. Tahun pertama ini difokuskan pada tema pembangunan yaitu “Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional”.
- b. Tahun 2027 merupakan tahap “Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah” dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tahun kedua ini difokuskan pada tema pembangunan yaitu “Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi”.
- c. Tahun 2028 merupakan tahap “Akselerasi Kinerja Pembangunan Daerah” dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tahun ketiga ini difokuskan pada tema pembangunan yaitu “Peningkatan Dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau”.
- d. Tahun 2029 merupakan tahap “Pemantapan Kinerja Pembangunan Daerah” dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tahun keempat ini difokuskan pada tema pembangunan yaitu “Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju Dan Berkelanjutan”.
- e. Tahun 2030 merupakan tahap terakhir dari perencanaan jangka menengah daerah yang diarahkan pada “Perwujudan Jawa Tengah yang Maju dan Berkelanjutan” dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah

Tabel 3. 4
Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan akses informasi dan edukasi tentang disiplin positif dan parenting bagi keluarga 2. Peningkatan kualitas hidup anak dan remaja melalui pemberian akses informasi, edukasi, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga 3. Peningkatan Penyadaran pentingnya perkawinan minimal di usia 19 tahun serta edukasi kepada calon pengantin 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperluas sasaran KIE tentang disiplin positif dilingkungan pondok pesantren 2. Peningkatan kualitas layanan konsultasi keluarga 3. Peningkatan edukasi bagi catin 4. Peningkatan kapasitas kader dalam mendorong 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong peningkatan SDM penyedia layanan konsultasi Keluarga yang responsif gender dan hak anak 2. Perluasan komitmen dan kerjasama lintas sektor dalam mendukung pembangunan keluarga berkualitas 3. Perluasan sasaran program KIE bagi anak, remaja dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong peningkatan SDM penyedia layanan konsultasi Keluarga yang responsif gender dan hak anak 2. Perluasan komitmen dan kerjasama lintas sektor dalam mendukung keluarga berkualitas 3. Perluasan sasaran program KIE bagi anak, remaja dan keluarga dalam mendukung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong peningkatan SDM penyedia layanan konsultasi Keluarga yang responsif gender dan hak anak 2. Perluasan komitmen dan kerjasama lintas sektor dalam mendukung pembangunan keluarga berkualitas 3. Perluasan sasaran program KIE bagi anak, remaja dan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
<p>4. Perluasan KIE tentang kespro bagi remaja dan konselor sebaya</p> <p>5. Pelibatan <i>hexahelix</i> dalam mewujudkan ketahanan keluarga</p> <p>6. Mendorong peran kader Satyagatra untuk meningkatkan kualitas keluarga</p> <p>7. Perluasan layanan konsultasi keluarga di daerah</p> <p>8. Penguatan forum genre melalui PIK-Remaja</p>	<p>ketahanan keluarga</p> <p>5. Peningkatan kapasitas konselor sebaya dalam rangka KIE Kespro</p> <p>6. Peningkatan komitmen daerah melalui kebijakan ketahanan keluarga</p> <p>7. Mendorong peran kader Satyagatra untuk meningkatkan kualitas keluarga</p> <p>8. Penguatan forum genre melalui PIK-Remaja</p>	<p>keluarga dalam mendukung ketahanan keluarga</p> <p>4. Mendorong peran kader Satyagatra untuk meningkatkan kualitas keluarga</p> <p>5. Penguatan forum genre melalui PIK-Remaja</p>	<p>ketahanan keluarga</p> <p>4. Mendorong peran kader Satyagatra untuk meningkatkan kualitas keluarga</p> <p>5. Penguatan forum genre melalui PIK-Remaja</p>	<p>keluarga dalam mendukung ketahanan keluarga</p> <p>4. Mendorong peran kader Satyagatra untuk meningkatkan kualitas keluarga</p> <p>5. Penguatan forum genre melalui PIK-Remaja</p>
<p>1. Penguatan kelembagaan PUG Provinsi maupun Kabupaten/Kota</p> <p>2. Peningkatan pemahaman SDM perencana dan penganggaran pada OPD Provinsi dan Kabupaten/kota</p> <p>3. Peningkatan kualitas belanja ARG</p> <p>4. Peningkatan kewirausahaan Perempuan</p> <p>5. Peningkatan pemahaman SDM pengelola data pilah gender dan anak Provinsi dan Kabupaten/kota</p> <p>6. Mendorong komitmen Kabupaten/Kota dalam implementasi Kecamatan Berdaya</p>	<p>1. Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG Provinsi maupun Kabupaten/ Kota</p> <p>2. Peningkatan Kapasitas SDM perencana dan penganggaran pada OPD Provinsi dan Kabupaten/ Kota</p> <p>3. Peningkatan kualitas belanja ARG</p> <p>4. Peningkatan kewirausahaan Perempuan</p> <p>5. Peningkatan kapasitas SDM pengelola data pilah gender dan anak Provinsi dan Kabupaten/ Kota</p> <p>6. Perluasan dorongan komitmen Kabupaten/</p>	<p>1. Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG Provinsi maupun Kabupaten/ Kota</p> <p>2. Peningkatan Kapasitas SDM perencana dan penganggaran pada OPD Provinsi dan Kabupaten/ Kota</p> <p>3. Peningkatan kualitas belanja ARG</p> <p>4. Peningkatan keWirausahaan Perempuan</p> <p>5. Peningkatan Kolaborasi dalam upaya pemberdayaan ekonomi perempuan</p> <p>6. Peningkatan kuantitas data pilah gender dan anak Provinsi dan Kabupaten/ kota</p>	<p>1. Peningkatan kualitas kelembagaan PUG Provinsi maupun Kabupaten/Kota</p> <p>2. Peningkatan Kapasitas SDM perencana dan penganggaran pada OPD Provinsi dan Kabupaten/kota</p> <p>3. Peningkatan kualitas belanja ARG</p> <p>4. Peningkatan keWirausahaan Perempuan</p> <p>5. Peningkatan Kolaborasi dalam upaya pemberdayaan ekonomi perempuan</p> <p>6. Peningkatan kuantitas data pilah gender dan anak Provinsi dan Kabupaten/kota</p> <p>7. Perluasan dorongan komitmen</p>	<p>1. Peningkatan kelembagaan PUG Provinsi maupun Kabupaten/ Kota</p> <p>2. Peningkatan Kapasitas SDM perencana dan penganggaran pada OPD Provinsi dan Kabupaten/ Kota</p> <p>3. Peningkatan kualitas belanja ARG Provinsi dan Kabupaten/ Kota</p> <p>4. Peningkatan kewirausahaan Perempuan</p> <p>5. Peningkatan Kolaborasi dalam upaya pemberdayaan ekonomi perempuan</p> <p>6. Peningkatan kuantitas dan kualitas data pilah gender dan anak</p>

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
	Kota dalam implementasi Kecamatan Berdaya	7. Perluasan dorongan komitmen Kabupaten/ Kota dalam implementasi Kecamatan Berdaya	Kabupaten/Kota dalam implementasi Kecamatan Berdaya	Provinsi dan Kabupaten/ kota 7. Perluasan dorongan komitmen Kabupaten/ Kota dalam implementasi Kecamatan Berdaya
<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan pelebagaan PHA di daerah Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan di daerah terkait penyelenggaraan KLA Peningkatan partisipasi anak dalam proses perencanaan di level Kabupaten/Kota Peningkatan kapasitas forum anak Provinsi dan Kabupaten/Kota Pembentukan dan Pengembangan Forum Anak di Kecamatan Berdaya Penguatan Peran Bunda Forum anak untuk PHA dan Perlindungan Anak 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan pelebagaan PHA di daerah Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan di daerah terkait penyelenggaraan KLA Peningkatan partisipasi anak dalam proses perencanaan di level kabupaten/ Kota Peningkatan kapasitas forum anak Provinsi dan Kabupaten/ Kota Pembentukan dan Pengembangan Forum Anak di Kecamatan Berdaya Penguatan Peran Bunda Forum anak 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas kelembagaan PHA lintas sektor di daerah Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan di daerah Peningkatan partisipasi anak dalam perencanaan di level kabupaten/ Kota dan kecamatan Peningkatan kapasitas forum anak Provinsi dan Kabupaten/ Kota Pengembangan Forum Anak di Kecamatan Berdaya Penguatan Peran Bunda Forum Anak 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas kelembagaan PHA lintas sektor di daerah Peningkatan kualitas implementasi KLA didaerah Peningkatan partisipasi anak dalam proses perencanaan di level kabupaten/ Kota dan kecamatan Peningkatan kapasitas forum anak Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan desa Pengembangan Forum Anak di Kecamatan Berdaya Penguatan Peran Bunda Forum anak untuk PHA dan Perlindungan Anak 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas kelembagaan PHA lintas sektor di daerah Peningkatan kualitas implementasi KLA didaerah Peningkatan partisipasi anak dalam proses perencanaan di level kabupaten/ Kota dan kecamatan Peningkatan kapasitas forum anak Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan desa Pengembangan Forum Anak di Kecamatan Berdaya Penguatan Peran Bunda Forum Anak
<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan pembentukan UPTD PPA Di Kabupaten/Kota Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan untuk KTP/A dan TPPO di Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun RPPA di Kecamatan Peningkatan komitmen 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan peran UPTD PPA di Kabupaten/ Kota Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan termasuk bantuan hukum untuk KTP/A dan TPPO di 	<ol style="list-style-type: none"> Optimalisasi peran dan fungsi UPTD PPA Di Kabupaten/ Kota dalam penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak Peningkatan kualitas SDM lembaga penyedia 	<ol style="list-style-type: none"> Optimalisasi peran dan fungsi UPTD PPA Di Kabupaten/ Kota dalam penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak Peningkatan kualitas SDM lembaga penyedia 	<ol style="list-style-type: none"> Optimalisasi peran dan fungsi UPTD PPA Di Kabupaten/ Kota dalam penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak Peningkatan kualitas SDM lembaga

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
<p>pembentukan kecamatan berdaya</p> <p>4. Peningkatan komitmen pembentukan rumah perlindungan perempuan dan anak di Kecamatan</p> <p>5. Penguatan jejaring kelembagaan pelayanan terpadu di Provinsi dan Kabupaten/Kota</p> <p>6. Pencegahan perkawinan anak melalui intervensi lintas sektor</p> <p>7. Pendidikan anti kekerasan serta <i>bullying</i> sejak dini</p> <p>8. Perluasan sekolah dan pondok pesantren ramah anak</p> <p>9. Peningkatan perlindungan 15 AMPK di Daerah</p> <p>10. Peningkatan KIE pencegahan KTPA dan TPPO.</p>	<p>Provinsi dan Kabupaten/ Kota serta RPPA</p> <p>3. Perluasan kecamatan lokus kecamatan berdaya di Kabupaten/ Kota</p> <p>4. Optimalisasi rumah perlindungan perempuan dan anak di Kecamatan</p> <p>5. Penguatan jejaring kelembagaan pelayanan terpadu di Provinsi dan Kabupaten/ Kota</p> <p>6. Pencegahan perkawinan anak melalui intervensi lintas sektor</p> <p>7. Pendidikan anti kekerasan serta <i>bullying</i> sejak dini</p> <p>8. Perluasan sekolah dan pondok pesantren ramah anak</p> <p>9. Peningkatan perlindungan 15 AMPK di Daerah</p> <p>10. Peningkatan KIE pencegahan KTPA dan TPPO</p>	<p>layanan termasuk bantuan hukum untuk KTP/A dan TPPO di Provinsi dan Kabupaten/ Kota serta RPPA</p> <p>3. Perluasan lokus kecamatan berdaya di Kabupaten/Kota</p> <p>4. Optimalisasi rumah perlindungan perempuan dan anak di Kecamatan</p> <p>5. Peningkatan jejaring kelembagaan pelayanan terpadu di Provinsi dan Kabupaten/ Kota</p> <p>6. Penurunan perkawinan anak melalui komitmen lintas sektor</p> <p>7. Pendidikan anti kekerasan dan <i>bullying</i> dilindungi pendidikan</p> <p>8. Perluasan sekolah dan pondok pesantren ramah anak</p> <p>9. Peningkatan perlindungan 15 AMPK di Daerah</p> <p>10. Peningkatan KIE pencegahan KTPA dan TPPO</p>	<p>layanan untuk KTP/A dan TPPO di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta RPPA</p> <p>3. Optimalisasi peran kecamatan berdaya di Kabupaten/Kota</p> <p>4. Optimalisasi peran rumah perlindungan perempuan dan anak di Kecamatan</p> <p>5. Peningkatan komitmen jejaring kelembagaan pelayanan terpadu di Provinsi dan Kabupaten/Kota</p> <p>6. Penurunan perkawinan anak melalui komitmen lintas sektor</p> <p>7. Pendidikan anti kekerasan dan <i>bullying</i> dilindungi pendidikan</p> <p>8. Perluasan sekolah dan pondok pesantren ramah anak</p> <p>9. Peningkatan perlindungan 15 AMPK di Daerah</p> <p>10. Peningkatan KIE pencegahan KTPA dan TPPO</p>	<p>penyedia layanan untuk KTP/A dan TPPO di Provinsi dan Kabupaten/ Kota serta RPPA</p> <p>3. Optimalisasi peran kecamatan berdaya di Kabupaten/ Kota</p> <p>4. Optimalisasi peran rumah perlindungan perempuan dan anak di Kecamatan</p> <p>5. Peningkatan komitmen jejaring kelembagaan pelayanan terpadu di Provinsi dan Kabupaten/ Kota</p> <p>6. Penurunan perkawinan anak melalui komitmen lintas sektor</p> <p>7. Pendidikan anti kekerasan dan <i>bullying</i> dilindungi pendidikan</p> <p>8. Perluasan sekolah dan pondok pesantren ramah anak</p> <p>9. Peningkatan perlindungan 15 AMPK di Daerah</p> <p>10. Peningkatan KIE pencegahan KTPA dan TPPO</p>
1. Peningkatan kesertaan KB bagi PUS terutama KB MKJP	1. Peningkatan kesertaan KB bagi PUS	1. Peningkatan kesertaan KB bagi PUS	1. Peningkatan kesertaan KB bagi PUS	1. Peningkatan kesertaan KB bagi PUS

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
2. Mendorong peningkatan peran jejaring mitra dalam upaya penggerak dan advokasi KIE Program Bangga Kencana	terutama KB MKJP	terutama KB MKJP	terutama KB MKJP	terutama KB MKJP
3. Mendorong penurunan <i>Unmeetneed</i> KB	2. Mendorong peningkatan peran jejaring mitra dalam upaya penggerak dan advokasi KIE Program Bangga Kencana	2. Mendorong peningkatan peran jejaring mitra dalam upaya penggerak dan advokasi KIE Program Bangga Kencana	2. Mendorong peningkatan peran jejaring mitra dalam upaya penggerak dan advokasi KIE Program Bangga Kencana	2. Mendorong peningkatan peran jejaring mitra dalam upaya penggerak dan advokasi KIE Program Bangga Kencana
4. Mendorong peningkatan Kampung KB mandiri dan berkelanjutan	3. Mendorong penurunan <i>Unmeetneed</i> KB	3. Mendorong penurunan <i>Unmeetneed</i> KB	3. Mendorong penurunan <i>Unmeetneed</i> KB	3. Mendorong penurunan <i>Unmeetneed</i> KB
5. Mendorong Kabupaten/Kota dalam penyusunan GDPK 5 pilar serta mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan	4. Mendorong peningkatan Kampung KB mandiri dan berkelanjutan	4. Mendorong implementasi Kampung KB mandiri dan berkelanjutan sinergis dengan DRPPA	4. Mendorong implementasi Kampung KB mandiri dan berkelanjutan sinergis dengan DRPPA	4. Mendorong implementasi Kampung KB mandiri dan berkelanjutan sinergis dengan DRPPA
6. Meningkatkan kapasitas kader Tribina dalam mendorong ketahanan keluarga	5. Mendorong Kabupaten/Kota dalam penyusunan GDPK 5 pilar serta mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan	5. Mendorong Kabupaten/Kota dalam penyusunan GDPK 5 pilar serta mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan	5. Mendorong integrasi GDPK 5 pilar ke dalam dokumen perencanaan	5. Mendorong integrasi GDPK 5 pilar ke dalam dokumen perencanaan
7. Meningkatkan kapasitas kader uppka dalam mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga	6. Meningkatkan kapasitas kader Tribina dalam mendorong ketahanan keluarga	6. Meningkatkan kapasitas kader Tribina dalam mendorong ketahanan keluarga	6. Meningkatkan kapasitas kader Tribina dalam mendorong ketahanan keluarga	6. Meningkatkan kapasitas kader Tribina dalam mendorong ketahanan keluarga
8. Sosialisasi SSK di Kabupaten/Kota	7. Meningkatkan kapasitas kader uppka dalam mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga	7. Meningkatkan kemandirian uppka dalam mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga	7. Meningkatkan kemandirian kelompok uppka dalam mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga	7. Meningkatkan kemandirian kelompok uppka dalam mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga
	8. Sosialisasi SSK di Kabupaten/Kota	8. Perluasan lokus SSK di Kabupaten/Kota	8. Perluasan lokus SSK di Kabupaten/Kota	8. Perluasan lokus SSK di Kabupaten/Kota

3.3 Manajemen Risiko Perangkat Daerah

Manajemen risiko pada dasarnya dapat dipahami sebagai suatu kombinasi antara budaya, sistem, dan proses yang dilakukan oleh suatu instansi/ organisasi untuk mengkoordinasikan, mengidentifikasi, dan mengelola risiko. Pengelolaan risiko dilakukan melalui pengembangan

budaya sadar risiko, pembentukan struktur pengelolaan risiko, dan penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.

Pengelolaan risiko strategis perangkat daerah ini bertujuan mengendalikan risiko – risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Manajemen Risiko Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 3. 5
Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Terhadap Risiko Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan								
Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Adanya Subordinasi dan ketimpangan gender terhadap perempuan	16	Pemahaman masyarakat dan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan gender masih parsial	Terjadinya ketidakadilan gender dan kekerasan terhadap perempuan. Pihak terdampak adalah keluarga	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi Perda PUG secara komprehensif di berbagai sektor - Advokasi kebijakan kepada Kab/Kota untuk optimalisasi implementasi regulasi terkait Pengarustamaan Gender - Sosialisasi Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Berbagai Bidang Pembangunan 	Kepala Dinas	2025 -2029
Meningkatkan keluarga berkualitas	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Ketahanan dan kesejahteraan keluarga menurun	12	Ekonomi keluarga yang rendah menjadikan keluarga tersebut rentan	Menghambat kemajuan dan peningkatan kualitas keluarga. Pihak	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan Layanan Edukasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Penjangkauan Penguatan Keluarga 	Kepala Dinas	2025 -2029

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				perceraian, kekerasan dan permasalahan keluarga	yang terkena Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Layanan Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) - Sosialisasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga Melalui Kelompok Kegiatan (Tribina) di Kampung Keluarga Berkualitas - Optimalisasi Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kecamatan Berdaya 		
Sasaran								
Meningkatnya peran dan kapasitas perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Perempuan tidak meningkat kesejahteraannya	12	Kapasitas dan ketrampilan perempuan masih rendah	Perempuan belum banyak memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi keluarga. Pihak yang terkena Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berspektif gender - Optimalisasi implementasi pemberdayaan ekonomi dalam Kecamatan Berdaya 	Kepala Dinas	2025 -2029

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						- Sinergi antar OPD dan lintas sektor terkait dalam Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi dalam pelatihan, produksi termasuk kemudahan akses modal		
Meningkatnya perlindungan terhadap anak	Indeks Perlindungan Anak	Kekerasan Anak masih banyak terjadi di dalam keluarga dan masyarakat	16	Regulasi Pencegahan kekerasan terhadap anak yang sudah ada tetapi belum terimplentasikan secara optimal oleh stakeholder terkait	Meningkatnya angka kasus kekerasan terhadap anak. Pihak yang terkena Anak	- Implementasi Regulasi Pencegahan kekerasan terhadap Anak secara komprehensif - Advokasi Penyusunan Regulasi Pencegahan dan Pelayanan Kekerasan terhadap Anak di Kab/kota - Kolaborasi yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, Lembaga Pendidikan dan	Kepala Dinas	2025 -2029

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						keluarga dalam upaya mendukung lingkungan yang kondusif - Optimalisasi Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kecamatan Berdaya		
Terkendalinya jumlah penduduk	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	Peningkatan jumlah kelahiran PUS yang signifikan	9	Kurangnya sosialisasi dan KIE kepada masyarakat tentang pentingnya membatasi kelahiran dan mengatur jarak kelahiran	Menurunnya kesejahteraan keluarga dan kelompok masyarakat rentan miskin bertambah. Pihak yang terkena masyarakat dan keluarga	- Sosialisasi dan KIE terkait manfaat KB bagi masyarakat - Kespro bagi remaja dan catin - Optimalisasi RPPA di Kecamatan Berdaya	Kepala Dinas	2025 -2029
Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Meningkatnya angka kasus Perkawinan Anak	8	Faktor Ekonomi Keluarga yang tidak mampu membiayai anak ke pendidikan yang lebih tinggi, sehingga menikahkan anak pada usia muda menjadi	Meningkatnya kasus kekerasan dalam keluarga dan angka perceraian, karena belum stabilnya mental anak untuk	- Advokasi Sekolah Siaga Kependudukan bagi siswa - Optimalisasi RPPA di Kecamatan Berdaya melalui fungsi kader Satyagraha.	Kepala Dinas	2025 -2029

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				salah satu jalan untuk mengurangi tanggungan keluarga	berkeluarga. Pihak yang terkena Anak dan Keluarga			
Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Indeks Manajemen Risiko	Pegawai Pejabat Pengadaan Barang Jasa menerima gratifikasi dari masyarakat/Mitra/ Penyedia	12	Kurangnya pengawasan dan evaluasi OPD	Gratifikasi dapat merusak integritas pegawai dan lembaga, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Anti Korupsi dan Gratifikasi di tingkat OPD - Pengawasan proses pengadaan barang/jasa 	Sekretaris	Semester 1-2 Tahun 2026
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Indeks Kepuasan Masyarakat	Capaian kinerja tingkat pelayanan umum kepegawaian dan keuangan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan	4	Belum semua penyelenggara layanan mengimplementasikan standar layanan yang telah ditetapkan	Persentase tingkat kepuasan pengguna layanan menurun	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - Pelayanan Informasi 	Sekretaris	Semester 1-2 Tahun 2026

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Rencana program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Sub Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

4.1.1 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

- a. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan provinsi.
 - 1) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
 - 2) Sub Kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
 - 3) Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi
- b. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Ormas kewenangan Provinsi
 - 1) Sub Kegiatan Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi
 - 2) Sub Kegiatan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi
 - 3) Sub Kegiatan peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi

4.1.2 Program Peningkatan Kualitas Keluarga

- a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
- b. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya lintas daerah Kab/Kota
Sub Kegiatan layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

4.1.3 Program Pemenuhan Hak Anak

- a. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
- b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
 - 1) Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi

- 3) Sub Kegiatan pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

4.1.4 Program Perlindungan Perempuan

- a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi
 - 2) Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi
 - 3) Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi
- b. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Sub Kegiatan Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- c. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
 - 1) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
 - 2) Sub Kegiatan penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

4.1.5 Program Perlindungan Khusus Anak

- a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota
 - 1) Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provinsi
 - 2) Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi
 - 3) Sub Kegiatan Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi
 - 4) Sub Kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi
- b. Kegiatan Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi
 - 1) Sub Kegiatan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Sub Kegiatan Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

- c. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi
 - 2) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
 - 3) Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

4.1.6 Program Pengendalian Penduduk

- a. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - 1) Sub Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi GDPK
 - 2) Sub Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat
 - 3) Sub Kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi
 - 4) Sub Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain
- b. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi
 - Sub Kegiatan Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)

4.1.7 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

- a. Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - 1) Sub Kegiatan Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal
 - 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana
 - 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja
- b. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
 - Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

4.1.8 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

- a. Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB
 - 2) Sub Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana
 - 3) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja
- b. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas
 - 2) Sub Kegiatan Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
 - 3) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

4.1.9 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
 - 4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan
 - 6) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 8) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - 9) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD

- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD
 - 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 3) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 4) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 - 5) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa surat Menyurat
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
 - 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 5) Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Tabel 4. 1
Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak serta Perlindungan Perempuan dan Anak *										3.595.441.000		3.745.000.000		3.972.000.000		7.460.000.000		7.825.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
						Indeks Ketimpangan Gender (IKG) *	Angka	0,308	0,304		0,301		0,3		0,297		0,296	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		
	Meningkatnya peran dan kapasitas perempuan dalam bidang pembangunan **									2.576.140.000		2.692.000.000		2.876.000.000		5.130.000.000		5.261.600.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
						Indeks Pembangunan Gender (IPG) **	Angka	93,44	93,47	2.576.140.000	93,49	2.692.000.000	93,5	2.876.000.000	93,52	5.130.000.000	93,55	5.261.600.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ***								1.085.000.000		1.140.000.000		1.256.000.000		2.310.000.000		2.360.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	
					Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Provinsi	Persentase Anggaran Responsif Gender di Perangkat Daerah Provinsi ***	%	10,37	12	45.000.000	13	50.000.000	14	56.000.000	15	490.000.000	16	510.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	
			Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi ****							45.000.000		50.000.000		56.000.000		490.000.000		510.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	
					Tersedianya hasil evaluasi penyelenggaraan PUG di Provinsi	Nilai Evaluasi PUG Provinsi ****	Nilai	901	900	45.000.000	900	50.000.000	900	56.000.000	900	490.000.000	900	510.000.000	Pokja Kesetaraan Gender	
				Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi *****						12.000.000		14.000.000		16.000.000		140.000.000		150.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					terlaksananya bimtek penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek ****	Orang	80	50	12.000.000	70	14.000.000	80	16.000.000	90	140.000.000	100	150.000.000	Pokja Kesetaraan Gender	JAWA TENGAH
				Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi ****						16.000.000		17.000.000		20.000.000		150.000.000		160.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	
					terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan ****	Lembaga	10	5	16.000.000	5	17.000.000	5	20.000.000	5	150.000.000	5	160.000.000	Pokja Kesetaraan Gender	JAWA TENGAH
				Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi ****						17.000.000		19.000.000		20.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	
					Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) ****	Lembaga	50	50	17.000.000	50	19.000.000	50	20.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	Pokja Kesetaraan Gender	JAWA TENGAH
					Meningkatnya Kapasitas Perempuan di Bidang Ekonomi	Persentase Perempuan yang difasilitasi pelatihan menjadi wirausaha ***	%	80	80	1.040.000.000	90	1.090.000.000	90	1.200.000.000	90	1.820.000.000	90	1.850.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi ****							1.040.000.000		1.090.000.000		1.200.000.000		1.820.000.000		1.850.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	
					Meningkatnya kapasitas perempuan dalam kelembagaan diberbagai bidang pembangunan	Persentase perempuan yang mendapat fasilitasi pengembangan kapasitas meningkat pemahamannya ****	%	N/A	40	1.040.000.000	60	1.090.000.000	80	1.200.000.000	100	1.820.000.000	100	1.850.000.000	Pokja Kesetaraan Gender	
				Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi ****						40.000.000		40.000.000		50.000.000		120.000.000		150.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Terlaksananya Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi ****	Lembaga	6	3	40.000.000	4	40.000.000	4	50.000.000	5	120.000.000	6	150.000.000	Pokja Kesetaraan Gender	JAWA TENGAH
				sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi ****						200.000.000		200.000.000		250.000.000		500.000.000		500.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	
					Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi ****	Orang	N/A	35	200.000.000	35	200.000.000	35	250.000.000	35	500.000.000	35	500.000.000	Pokja Kesetaraan Gender	JAWA TENGAH
				peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi ****						800.000.000		850.000.000		900.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	
					Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan perintis kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan ****	Orang	N/A	80	800.000.000	80	850.000.000	80	900.000.000	80	1.200.000.000	80	1.200.000.000	Pokja Kesetaraan Gender	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN ***								1.306.000.000		1.352.000.000		1.408.000.000		2.410.000.000		2.500.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	
					Meningkatnya jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan di tingkat Kabupaten/Kota sesuai standar	Persentase UPTD PPA kabupaten/kota sesuai standar layanan ***	%	14	85	1.306.000.000	95	1.352.000.000	100	1.408.000.000	100	2.410.000.000	100	2.500.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****							94.000.000		102.000.000		108.000.000		310.000.000		400.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	
					Meningkatnya kab/kota yang mengimplemen tasikan rumah perlindungan perempuan di kecamatan	Persentase Kecamatan yang mempunyai rumah perlindungan perempuan *****	%	N/A	25	94.000.000	30	102.000.000	35	108.000.000	50	310.000.000	60	400.000.000	Pokja Perlindungan Perempuan	
				Kerjasama para pihak dalam pencegahan KIP Kewenangan Provinsi *****						47.000.000		50.000.000		52.000.000		120.000.000		150.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	
					Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KIP Kewenangan Provinsi	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KIP Kewenangan Provinsi *****	Dokumen	N/A	1	47.000.000	1	50.000.000	1	52.000.000	1	120.000.000	1	150.000.000	Pokja Perlindungan Perempuan	JAWA TENGAH
				Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KIP Kewenangan Provinsi *****						37.000.000		40.000.000		42.000.000		110.000.000		150.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	
					Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KIP	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KIP Kewenangan Provinsi *****	Orang	N/A	35	37.000.000	35	40.000.000	35	42.000.000	35	110.000.000	35	150.000.000	Pokja Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
				Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi *****						10.000.000		12.000.000		14.000.000		80.000.000		100.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	
					Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat provinsi,	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota *****	Kegiatan	35	35	10.000.000	35	12.000.000	35	14.000.000	35	80.000.000	35	100.000.000	Pokja Perlindungan Perempuan	JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									2026		2027		2028		2029		2030				
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
					masyarakat, serta Kab/Kota																
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi ****							1.212.000.000		1.250.000.000		1.300.000.000		2.100.000.000		2.100.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	
					Meningkatnya jumlah lembaga penyedia layanan di Kabupaten/Kota yang terstandarisasi	Jumlah lembaga penyedia layanan yang terstandarisasi ****	Unit	N/A	15	1.212.000.000	20	1.250.000.000	25	1.300.000.000	30	2.100.000.000	35	2.100.000.000		Pokja Perlindungan Perempuan	
				Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi ****						322.000.000		330.000.000		350.000.000		650.000.000		650.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	
					Terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek ****	Orang	10	15	322.000.000	15	330.000.000	20	350.000.000	20	650.000.000	20	650.000.000		Pokja Perlindungan Perempuan	JAWA TENGAH
				Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota ****						780.000.000		800.000.000		820.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	
					Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan ****	Dokumen	5	5	780.000.000	5	800.000.000	5	820.000.000	5	1.200.000.000	5	1.200.000.000		Pokja Perlindungan Perempuan	JAWA TENGAH
				Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi ****						110.000.000		120.000.000		130.000.000		250.000.000		250.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
									2026		2027		2028		2029				2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Perempuan Provinsi	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) ****	Lembaga	N/A	5	110.000.000	5	120.000.000	5	130.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	Pokja Perlindungan Perempuan	JAWA TENGAH
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN ***								152.140.000		166.000.000		177.000.000		310.000.000		281.600.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Meningkatnya pelayanan korban kekerasan perempuan yang mendapat layanan secara komprehensif	Persentase korban kekerasan perempuan yang mendapat layanan komprehensif ***	%	100	100	152.140.000	100	166.000.000	100	177.000.000	100	310.000.000	100	281.600.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota ****							152.140.000		166.000.000		177.000.000		310.000.000		281.600.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Terlayannya korban kekerasan perempuan yang membutuhkan layanan rujukan lanjutan	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan ****	%	100	100	152.140.000	100	166.000.000	100	177.000.000	100	310.000.000	100	281.600.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
				Layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****						17.140.000		19.000.000		20.000.000		35.000.000		36.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapat layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****	Orang	N/A	11	17.140.000	12	19.000.000	13	20.000.000	14	35.000.000	15	36.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
				Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****						15.000.000		17.000.000		18.000.000		25.000.000		26.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
									2026		2027		2028		2029				2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota ****	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota ****	Orang	N/A	11	15.000.000	12	17.000.000	13	18.000.000	14	25.000.000	15	26.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
				Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota ****					75.000.000		78.000.000		83.000.000		120.000.000		85.600.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak		
					Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota ****	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota ****	Orang	N/A	25	75.000.000	30	78.000.000	30	83.000.000	30	120.000.000	30	85.600.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	JAWA TENGAH
				layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota ****					10.000.000		12.000.000		13.000.000		30.000.000		31.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak		
					Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota ****	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota ****	Orang	N/A	1	10.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	30.000.000	1	31.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
				Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota ****					15.000.000		16.000.000		17.000.000		25.000.000		26.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak		
					Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota ****	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota ****	Orang	N/A	20	15.000.000	20	16.000.000	20	17.000.000	20	25.000.000	20	26.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
									2026		2027		2028		2029				2030		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
					Kabupaten/Kota																
				layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****						10.000.000		12.000.000		13.000.000		35.000.000		36.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****	Orang	N/A	8	10.000.000	9	12.000.000	10	13.000.000	11	35.000.000	12	36.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
				layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****						10.000.000		12.000.000		13.000.000		40.000.000		41.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****	Orang	N/A	1	10.000.000	2	12.000.000	2	13.000.000	2	40.000.000	2	41.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA ***								33.000.000		34.000.000		35.000.000		100.000.000		120.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	
					Meningkatnya komitmen Kabupaten/Kota dalam pembangunan ketahanan keluarga	Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan terkait ketahanan keluarga ***	%	10	20	33.000.000	25	34.000.000	30	35.000.000	35	100.000.000	40	120.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
									2026		2027		2028		2029				2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi ****							33.000.000		34.000.000		35.000.000		100.000.000		120.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	
					Meningkatnya kualitas pembangunan ketahanan keluarga	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapat pendampingan intensif terkait kebijakan pembangunan ketahanan keluarga ****	%	14	20	33.000.000	25	34.000.000	30	35.000.000	35	100.000.000	40	120.000.000	Pokja Kesetaraan Gender	
				Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota ****						33.000.000		34.000.000		35.000.000		100.000.000		120.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	
					Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota ****	Jumlah pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota ****	Lembaga	10	10	33.000.000	10	34.000.000	10	35.000.000	10	100.000.000	10	120.000.000	Pokja Kesetaraan Gender	JAWA TENGAH
	Meningkatnya Perlindungan Anak **									1.019.301.000		1.053.000.000		1.096.000.000		2.330.000.000		2.563.400.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
						Indeks Perlindungan Anak (IPA) **	Angka	N/A	65,35	1.019.301.000	66,7	1.053.000.000	66,95	1.096.000.000	67,2	2.330.000.000	67,5	2.563.400.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA ***								61.000.000		63.000.000		65.000.000		220.000.000		250.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
					Meningkatnya kualitas lembaga Layanan Keluarga yang responsif gender dan hak anak di Kabupaten/Kota	Persentase lembaga layanan keluarga yang terlatih ***	%	4,25	24	61.000.000	34	63.000.000	44	65.000.000	54	220.000.000	64	250.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
									2026		2027		2028		2029				2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota ****							61.000.000		63.000.000		65.000.000		220.000.000		250.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
					Meningkatnya ketersediaan Layanan Keluarga yang responsif gender dan hak anak	Persentase Layanan Keluarga yang meliputi Edukasi, Konsultasi, dan Konseling yang responsif gender dan anak ****	%	100	100	61.000.000	100	63.000.000	100	65.000.000	100	220.000.000	100	250.000.000	Pokja Pemenuhan Hak Anak	
				layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****						61.000.000		63.000.000		65.000.000		220.000.000		250.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
					Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****	Orang	20	20	61.000.000	20	63.000.000	20	65.000.000	20	220.000.000	20	250.000.000	Pokja Pemenuhan Hak Anak	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak (PHPA), Jawa Tengah
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) ***								601.301.000		606.000.000		611.000.000		1.015.000.000		1.070.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
					Meningkatnya kualitas Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak ***	Angka	60,76	61,5	601.301.000	62	606.000.000	62,5	611.000.000	63	1.015.000.000	63,5	1.070.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
			Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi ****							575.000.000		575.000.000		575.000.000		800.000.000		800.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
					Meningkatnya predikat KLA kab/kota	Jumlah Kabupaten/Kota dengan predikat KLA minimal Madya ****	Kabupaten/Kota	29	30	575.000.000	31	575.000.000	32	575.000.000	33	800.000.000	34	800.000.000	Pokja Pemenuhan Hak Anak	
				Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi *****						575.000.000		575.000.000		575.000.000		800.000.000		800.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									2026		2027		2028		2029		2030				
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
					Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi ****	Lembaga	N/A	20	575.000.000	20	575.000.000	20	575.000.000	20	800.000.000	20	800.000.000	Pokja Pemenuhan Hak Anak	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak - JAWA TENGAH	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi ****							26.301.000		31.000.000				215.000.000			270.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
					Meningkatnya jumlah lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak yang mendapat KIE Layanan Ramah Anak	Jumlah lembaga layanan pemenuhan hak anak yang mendapatkan KIE layanan ramah anak ****	Lembaga	35	35	26.301.000	35	31.000.000	35	36.000.000	35	215.000.000	35	270.000.000	Pokja Pemenuhan Hak Anak		
				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak ****						7.000.000		10.000.000				80.000.000			100.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
					Terselenggaranya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak ****	Kegiatan	1	3	7.000.000	3	10.000.000	3	12.000.000	3	80.000.000	3	100.000.000	Pokja Pemenuhan Hak Anak	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak - JAWA TENGAH	
				Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi ****						7.301.000		8.000.000				50.000.000			70.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
					terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi ****	Dokumen	1	1	7.301.000	1	8.000.000	1	9.000.000	1	50.000.000	1	70.000.000	Pokja Pemenuhan Hak Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
				pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi ****						12.000.000		13.000.000				85.000.000			100.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan pendampingan ****	Lembaga	N/A	10	12.000.000	10	13.000.000	10	15.000.000	10	85.000.000	10	100.000.000	Pokja Pemenuhan Hak Anak	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak - JAWA TENGAH
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK ***								207.000.000		226.000.000		253.000.000		825.000.000		945.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
					Meningkatnya kualitas perlindungan khusus anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) ***	Angka	77,86	79	207.000.000	79,4	226.000.000	79,9	253.000.000	80,5	825.000.000	81	945.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
			Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota ****							71.000.000		81.000.000		92.000.000		125.000.000		155.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
					Meningkatnya Kabupaten/Kota yang mengimplem- tasikan rumah perlindungan anak di kecamatan	Persentase Kecamatan yang mempunyai rumah perlindungan anak ***	%	N/A	25	71.000.000	30	81.000.000	35	92.000.000	50	125.000.000	60	155.000.000	Pokja Perlindungan Anak	
				Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KIA Kewenangan Provinsi *****						10.000.000		13.000.000		17.000.000		20.000.000		30.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
					Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KIA	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KIA Kewenangan Provinsi *****	Orang	N/A	35	10.000.000	35	13.000.000	35	17.000.000	35	20.000.000	35	30.000.000	Pokja Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
				Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi *****						10.000.000		13.000.000		15.000.000		25.000.000		35.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
									2026		2027		2028		2029				2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota ****	Lembaga	N/A	35	10.000.000	35	13.000.000	35	15.000.000	35	25.000.000	35	35.000.000	Pokja Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
				Kerjasama para pihak dalam pencegahan KIA Kewenangan Provinsi ****						41.000.000		43.000.000		45.000.000		55.000.000		60.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
					Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KIA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KIA Kewenangan Provinsi ****	Dokumen	N/A	1	41.000.000	1	43.000.000	1	45.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	Pokja Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
				monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KIA Kewenangan Provinsi ****						10.000.000		12.000.000		15.000.000		25.000.000		30.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
					Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KIA Kewenangan Provinsi ****	Laporan	N/A	1	10.000.000	1	12.000.000	1	15.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	Pokja Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota ****						136.000.000		145.000.000		161.000.000		700.000.000		790.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Meningkatnya kapasitas lembaga layanan perlindungan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang difasilitasi dan dikuatkan	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan anak yang telah difasilitasi pengembangannya ****	Lembaga	10	50	136.000.000	50	145.000.000	50	161.000.000	50	700.000.000	50	790.000.000	Pokja Perlindungan Anak	
				pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi *****						110.000.000		115.000.000		125.000.000		250.000.000		270.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
					Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi	jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus *****	Lembaga	N/A	3	110.000.000	3	115.000.000	3	125.000.000	3	250.000.000	3	270.000.000	Pokja Perlindungan Anak	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak - JAWA TENGAH
				Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi *****						15.000.000		17.000.000		20.000.000		250.000.000		270.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
					Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus *****	Orang	260	25	15.000.000	25	17.000.000	25	20.000.000	25	250.000.000	25	270.000.000	Pokja Perlindungan Anak	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak - JAWA TENGAH
				Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi *****						11.000.000		13.000.000		16.000.000		200.000.000		250.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) ****	Lembaga	N/A	3	11.000.000	3	13.000.000	3	16.000.000	3	200.000.000	3	250.000.000	Pokja Perlindungan Anak	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak - JAWA TENGAH
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK ***								150.000.000		158.000.000		167.000.000		270.000.000		298.400.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Meningkatnya pelayanan korban kekerasan anak secara komprehensif	Persentase korban kekerasan anak yang mendapat layanan komprehensif ***	%	100	100	150.000.000	100	158.000.000	100	167.000.000	100	270.000.000	100	298.400.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi ****							150.000.000		158.000.000		167.000.000		270.000.000		298.400.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Terlaksananya korban kekerasan anak yang membutuhkan layanan rujukan lanjutan	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan ****	%	100	100	150.000.000	100	158.000.000	100	167.000.000	100	270.000.000	100	298.400.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
				Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****						75.000.000		77.000.000		80.000.000		98.000.000		109.400.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****	Orang	96	100	75.000.000	120	77.000.000	130	80.000.000	140	98.000.000	150	109.400.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	JAWA TENGAH
				Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****						15.000.000		16.000.000		17.000.000		35.000.000		40.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota ****	Orang	96	100	15.000.000	120	16.000.000	130	17.000.000	140	35.000.000	150	40.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	JAWA TENGAH
				layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota ****						15.000.000		16.000.000		17.000.000		31.000.000		35.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota ****	Orang	N/A	11	15.000.000	12	16.000.000	13	17.000.000	14	31.000.000	15	35.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
				layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota ****						15.000.000		16.000.000		17.000.000		28.000.000		30.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota ****	Orang	N/A	11	15.000.000	12	16.000.000	13	17.000.000	14	28.000.000	15	30.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
				layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota ****						10.000.000		11.000.000		12.000.000		28.000.000		30.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota a&	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota ****	Orang	N/A	1	10.000.000	2	11.000.000	2	12.000.000	2	28.000.000	2	30.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
				layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota ****						10.000.000		11.000.000		12.000.000		30.000.000		32.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota a	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota ****	Orang	N/A	8	10.000.000	9	11.000.000	10	12.000.000	11	30.000.000	12	32.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
				layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota ****						10.000.000		11.000.000		12.000.000		20.000.000		22.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota a	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota ****	Orang	N/A	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	20.000.000	1	22.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
Meningkatkan Keluarga Berkualitas *										839.700.000		959.000.000		1.072.000.000		1.610.000.000		1.730.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
						Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) *	Angka	74,8	77,06			77,79		78,37		78,84		79,25	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
	Terkendalnya Jumlah Penduduk **									477.000.000		520.000.000		557.000.000		730.000.000		730.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
						Total Fertility Rate (TFR) **	Angka	2,03	2,1	477.000.000	2,1	520.000.000	2,1	557.000.000	2,1	730.000.000	2,1	730.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) ***								477.000.000		520.000.000		557.000.000		730.000.000		730.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi	
					Meningkatnya kesertaan KB	Persentase Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR) ***	%	65,5	69,48	477.000.000	69,49	520.000.000	69,5	557.000.000	69,51	730.000.000	69,52	730.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi	
			Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal ****							440.000.000		480.000.000		515.000.000		670.000.000		670.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi	
					Meningkatnya Akseptor KB MKJP	Persentase Pengguna Kontrasepsi MKJP ****	%	27,1	27,9	440.000.000	28,3	480.000.000	28,7	515.000.000	29	670.000.000	29,3	670.000.000	Pokja Keluarga Berencana	
				Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal *****						90.000.000		100.000.000		110.000.000		180.000.000		180.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi	
					Terlaksananya Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal *****	Dokumen	40	20	90.000.000	30	100.000.000	30	110.000.000	40	180.000.000	40	180.000.000	Pokja Keluarga Berencana	Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi, JAWA TENGAH
				Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana *****						50.000.000		60.000.000		65.000.000		90.000.000		90.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Terlaksananya fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) *****	Daerah	7	4	50.000.000	4	60.000.000	4	65.000.000	4	90.000.000	4	90.000.000	Pokja Keluarga Berencana	Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi, JAWA TENGAH
				Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja *****						300.000.000		320.000.000		340.000.000		400.000.000		400.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi	
					Terlaksananya Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja *****	Daerah	18	7	300.000.000	10	320.000.000	10	340.000.000	15	400.000.000	15	400.000.000	Pokja Keluarga Berencana	Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi, JAWA TENGAH
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB *****							37.000.000		40.000.000		42.000.000		60.000.000		60.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi	
					Menurunnya jumlah PUS tidak terlayani menggunakan kontrasepsi modern	Unmetneed KB ****	%	9,5	9,25	37.000.000	9	40.000.000	8,75	42.000.000	8,5	60.000.000	8,4	60.000.000	Pokja Komunikasi, Informasi, dan Edukasi KB	
				Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB *****						37.000.000		40.000.000		42.000.000		60.000.000		60.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi	
					Terpenuhnya Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB *****	Organisasi	2	3	37.000.000	3	40.000.000	3	42.000.000	3	60.000.000	3	60.000.000	Pokja Komunikasi, Informasi, dan Edukasi KB	Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi, JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga **									362.700.000		439.000.000		515.000.000		880.000.000		1.000.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
						Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) **	Angka	63,9	64,5	362.700.000	64,75	439.000.000	65	515.000.000	65,3	880.000.000	65,5	1.000.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK ***								114.700.000		129.000.000		145.000.000		235.000.000		285.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	
					Meningkatnya Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan GDPK 5 pilar ke dalam dokumen perencanaan	Persentase kabupaten/kota yang mengintegrasikan dokumen GDPK 5 pilar ke dalam dokumen perencanaan daerah ***	%	68	75	114.700.000	80	129.000.000	85	145.000.000	90	235.000.000	95	285.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	
			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk ****							109.700.000		122.000.000		135.000.000		220.000.000		260.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	
					Meningkatnya Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi penyusunan GDPK 5 Pilar	Jumlah pemerintah daerah yang menyusun GDPK 5 pilar dalam pembangunan *****	Kabupaten/Kota	25	28	109.700.000	29	122.000.000	30	135.000.000	32	220.000.000	35	260.000.000	Pokja Pengendalian Penduduk	
				Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat *****						25.000.000		25.000.000		28.000.000		55.000.000		70.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	
					Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat *****	Dokumen	N/A	1	25.000.000	1	25.000.000	1	28.000.000	1	55.000.000	1	70.000.000	Pokja Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
									2026		2027		2028		2029				2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Advokasi dan Sosialisasi GDPK *****						54.700.000		60.000.000		65.000.000		85.000.000		90.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	
					Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK *****	Laporan	2	3	54.700.000	3	60.000.000	3	65.000.000	3	85.000.000	3	90.000.000	Pokja Pengendalian Penduduk	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, JAWA TENGAH
				Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi *****						18.000.000		22.000.000		25.000.000		50.000.000		60.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	
					Terlaksananya Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi *****	Dokumen	2	2	18.000.000	2	22.000.000	2	25.000.000	2	50.000.000	2	60.000.000	Pokja Pengendalian Penduduk	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, JAWA TENGAH
				Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain *****						12.000.000		15.000.000		17.000.000		30.000.000		40.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	
					Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain *****	Daerah	2	2	12.000.000	2	15.000.000	2	17.000.000	2	30.000.000	2	40.000.000	Pokja Pengendalian Penduduk	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, JAWA TENGAH
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi *****							5.000.000		7.000.000		10.000.000		15.000.000		25.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	
					Tersedianya dokumen pemetaan perkiraan penduduk	Jumlah dokumen profil pembangunan penduduk. ****	Dokumen	N/A	1	5.000.000	1	7.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	1	25.000.000	Pokja Pengendalian Penduduk	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) *****						5.000.000		7.000.000		10.000.000		15.000.000		25.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	
				Terlaksananya Penyusunan profil program Bangga Kencana tingkat provinsi (Termasuk diseminasi hasil penyusunan profil, penetapan parameter, dan evaluasi parameter Pengendalian Penduduk dan KB dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah)	Jumlah Dokumen Profil program Bangga Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga *****	Dokumen	1	1	5.000.000	1	7.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	1	25.000.000	Pokja Pengendalian Penduduk	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, JAWA TENGAH	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) ***								248.000.000		310.000.000		370.000.000		645.000.000		715.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	
					Meningkatnya kampung keluarga berkualitas mandiri dan berkelanjutan	Persentase Kampung KB mandiri dan berkelanjutan ***	%	30,3	34	248.000.000	36	310.000.000	38	370.000.000	40	645.000.000	42	715.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	
			Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ***							80.000.000		110.000.000		135.000.000		280.000.000		280.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	
					Menurunnya jumlah perempuan melahirkan pertama kali di usia 15 - 19 tahun	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) ****	per 1000 WUS 15 - 19 tahun	17,3	16	80.000.000	15	110.000.000	14	135.000.000	13	280.000.000	12	280.000.000	Pokja Keluarga Sejahtera	
				Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB *****						20.000.000		30.000.000		40.000.000		90.000.000		90.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Terpeenuhnya PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB ****	Organisasi	3	3	20.000.000	3	30.000.000	3	40.000.000	3	90.000.000	3	90.000.000	Pokja Keluarga Sejahtera	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, JAWA TENGAH
				Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana ****						30.000.000		40.000.000		45.000.000		90.000.000		90.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	
					Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana ****	Kelompok	N/A	3	30.000.000	3	40.000.000	3	45.000.000	3	90.000.000	3	90.000.000	Pokja Keluarga Sejahtera	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, JAWA TENGAH
				Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja ****						30.000.000		40.000.000		50.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	
					Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja ****	Daerah	3	3	30.000.000	3	40.000.000	3	50.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	Pokja Keluarga Sejahtera	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, JAWA TENGAH
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ***							168.000.000		200.000.000		235.000.000		365.000.000		435.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	
					Meningkatnya kelompok UPPKA yang aktif	Persentase kelompok UPPKA yang aktif ****	%	92,9	95	58.000.000	96	70.000.000	97	85.000.000	98	165.000.000	98,5	185.000.000	Pokja Keluarga Sejahtera	
				Fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas ****						25.000.000		30.000.000		40.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	
					Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas di	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas ****	Kabupaten/ Kota	3	3	25.000.000	3	30.000.000	3	40.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	Pokja Keluarga Sejahtera	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									2026		2027		2028		2029		2030				
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
					tingkat kabupaten/kota																
				Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota ****						33.000.000		40.000.000		45.000.000		65.000.000		85.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	
				Terlaksananya fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah fasilitasi Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota ****	Laporan	1	2	33.000.000	2	40.000.000	2	45.000.000	2	65.000.000	2	85.000.000		Pokja Keluarga Sejahtera	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, JAWA TENGAH	
				Meningkatnya kelompok tribina (BKB, BKR dan BKL) yang aktif	Persentase kelompok tribina yang aktif ****	%	92,9	95	110.000.000	96	130.000.000	97	150.000.000	98	200.000.000	98,5	250.000.000		Pokja Keluarga Sejahtera		
				Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga ****						110.000.000		130.000.000		150.000.000		200.000.000		250.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	
				Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor	Jumlah Mitra dan Organisasi Masyarakat yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga ****	Organisasi	3	2	110.000.000	2	130.000.000	2	150.000.000	2	200.000.000	2	250.000.000		Pokja Keluarga Sejahtera	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, JAWA TENGAH	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									2026		2027		2028		2029		2030				
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
					(UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga																
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana *										16.382.117.000		16.369.840.000		17.083.532.000		22.699.427.000		22.740.002.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana *	Angka	87,51	87,7			87,8		87,9		88		88,1		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana **									272.000.000		272.000.000		315.000.000		400.000.000		400.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana **	Angka	2,92	2,95	272.000.000		2,98	272.000.000	3	315.000.000	3,05	400.000.000	3,08	400.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
									2026		2027		2028		2029				2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***								272.000.000		272.000.000		315.000.000		400.000.000		400.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana ***	%	45	55	272.000.000	60	272.000.000	62	315.000.000	65	400.000.000	67	400.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****							272.000.000		272.000.000		315.000.000		400.000.000		400.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan ****	%	40	50	272.000.000	55	272.000.000	55	315.000.000	55	400.000.000	55	400.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****						65.000.000		65.000.000		70.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****	Dokumen	1	7	65.000.000	7	65.000.000	7	70.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****						77.000.000		77.000.000		85.000.000		110.000.000		110.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****	Laporan	1	5	77.000.000	5	77.000.000	5	85.000.000	5	110.000.000	5	110.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah *****						90.000.000		90.000.000		100.000.000		120.000.000		120.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah *****	Data	N/A	1	90.000.000	1	90.000.000	1	100.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****						40.000.000		40.000.000		60.000.000		70.000.000		70.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Terseleenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah ****	Dokumen	N/A	1	40.000.000	1	40.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana **									16.110.117.000		16.097.840.000		16.768.532.000		22.299.427.000		22.340.002.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana **	Angka	88,87	89	16.110.117.000	89,1	16.097.840.000	89,3	16.768.532.000	89,5	22.299.427.000	89,8	22.340.002.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***								15.521.917.000		15.499.840.000		16.126.532.000		21.409.427.000		21.450.002.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana ***	%	90	100	15.521.917.000	100	15.499.840.000	100	16.126.532.000	100	21.409.427.000	100	21.450.002.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****							12.950.728.000		12.950.728.000		13.231.392.000		14.435.000.000		14.435.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	1	1	12.950.728.000	1	12.950.728.000	1	13.231.392.000	1	14.435.000.000	1	14.435.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *****						12.610.728.000		12.610.728.000		12.851.392.000		14.000.000.000		14.000.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN ****	Orang/Bulan	60	65	12.610.728.000	70	12.610.728.000	70	12.851.392.000	70	14.000.000.000	70	14.000.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ****						310.000.000		310.000.000		340.000.000		370.000.000		370.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ****	Dokumen	1	1	310.000.000	1	310.000.000	1	340.000.000	1	370.000.000	1	370.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD ****						20.000.000		20.000.000		25.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD ****	Dokumen	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD ****						10.000.000		10.000.000		15.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD ****	Laporan	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****							62.000.000		62.000.000		90.000.000		120.000.000		120.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	1	1	62.000.000	1	62.000.000	1	90.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD ****						0		0		0		0		0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD ****	Dokumen	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD ****						60.000.000		60.000.000		80.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	1	1	60.000.000	1	60.000.000	1	80.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *****						2.000.000		2.000.000		10.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *****	Laporan	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	10.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *****							108.000.000		108.000.000		150.000.000		190.000.000		190.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	90	90	108.000.000	90	108.000.000	90	150.000.000	90	190.000.000	90	190.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya *****						0		0		0		0		0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan *****	Paket	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****						10.000.000		10.000.000		20.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *****						0		0		0		0		0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan *****	Orang	20	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan *****						38.000.000		38.000.000		50.000.000		70.000.000		70.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan *****	Orang	25	20	38.000.000	25	38.000.000	25	50.000.000	25	70.000.000	25	70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan *****						60.000.000		60.000.000		80.000.000		90.000.000		90.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan *****	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan *****	Orang	50	50	60.000.000	50	60.000.000	60	80.000.000	60	90.000.000	70	90.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
									2026		2027		2028		2029				2030		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
					Perundang-Undangan																
			Administrasi Umum Perangkat Daerah ****							453.000.000		453.000.000		555.000.000		919.427.000		919.427.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum yang sesuai standar layanan ****	%	90	90	453.000.000	90	453.000.000	90	555.000.000	90	919.427.000	90	919.427.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****						8.000.000		8.000.000		10.000.000		20.000.000		20.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan ****	Paket	1	1	8.000.000	1	8.000.000	1	10.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****						64.000.000		64.000.000		70.000.000		244.427.000		244.427.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan ****	Paket	5	2	64.000.000	5	64.000.000	5	70.000.000	5	244.427.000	5	244.427.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ****						10.000.000		10.000.000		20.000.000		50.000.000		50.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan ****	Paket	2	1	10.000.000	2	10.000.000	2	20.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor ****						124.000.000		124.000.000		130.000.000		200.000.000		200.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan ****	Paket	12	12	124.000.000	12	124.000.000	12	130.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ****						8.000.000		8.000.000		15.000.000		25.000.000		25.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan ****	Paket	5	1	8.000.000	3	8.000.000	4	15.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan ****						26.000.000		26.000.000		30.000.000		40.000.000		40.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan ****	Dokumen	3	1	26.000.000	1	26.000.000	2	30.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
									2026		2027		2028		2029				2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Fasilitasi Kunjungan Tamu ****						0		0		35.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu ****	Laporan	1	N/A	0	N/A	0	1	35.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****						135.000.000		135.000.000		150.000.000		170.000.000		170.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****	Laporan	1	1	135.000.000	1	135.000.000	1	150.000.000	1	170.000.000	1	170.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD ****						7.000.000		7.000.000		15.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD ****	Dokumen	1	1	7.000.000	1	7.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD ****						71.000.000		71.000.000		80.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD ****	Dokumen	1	1	71.000.000	1	71.000.000	1	80.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****						33.000.000		33.000.000		52.000.000		2.455.000.000		2.455.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	5	3	33.000.000	3	33.000.000	3	52.000.000	3	2.455.000.000	3	2.455.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
									2026		2027		2028		2029				2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****						0		0		0		2.000.000.000		2.000.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Pengadaan Mebel *****						10.000.000		10.000.000		15.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	5	1	10.000.000	2	10.000.000	3	15.000.000	3	40.000.000	3	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						7.000.000		7.000.000		10.000.000		330.000.000		330.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	7.000.000	1	7.000.000	1	10.000.000	1	330.000.000	1	330.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****						7.000.000		7.000.000		10.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	7.000.000	1	7.000.000	1	10.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						2.000.000		2.000.000		7.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	4	1	2.000.000	2	2.000.000	3	7.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						7.000.000		7.000.000		10.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	7.000.000	1	7.000.000	1	10.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						1.565.000.000		1.543.140.000		1.653.140.000		2.205.000.000		2.205.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	1	1	1.565.000.000	1	1.543.140.000	1	1.653.140.000	1	2.205.000.000	1	2.205.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									2026		2027		2028		2029		2030				
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
					perangkat daerah																
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****						2.000.000		2.000.000		10.000.000		80.000.000		80.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****	Laporan	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	10.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****						310.000.000		310.000.000		350.000.000		600.000.000		600.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan ****	Laporan	1	1	310.000.000	1	310.000.000	1	350.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****						3.000.000		3.000.000		5.000.000		25.000.000		25.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan ****	Laporan	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	5.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ****						1.250.000.000		1.228.140.000		1.288.140.000		1.500.000.000		1.500.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan ****	Laporan	1	1	1.250.000.000	1	1.228.140.000	1	1.288.140.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							350.189.000		349.972.000		395.000.000		1.085.000.000		1.125.575.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	350.189.000	1	349.972.000	1	395.000.000	1	1.085.000.000	1	1.125.575.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ****						148.189.000		147.972.000		150.000.000		300.000.000		305.575.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Unit	23	24	148.189.000	25	147.972.000	25	150.000.000	25	300.000.000	25	305.575.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dibayarkan Fajaknya *****														
				Pemeliharaan Mebel *****						2.000.000		2.000.000		15.000.000		35.000.000		70.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	3	3	2.000.000	3	2.000.000	4	15.000.000	4	35.000.000	4	70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						120.000.000		120.000.000		130.000.000		500.000.000		500.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	2	2	120.000.000	2	120.000.000	2	130.000.000	2	500.000.000	3	500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						80.000.000		80.000.000		100.000.000		250.000.000		250.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	8	3	80.000.000	4	80.000.000	5	100.000.000	6	250.000.000	7	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						0		0		0		0		0		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***								588.200.000		598.000.000		642.000.000		890.000.000		890.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
					Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak ***	%	90	100	588.200.000	100	598.000.000	100	642.000.000	100	890.000.000	100	890.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****							50.000.000		53.000.000		60.000.000		80.000.000		80.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah di UPTD PPA	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun di UPTD PPA ****	Dokumen	N/A	1	50.000.000	1	53.000.000	1	60.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****					50.000.000		53.000.000		60.000.000		80.000.000		80.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	1	1	50.000.000	1	53.000.000	1	60.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****							185.000.000		185.000.000		190.000.000		250.000.000		250.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah di UPTD PPA	Persentase layanan administrasi kepegawaian yang sesuai dengan standar layanan di UPTD PPA ****	%	100	90	185.000.000	90	185.000.000	90	190.000.000	90	250.000.000	90	250.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****					185.000.000		185.000.000		190.000.000		250.000.000		250.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	1	1	185.000.000	1	185.000.000	1	190.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
			Administrasi Umum Perangkat Daerah ****							58.200.000		61.000.000		68.000.000		120.000.000		120.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah di UPTD PPA	Persentase layanan administrasi umum yang sesuai standar layanan di UPTD PPA ****	%	90	90	58.200.000	90	61.000.000	90	68.000.000	90	120.000.000	90	120.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****					2.000.000		3.000.000		5.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan ****	Paket	5	4	2.000.000	5	3.000.000	5	5.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****						32.000.000		33.000.000				50.000.000		50.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan ****	Paket	1	1	32.000.000	1	33.000.000	1	35.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ****						3.500.000		4.000.000				5.000.000		15.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan ****	Paket	1	1	3.500.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****						20.700.000		21.000.000				23.000.000		35.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****	Laporan	1	1	20.700.000	1	21.000.000	1	23.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****						3.000.000		3.000.000				7.000.000		20.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset di UPTD PPA	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan di UPTD PPA ****	Unit	1	3	3.000.000	3	3.000.000	3	7.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
				Pengadaan Mebel ****						3.000.000		3.000.000				7.000.000		20.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan ****	Paket	N/A	1	3.000.000	1	3.000.000	1	7.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							254.000.000		254.000.000		262.000.000		305.000.000		305.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah di UPTD PPA	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun di UPTD PPA ****	Laporan	1	1	254.000.000	1	254.000.000	1	262.000.000	1	305.000.000	1	305.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****						39.000.000		39.000.000		42.000.000		55.000.000		55.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan ****	Laporan	1	1	39.000.000	1	39.000.000	1	42.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	JAWA TENGAH OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ****						215.000.000		215.000.000		220.000.000		250.000.000		250.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan ****	Laporan	1	1	215.000.000	1	215.000.000	1	220.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							38.000.000		42.000.000		55.000.000		115.000.000		115.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah di UPTD PPA	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan di UPTD PPA ****	Unit	1	1	38.000.000	1	42.000.000	1	55.000.000	1	115.000.000	1	115.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****						13.000.000		14.000.000		15.000.000		35.000.000		35.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	13.000.000	1	14.000.000	1	15.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Pemeliharaan Mebel *****						0		0		7.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	1	1	0	1	0	1	7.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						15.000.000		16.000.000		18.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi *****	Unit	1	1	15.000.000	1	16.000.000	1	18.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						10.000.000		12.000.000		15.000.000		35.000.000		35.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi *****	Unit	1	1	10.000.000	1	12.000.000	1	15.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	JAWA TENGAH, OPD Provinsi

Tabel 4. 2
Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil PD	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	Mendorong terciptanya Pengarusutamaan Gender yang berkeadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rakor POKJA PUG OPD Provinsi dan Kab/Kota 2. Workshop PUG OPD Provinsi 3. Penguatan PUG bagi Kabupaten/Kota 4. Sosialisasi Kebijakan dan Pendampingan PUG Sinergitas Pentahelix 5. Penyusunan RAD PUG 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek (390 Orang) 2. Jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan (25 Lembaga) 3. Dokumen RAD PUG (1 dokumen) 	<p>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</p> <p>Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi 2. Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi 	Bidang KGPP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh OPD Provinsi Jawa Tengah 2. OPD Kunci : Bappeda, Inspektorat, Dinas Kominfo, Biro Bangda, Biro Organisasi
2	<p>a. Pembentukan Kecamatan Berdaya (pemberdayaan ekonomi bagi perempuan, disabilitas, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)</p> <p>b. Mendorong Pembentukan Rumah Perlindungan Perempuan, Anak, Disabilitas di setiap Kecamatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) 2. Sosialisasi Kecamatan Berdaya dan RPPA ke 35 Kabupaten/Kota 3. Pembuatan regulasi untuk mendukung terbentuknya RPPA di Kabupaten/Kota yang terintegrasi dengan Kecamatan Berdaya 4. Penguatan kapasitas tenaga pendamping hukum/pelatihan paralegal 5. Pengembangan UMKM Perempuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (80 orang) 2. Jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (15 orang) 3. Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi (1 dokumen) 	<p>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</p> <p>Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <p>Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi</p> <p>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</p> <p>Kegiatan: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <p>Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi</p>	<p>Bidang KGPP</p> <p>Bidang PHPA</p> <p>Bidang Dalduk KS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda 2. Dispermadesdukcapil 3. Dinas Pendidikan 4. Dinas Pemuda dan Olahraga 5. Dinas Pariwisata 6. Dinas Koperasi dan UKM 7. Dinas Perdagangan dan Perindustrian 8. Dinas Sosial 9. Dinas Kesehatan 10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 11. Dinas Perhubungan 12. Biro Kesra 13. BPBD 14. BKKBN Perwakilan Jawa Tengah

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil PD	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
		<p>6. Fasilitasi Pembentukan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kecamatan</p> <p>7. Pembentukan dan Penguatan Forum Anak di Kecamatan</p> <p>8. Pelatihan atau penguatan kader Satyagraha</p> <p>9. Penguatan Forum Genre melalui PIK-Remaja</p> <p>10. Festival Anak</p>	<p>4. Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (2 organisasi)</p> <p>5. Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja (3 daerah)</p>	<p>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi</p> <p>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Sub Kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi</p> <p>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Kegiatan : Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Sub Kegiatan : Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja</p> <p>Kegiatan : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah</p>		

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil PD	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
				Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga		
3	Mendorong Pembentukan Rumah Perlindungan Perempuan, Anak, Disabilitas di setiap Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (145 Orang) 2. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (100 orang) 3. Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (640 orang) 	<p>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2. Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota <p>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 	UPTD PPA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Sosial 2. Rumah Sakit Provinsi Jawa Tengah 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4. Dinas Pendidikan

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil PD	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
			4. Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (640 orang)	2. Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
4	Melahirkan pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, profesionalitas dan kualitas ASN dan perangkat daerah	<ol style="list-style-type: none"> Bimtek Manajemen Risiko Pelayanan Informasi Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (5 dokumen) Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (1 dokumen) 	<p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</p> <p>Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</p>	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> Bappeda Inspektorat Diskominfo Biro Organisasi Biro Administrasi dan Pembangunan Daerah

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah

Tabel 4. 3

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	IKG (Indeks Ketimpangan Gender)	Angka	0,336	0,308	0,306	0,304	0,301	0,3	0,297	0,296	0,296
2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	64,34	-	65	65,35	66,7	66,95	67,2	67,5	67,5
3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	93,31	93,44	93,45	93,47	93,49	93,5	93,52	93,55	93,55
4	IPKK (Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga)	Angka	72,63	74,8	76,1	77,06	77,79	78,37	78,84	79,25	79,25
5	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2,04	2,03	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
6	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	63,07	63,9	64,25	64,5	64,75	65	65,3	65,5	65,5
7	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	83,9	87,51	87,6	87,7	87,8	87,9	88	88,1	88,1
8	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Angka	2,75	2,92	2,93	2,95	2,98	3	3,05	3,08	3,08
9	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	90,25	88,87	88,9	89	89,1	89,3	89,5	89,8	89,8

Tabel 4. 4
Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline Tahun		Target Kinerja Sasaran						Ket
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,336	0,308	0,306	0,304	0,301	0,3	0,297	0,296	0,296
2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	64,34	-	65	65,35	66,7	66,95	67,2	67,5	67,5
3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	93,31	93,44	93,45	93,47	93,49	93,5	93,52	93,55	93,55
4	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Angka	72,63	74,8	76,1	77,06	77,79	78,37	78,84	79,25	79,25
5	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2,04	2,03	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
6	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	63,07	63,9	64,25	64,5	64,75	65	65,3	65,5	65,5
7	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	83,9	87,51	87,6	87,7	87,8	87,9	88	88,1	88,1
8	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Angka	2,75	2,92	2,93	2,95	2,98	3	3,05	3,08	3,08
9	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	90,25	88,87	88,9	89	89,1	89,3	89,5	89,8	89,8
10	Persentase lembaga layanan keluarga yang terlatih	%	-	4,25	14	24	34	44	54	64	64
11	Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan terkait ketahanan keluarga	%	-	10	15	20	25	30	35	40	40
12	Persentase Layanan Keluarga yang meliputi Edukasi, Konsultasi, dan Konseling yang responsif gender dan anak	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	60,76	-	61	61,5	62	62,5	63	63,5	63,5
14	Jumlah kab/kota dengan predikat KLA minimal Madya	Kab/Kota	-	29	29	30	31	32	33	34	34
15	Jumlah lembaga layanan pemenuhan hak anak yang mendapatkan KIE layanan ramah anak	Lembaga	-	35	35	35	35	35	35	35	35
16	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	77,86	-	78,5	79	79,4	79,9	80,5	81	81
17	Persentase kab/kota yang mempunyai rumah perlindungan perempuan dan anak minimal di 1 kecamatan	%	-	-	10	20	40	60	80	100	100
18	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan anak yang telah difasilitasi pengembangannya	Lembaga	-	10	50	50	50	50	50	50	50
19	Persentase Perempuan yang difasilitasi pelatihan menjadi wirausaha	%	-	80	80	80	90	90	90	90	90
20	Persentase perempuan yang mendapat fasilitasi pengembangan kapasitas meningkat pemahamannya	%	-	-	20	40	60	80	100	100	100
21	Persentase Anggaran Responsif Gender di OPD Provinsi	%	-	10,37	11	12	13	14	15	16	16
22	Nilai Evaluasi PUG Provinsi	Nilai	901	901	900	900	900	900	900	900	900
23	Persentase UPTD PPA kab/kota sesuai standart layanan	%	-	14	71	85	95	100	100	100	100
24	Persentase kab/kota yang mempunyai kebijakan rumah perlindungan perempuan dan anak minimal di 1 kecamatan	%	-	-	10	20	40	60	80	100	100

25	Jumlah UPTD PPA yang terbentuk dan difasilitasi pengembangannya	Unit	-	10	15	17	20	30	35	35	35
26	Persentase kab/kota yang memiliki kebijakan terkait ketahanan keluarga	%	-	10	15	20	25	30	35	40	40
27	Persentase kab/kota yang mendapat pendampingan intensif terkait kebijakan pembangunan ketahanan keluarga	%	-	14	16	20	25	30	35	40	40
28	IPKK (Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga)	Angka	0	74,8	76,1	77,06	77,79	78,37	78,84	79,25	79,25
29	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2,04	2,03	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
30	Persentase Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	%	-	65,5	69,47	69,48	69,49	69,5	69,51	69,52	69,52
31	Persentase Pengguna Kontrasepsi MKJP	%	-	27,10	27,50	27,9	28,3	28,7	29	29,3	29,3
32	Unmetneed KB	%	-	9,3	9,5	9,25	9	8,75	8,5	8,4	8,4
33	Persentase Pemda yang mengintegrasikan dokumen GDPK 5 pilar ke dalam dokumen perencanaan daerah	%	-	68	71	75	80	85	90	95	95
34	Jumlah pemerintah daerah yang menyusun GDPK 5 pilar dalam pembangunan	Kab/Kota	-	25	26	28	29	30	32	35	35
35	Jumlah dokumen profil pembangunan kependudukan.	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	1
36	Persentase Kampung KB mandiri dan berkelanjutan	%	-	30,30	32	34	36	38	40	42	42
37	ASFR (Age Specific Fertility Rate) 15 - 19 tahun	Angka	17,3	17,3	17	16	15	14	13	12	12
38	Persentase kelompok UPPKA yang aktif	%	-	92,9	94	95	96	97	98	98,5	98,5
39	Persentase kelompok tribina yang aktif	%	-	92,9	94	95	96	97	98	98,5	98,5
40	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	83,9	87,51	87,6	87,7	87,8	87,9	88	88,1	88,1
41	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Angka	2,75	2,92	2,93	2,95	2,98	3	3,05	3,08	3,08
42	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	%	90	90	90	100	100	100	100	100	100
43	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	%	100	45	50	55	60	62	65	67	67
44	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	40	50	50	55	55	55	55	55
45	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	1	1	1	1	1	1	1	1
47	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	90	90	90	90	90	90	90	90	90
48	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	90	90	90	90	90	90	90	90	90

49	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	2	5	5	3	3	3	3	3	3
50	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Dalam upaya penyesuaian program dan kegiatan terkait urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang tertuang dalam Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK), beberapa intervensi target yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah antara lain Keluarga Berencana Pasca Persalinan (KBPP). KBPP merupakan pelayanan KB yang diberikan setelah persalinan sampai dengan kurun waktu 42 (empat puluh dua) hari. Tujuannya untuk mengatur jarak kelahiran, jarak kehamilan, dan menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga setiap keluarga dapat merencanakan kehamilan yang aman dan sehat. Realisasi Capaian KBPP melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA) Kemendukbangga/BKKBN terhadap jumlah ibu bersalin pada semester 1 tahun 2025 sebesar 77,61% atau sebanyak 109.359 dari 140.910 ibu bersalin telah menggunakan KB Pasca Persalinan.

Indikator lain yang harus diintervensi yaitu Kehamilan yang tidak direncanakan (KTD). KTD menghitung jumlah ibu yang tidak ingin anak lagi maupun yang ingin hamil nanti/kemudian dibagi dengan jumlah ibu hamil saat pendataan. Realisasi KTD di Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 yaitu sebesar 12,7%. Kehamilan yang tidak direncanakan dapat memiliki dampak meningkatnya *TFR* secara signifikan apabila tidak segera diintervensi. Beberapa langkah strategis yang bisa diambil meliputi : edukasi seksual dan reproduksi yang kuat bagi PUS, meningkatkan akses dan kualitas metode kontrasepsi, meningkatkan kesadaran akan dampak menikah muda terhadap kesehatan reproduksi serta konseling layanan kesehatan reproduksi.

Indikator Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) adalah indeks komposit yang merepresentasikan dimensi PBK sebagai alat ukur dalam memahami kondisi PBK. Terdapat 5 (lima) dimensi pembentuk IPBK, yaitu 1) Dimensi Partisipasi. 2) Dimensi Keberlanjutan; 3) Dimensi Inklusivitas, 4) Dimensi Holistik Integratif dan 5) Dimensi Kesetaraan. Capaian IPBK Nasional tahun 2024 sebesar 61,8 sedangkan capaian Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 sudah diatas capaian nasional sebesar 63,4.

Remaja merupakan bagian terbesar dari struktur penduduk Indonesia. Saat ini, Indonesia sedang berada pada fase bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) sangat dominan. Remaja menjadi pintu masuk menuju kualitas sumber daya manusia (SDM) unggul di masa depan. Remaja yang sehat, bebas dari kekerasan, serta memiliki pemahaman tentang kesetaraan gender, akan melahirkan generasi penerus yang lebih baik. Indeks Pengasuhan Remaja tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah sebesar 86,5 sedangkan angka nasional sebesar 84,7. Hal tersebut menunjukkan Indeks Pengasuhan Remaja Provinsi lebih tinggi daripada nasional.

Tabel 4. 5
Target Penyelarasan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Tahun 2025 – 2029

Indikator	Baseline 2024	Target				
		2026	2027	2028	2029	2030
Keluarga Berencana Pasca Persalinan (KBPP)	77,61% (TW II 2025)	77,9%	78%	78,5%	79%	79,5%
Persentase Kehamilan Yang Tidak Direncanakan (KTD)	14,7%	12,10%	11,82%	11,55%	11,29%	11,04%
Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	63,4	63,95	64,23	64,50	64,77	65,04
Indeks Pengasuhan Remaja	86,49	88,28	89,08	89,83	90,53	91,18

Sumber : BKKBN

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Penduduk, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 merupakan perencanaan pembangunan bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana jangka menengah periode 5 (lima) tahunan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian serius dalam pelaksanaannya dan apabila ketersediaan anggaran (APBD dan APBN) tidak sesuai dengan kebutuhan antara lain: 1) memprioritaskan pencapaian seluruh indikator kinerja utama (IKU) Renstra dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah RPJMD; 2) mengupayakan potensi yang dimiliki baik SDM maupun sarana prasarana guna sebesar-besarnya mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Renstra dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah RPJMD; 3) mengupayakan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit kerja internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga hasilnya akan lebih efektif dan optimal.

5.2 Kaidan Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut:

- a. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya;
- b. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah;
- c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
- d. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Tindak lanjut disusunnya Perubahan Renstra perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

- a. Mendorong Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui Kecamatan Berdaya;
- b. Mendorong Pembentukan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) pada Kecamatan Berdaya;
- c. Melakukan upaya yang signifikan terhadap peningkatan peran perempuan utamanya dalam bidang ekonomi dan politik serta peningkatan pelebagaan PUG pada lembaga pemerintah;
- d. Advokasi pemenuhan hak anak di Kabupaten/Kota dan peningkatan pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan dunia usaha;
- e. Melakukan upaya pencegahan dan pengurangan risiko kelompok rentan perempuan dan anak secara berkelanjutan dari Provinsi sampai ke tingkat Desa dengan melibatkan mitra kerja dan organisasi masyarakat serta kabupaten/kota;
- f. Melakukan upaya peningkatan kualitas layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak bersama jejaring mitra kerja dan Kabupaten/Kota termasuk pada Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA);
- g. Melakukan upaya yang signifikan guna meningkatkan kesertaan keluarga berencana melalui optimalisasi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), dukungan layanan KB, penggerakan dan peningkatan peran serta mitra kerja, organisasi masyarakat dan dunia usaha, serta efektivitas Kampung KB;
- h. Perlunya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga . melalui peningkatan keterlibatan keluarga dan peran aktif kelompok Tribina serta pemberdayaan UPPKA secara efektif dan berkelanjutan;
- i. Mengembangkan teknologi informasi yang mendukung kinerja PPPA dan Dalduk KB secara berkelanjutan dan terintegrasi.

**TABEL I
IDENTIFIKASI RISIKO**

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Indikator Tujuan							
1.	Sasaran Strategis	Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Adanya Subordinasi dan ketimpangan gender terhadap perempuan	Risiko Strategis	Pemahaman masyarakat dan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan gender masih parsial	Terjadinya ketidakadilan gender dan kekerasan terhadap perempuan. Pihak terdampak adalah keluarga	Perempuan
2.	Sasaran Strategis	Meningkatkan keluarga berkualitas	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Ketahanan dan kesejahteraan keluarga menurun	Risiko Strategis	Ekonomi keluarga yang rendah menjadikan keluarga tersebut rentan perceraian, kekerasan dan permasalahan keluarga	Menghambat kemajuan dan peningkatan kualitas keluarga. Pihak yang terkena Keluarga	Keluarga
	Indikator Sasaran							
1.1	Sasaran Strategis	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Perempuan tidak meningkat kesejahteraannya	Risiko Strategis	Kapasitas dan ketrampilan perempuan masih rendah	Perempuan belum banyak memberikan berkontribusi dalam peningkatan ekonomi keluarga. Pihak Yang terkena Perempuan	Perempuan
1.2	Sasaran Strategis	Meningkatnya perlindungan terhadap anak	Indeks Perlindungan Anak	Kekerasan Anak masih terjadi di dalam keluarga dan masyarakat	Risiko Strategis	Regulasi Pencegahan kekerasan terhadap anak yang sudah ada tetapi belum	Meningkatnya angka kasus kekerasan terhadap anak Pihak yang terkena anak	Anak

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						terimplementasikan optimal oleh stakeholder terkait		
2.1	Sasaran Strategis	Terkendalinya jumlah penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	Peningkatan jumlah kelahiran PUS yang signifikan	Risiko Strategis	Kurangnya sosialisasi dan KIE kepada masyarakat tentang pentingnya membatasi kelahiran dan mengatur jarak kelahiran	Menurunnya kesejahteraan keluarga dan kelompok masyarakat rentan miskin bertambah. Pihak yang terkena masyarakat dan keluarga	Masyarakat
2.2	Sasaran Strategis	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Meningkatnya angka kasus Perkawinan Anak	Risiko Strategis	Faktor Ekonomi Keluarga yang tidak mampu membiayai anak ke pendidikan yang lebih tinggi, sehingga menikahkan anak pada usia muda menjadi salah satu jalan untuk mengurangi tanggungan keluarga	Meningkatnya kasus kekerasan dalam keluarga dan angka perceraian, karena belum stabilnya mental anak untuk berkeluarga	Anak, Keluarga
3.1	Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian	Indeks Manajemen Risiko	Pegawai Pejabat Pengadaan Barang Jasa menerima gratifikasi dari masyarakat/Mitra/Penyedia	Risiko Fraud	Kurangnya pengawasan dan evaluasi OPD	Gratifikasi dapat merusak integritas pegawai dan lembaga, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.	DP3AP2KB

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penduduk Dan Keluarga Berencana						
3.2	Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Indeks Kepuasan Masyarakat	Capaian kinerja tingkat pelayanan umum kepegawaian dan keuangan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan	Risiko Operasional	Belum semua penyelenggara layanan mengimplementasikan standar layanan yang telah ditetapkan	Persentase tingkat kepuasan pengguna layanan menurun	DP3AP2KB

Tabel 2
Analisis Risiko

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Indikator Tujuan									
Adanya Subordinasi dan ketimpangan gender terhadap perempuan	4	4	16	Ada	<ul style="list-style-type: none"> - Ditetapkannya Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender - Ditetapkannya Pergub Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender - Ditetapkannya Pokja PUG dalam Pengarusutamaan Gender di Jawa Tengah - Penyusunan RAD PUG - Memberikan pelatihan terkait penyusunan PPRG bagi perencana di setiap OPD 	Belum Memadai	4	3	12
Ketahanan dan kesejahteraan keluarga menurun	3	4	12	Ada	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga - Sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan 	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan KIE Pencegahan KTP, KTA, TPPO, ABH dan Perkawinan Anak - Advokasi Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kab/Kota - Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor dalam Rangka Pencegahan KtP dan TPPO 				
Indikator Sasaran									
Perempuan tidak meningkat kesejahteraannya	3	4	12	Ada	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan Pelatihan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP) - Sosialisasi Implementasi Serat Kartini - Sosialisasi Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Berbagai Bidang Pembangunan 	Memadai	2	3	6
Kekerasan Anak masih terjadi di dalam keluarga dan masyarakat	4	4	16	Ada	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak 	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan FGD Penyusunan Kebijakan Perlindungan Anak - Pelatihan Kader PATBM 				
Peningkatan jumlah kelahiran PUS yang signifikan	3	3	9	Ada	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi dan KIE terkait manfaat KB bagi masyarakat - Kespro bagi remaja dan catin - Optimalisasi RPPA di Kecamatan Berdaya 	Memadai	2	2	4
Meningkatnya angka kasus Perkawinan Anak	2	4	8	Ada	<ul style="list-style-type: none"> - Kampanye Jo Kawin Bocah - Advokasi Pendidikan Kependudukan dalam Rangka Gerakan Jo Kawin Bocah serta Cegah AKI dan Stunting - Sosialisasi Gerakan Jo Kawin Bocah dalam rangka Penurunan Angka Stunting dan AKI pada Kelompok PIK Remaja di Kampung KB - Optimalisasi Peningkatan Kampung Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan dan Peduli Anak 	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pegawai Pejabat Pengadaan Barang Jasa menerima gratifikasi dari masyarakat/Mitra/Penyedia	3	4	12	Ada	- Sosialisasi Anti Korupsi dan Gratifikasi di tingkat OPD - Pengawasan proses pengadaan barang/jasa	Memadai	2	2	4
Capaian kinerja tingkat pelayanan umum kepegawaian dan keuangan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan	2	2	4	Ada	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - Pelayanan Informasi	Memadai	1	2	2

Tabel 3
Risiko Prioritas

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
Adanya Subordinasi dan ketimpangan gender terhadap perempuan	16	Kepala Dinas	Pemahaman masyarakat dan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan gender masih parsial	Terjadinya ketidakadilan gender dan kekerasan terhadap perempuan. Pihak terdampak adalah keluarga
Ketahanan dan kesejahteraan keluarga menurun	12	Kepala Dinas	Ekonomi keluarga yang rendah menjadikan keluarga tersebut rentan perceraian, kekerasan dan permasalahan keluarga	Menghambat kemajuan dan peningkatan kualitas keluarga. Pihak yang terkena Keluarga
Perempuan tidak meningkat kesejahteraannya	12	Kepala Dinas	Kapasitas dan ketrampilan perempuan masih rendah	Perempuan belum banyak memberikan berkontribusi dalam peningkatan ekonomi keluarga. Pihak Yang terkena Perempuan
Kekerasan Anak masih terjadi di dalam keluarga dan masyarakat	16	Kepala Dinas	Regulasi Pencegahan kekerasan terhadap anak yang sudah ada belum terimplementasikan optimal oleh stakeholder terkait	Meningkatnya angka kasus kekerasan terhadap anak
Pegawai Pejabat Pengadaan Barang Jasa menerima gratifikasi dari masyarakat/Mitra/Penyedia	12	Sekretaris	Kurangnya pengawasan dan evaluasi OPD	Gratifikasi dapat merusak integritas pegawai dan lembaga, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.

Tabel 4
Rencana Tindak Pengendalian

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan/Sasaran								
Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Adanya Subordinasi dan ketimpangan gender terhadap perempuan	16	Pemahaman masyarakat dan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan gender masih parsial	Terjadinya ketidakadilan gender dan kekerasan terhadap perempuan. Pihak terdampak adalah keluarga	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi Perda PUG secara komprehensif di berbagai sektor - Advokasi kepada Kab/Kota untuk Menyusun regulasi terkait Pengarusutamaan Gender - Sosialisasi Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Berbagai Bidang Pembangunan 	Kepala Dinas	Semester 2 Tahun 2025
Meningkatkan keluarga berkualitas	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Ketahanan dan kesejahteraan keluarga menurun	12	Ekonomi keluarga yang rendah menjadikan keluarga tersebut rentan perceraian, kekerasan dan permasalahan keluarga	Menghambat kemajuan dan peningkatan kualitas keluarga. Pihak yang terkena Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan Layanan Edukasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan 	Kepala Dinas	Semester 1 Tahun 2025

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						<ul style="list-style-type: none"> Penjangkauan Penguatan Keluarga - Pelaksanaan Layanan Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) - Sosialisasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga Melalui Kegiatan di Kampung Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan dan Peduli Anak - Optimalisasi Peningkatan Kampung Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan dan Peduli Anak 		

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Perempuan tidak meningkat kesejahteraannya	12	Kapasitas dan ketrampilan perempuan masih rendah	Perempuan belum banyak memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi keluarga. Pihak Yang terkena Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berspektif gender - Optimalisasi Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak - Sinergi antar OPD dalam Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi dalam pelatihan, produksi termasuk kemudahan akses modal 	Kepala Dinas	Semester 2 Tahun 2025
Meningkatnya perlindungan terhadap anak	Indeks Perlindungan Anak	Kekerasan Anak masih terjadi di dalam keluarga dan masyarakat	16	Regulasi Pencegahan kekerasan terhadap anak yang sudah ada tetapi belum terimplementasikan optimal oleh stakeholder terkait	Meningkatnya angka kasus kekerasan terhadap anak. Pihak yang terkena Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi Regulasi Pencegahan Anak secara komprehensif - Advokasi Penyusunan Regulasi Pencegahan dan 	Kepala Dinas	Semester 2 Tahun 2025

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Indeks Manajemen Risiko	Pegawai Pejabat Pengadaan Barang Jasa menerima gratifikasi dari masyarakat/Mitra/Penyedia	12	Kurangnya pengawasan dan evaluasi OPD	Gratifikasi dapat merusak integritas pegawai dan lembaga, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Kekerasan terhadap Anak di Kab/kota - Kolaborasi yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, Lembaga Pendidikan dan keluarga dalam upaya mendukung lingkungan yang kondusif - Sosialisasi Anti Korupsi dan Gratifikasi di tingkat OPD - Pengawasan proses pengadaan barang/jasa 	Sekretaris	Semester 2 Tahun 2025

**TABEL I
IDENTIFIKASI RISIKO**

No	Jenis Konteks Risiko	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indikator Program								
1	Sasaran Program	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender di OPD Provinsi	Hasil Rekomendasi Pengawasan APIP belum signifikan memperbaiki kinerja PUG di OPD	Risiko Strategis	Kurang optimalnya kinerja APIP dalam melakukan pengawasan PUG di OPD	Pembangunan Daerah belum berorientasi pada isu gender	Pemerintah Daerah, Masyarakat
			Persentase Perempuan yang difasilitasi pelatihan menjadi wirausaha	Pemkab dan Pemdes belum memfasilitasi dalam pengembangan usaha yang dilakukan oleh perempuan (misal pemasaran dan perijinan)	Resiko Strategis	Kurangnya komitmen Pemkab dan Pemdes	Perempuan yang difasilitasi pelatihan tidak menjadi wirausaha	Perempuan dan Keluarga
2	Sasaran Program	Program Perlindungan Perempuan	Persentase UPTD PPA kab/kota sesuai standart layanan	Masih ada Pemerintah Kab/kota yang kurang berkomitmen dalam membentuk UPTD	Risiko Operasional 1	Belum semua isu terkait perlindungan perempuan menjadi prioritas di Kab/kota	Belum semua Kab/kota memiliki UPTD PPA	
3	Sasaran Program	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase kab/kota yang memiliki kebijakan terkait ketahanan keluarga	Kabupaten/Kota tidak memiliki Kebijakan terkait Ketahanan Keluarga	Resiko Operasional 1	Kurangnya komitmen terkait pentingnya Kebijakan Ketahanan Keluarga di Kabupaten/Kota	Kurangnya program/kegiatan yang memfokuskan pada Ketahanan Keluarga	Keluarga dan masyarakat
4	Sasaran Program	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak	Belum terdapat reaksi pemenuhan hak anak di Kab/kota	Risiko Kemitraan	Belum ada mekanisme evaluasi terhadap	IPHA tidak mencapai target	

No	Jenis Konteks Risiko	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						kinerja Gugus Tugas KLA		
5	Sasaran Program	Program Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Meningkatnya jumlah anak korban kekerasan	Risiko Strategis	Kurangnya komitmen dari pemangku kebijakan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak	Tidak terpenuhinya hak anak atas perlindungan	Anak korban kekerasan
6	Sasaran Program	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Pemda yang mengintegrasikan dokumen GDPK 5 pilar ke dalam dokumen perencanaan daerah	Komitmen Tim Penyusun GDPK Kab/kota masih rendah	Risiko Strategis	Kurangnya pemahaman Tim Penyusunan GDPK Kab/Kota dalam menyusun dokumen GDPK	GDPK belum terintegrasi dalam Dokumen Perencanaan daerah	Pemerintah Daerah
7	Sasaran Program	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan	Kurangnya komitmen Pemerintah Desa dalam meningkatkan peran kelompok kegiatan Kampung KB	Risiko Operasional	Kurangnya komitmen pemerintah desa dan pemahaman masyarakat terkait implementasi kampung kb yang mandiri dan berkelanjutan	Kampung KB belum mampu mendorong peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Desa/ Kelurahan, OPD KB Kab/Kota dan Prov
8	Sasaran Program	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Persentase Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	Kehamilan yang tidak diinginkan meningkat yang berisiko stunting	Risiko Operasional	Kurangnya Advokasi sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan KB Modern	Menurunnya Kualitas hidup ibu dan anak	Peserta KB, Pasangan Usia Subur
9	Sasaran Program	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak oleh Kabupaten/Kota	Kurangnya pemahaman petugas data Kab/Kota dalam mengisi ketersediaan data gender dan anak	Risiko Operasional	Narasumber dalam penyampaian materi kurang dapat dipahami oleh peserta	Peserta dalam proses menginput tidak sesuai dengan ketentuan	Petugas data Kab/Kota

No	Jenis Konteks Risiko	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			pada aplikasi sistem informasi gender dan anak Jawa Tengah (SIGA JATENG)					
10	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	Pelaksanaan tingkat ketercapaian kinerja kurang dari target	Risiko Operasiona 1	Target Indikator yang Terlalu Tinggi	Capaian Kinerja OPD tidak memuaskan	OPD PPA DalduKB
			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Masyarakat Tidak puas terhadap pelayanan OPD	Risiko Operasiona 1	Belum semua penyelenggara layanan mengimplementasikan standar layanan yang telah ditetapkan	Persentase tingkat kepuasan pengguna layanan menurun	OPD PPA DalduKB
Indikator Kegiatan								
1	Sasaran Kegiatan	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Nilai Evaluasi PUG Provinsi	Komitmen yang kurang dalam mengidentifikasi ARG	Risiko Operasiona 1	Pergantian personil yang menangani ARG sering terjadi	Nilai Evaluasi PUG tidak mencapai target	OPD Provinsi, Kabupaten dan Kota
2	Sasaran Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Persentase perempuan yang mendapat fasilitasi pengembangan kapasitas meningkat pemahamannya	Peserta tidak memahami Materi yang disampaikan	Risiko Operasiona 1	Metode penyampaian materi kurang tepat	Peserta tidak meningkat pemahamannya	Perempuan
3	Sasaran Kegiatan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang mempunyai rumah perlindungan perempuan	Belum semua Kab/kota mempunyai kemampuan untuk menyediakan rumah perlindungan di setiap kecamatan	Risiko Kemitraan	Kebijakan masih baru sehingga belum ada kesiapan sumber daya di kecamatan	Kecamatan belum mempunyai Rumah Perlindungan Perempuan	

No	Jenis Konteks Risiko	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Sasaran Kegiatan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga penyedia layanan yang terstandarisasi	Masih ada lembaga penyedia layanan yang belum menerapkan mekanisme layanan dan perlindungan perempuan sesuai standar	Risiko Operasional	kurangnya sinergitas dan pengawasan antar lembaga penyedia layanan (pemerintah/non pemerintah) terkait upaya perlindungan perempuan	Korban kekerasan tidak terpenuhi hak-haknya	Korban Kekerasan Perempuan
5	Sasaran Kegiatan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan	Data asesmen kasus rujukan kekerasan terhadap perempuan tidak lengkap	Risiko Operasional	'- Perempuan korban kekerasan belum percaya sepenuhnya ke pendamping '- Pendamping di Kab/Kota dalam melakukan asesmen belum lengkap tapi sudah langsung merujuk kasus ke Provinsi	Layanan yang diberikan tidak optimal	Perempuan korban kekerasan
6	Sasaran Kegiatan	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Persentase kab/kota yang mendapat pendampingan intensif terkait kebijakan pembangunan ketahanan keluarga	- Penyusunan kebijakan pembangunan ketahanan keluarga di Kab/kota berjalan lambat dan kurang optimal sehingga program-program pembangunan kualitas keluarga di kab/kota kurang mendapatkan prioritas dukungan	Risiko Operasional	- Pengambil kebijakan di masing-masing kab/kota belum memiliki perspektif yang sama tentang pentingnya menyusun kebijakan terkait pembangunan	kualitas keluarga di kab/kota kurang tercapai berdasarkan Indeks Kualitas Keluarga	Keluarga

No	Jenis Konteks Risiko	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- Pelaksanaan program-program terkait keluarga masih berjalan secara sektoral di masing-masing perangkat daerah dan elemen masyarakat sehingga capaian pembangunan kualitas keluarga kurang komprehensif		ketahanan keluarga di daerahnya masing-masing. - koordinasi antar perangkat daerah dan lembaga masyarakat kurang efektif dan kolaborasi yang kurang solid dalam pelaksanaan program-program pembangunan keluarga		
			Persentase Layanan Keluarga yang meliputi Edukasi, Konsultasi, dan Konseling yang responsif gender dan anak	- Terdapat layanan keluarga yang meliputi edukasi, konsultasi dan konseling tidak terselenggara sesuai standar di kab/kota	Risiko Operasioal	- Dukungan kebijakan pimpinan daerah yang kurang memprioritaskan ketersediaan Layanan Keluarga sebagai bagian dari program pembangunan kualitas keluarga di kab/kota - keterbatasan kemampuan kab/kota dalam menyediakan sumber daya yang mendukung	Layanan keluarga yang meliputi edukasi, konsultasi dan konseling yang responsif gender dan anak tidak tersedia secara merata di seluruh kab/kota di Jawa Tengah	Keluarga

No	Jenis Konteks Risiko	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						terselenggaranya layanan keluarga		
7	Sasaran Kegiatan	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota dengan predikat KLA minimal Madya	Pemahaman Gugus Tugas KLA terhadap indikator penilaian kurang optimal	Risiko Strategis	Kurangnya komitmen Gugus Tugas KLA	Masih terdapat kab/kota yang tidak mendapat KLA minimal Madya	OPD PPA Kab/Kota
8	Sasaran Kegiatan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga layanan pemenuhan hak anak yang mendapatkan KIE layanan ramah anak	Lembaga masyarakat dan Dunia Usaha belum sepenuhnya bersinergi dalam peningkatan kualitas hidup anak	Risiko Operasiona 1	kurangnya Kerjasama antara pemerintah daerah dengan Lembaga masyarakat dan dunia usaha	Lembaga masyarakat dan dunia usaha kurang berperan dalam peningkatan kualitas hidup anak	Anak
9	Sasaran Kegiatan	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang mempunyai rumah perlindungan anak	belum semua kecamatan di kabupaten/kota yang mendukung terbentuknya rumah perlindungan anak	Risiko operasional	Rumah perlindungan anak merupakan kebijakan/program baru sehingga belum ada kesiapan dan kemampuan dalam penyediaan sumber daya di tiap kecamatan	implementasi pencegahan kekerasan terhadap anak di kecamatan kurang optimal	Anak
10	Sasaran Kegiatan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan anak yang telah difasilitasi pengembangannya	AMPK tidak mendapatkan layanan secara terpadu	Risiko Operasiona 1	Kurangnya koordinasi antar penyedia layanan Kurangnya kompetensi SDM Penyedia Layanan dalam memberikan pelayanan yang terpadu	AMPK tidak mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhannya	AMPK

No	Jenis Konteks Risiko	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Sasaran Kegiatan	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan	Data asesmen kasus rujukan kekerasan terhadap anak tidak lengkap	Risiko Operasional	'- Anak korban kekerasan belum percaya sepenuhnya ke pendamping '- Pendamping di Kab/Kota dalam melakukan asesmen belum lengkap tapi sudah langsung merujuk kasus ke Provinsi '- Terlapor kasus hak asuh anak kurang proaktif dalam bekerja sama untuk menyelesaikan masalah	Layanan yang diberikan tidak optimal	Anak korban kekerasan
12	Sasaran Kegiatan	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah pemerintah daerah yang memanfaatkan GDPK 5 Bidang dalam pembangunan	Pembangunan 5 pilar kependudukan belum dilaksanakan oleh semua pemerintah daerah	Risiko Operasional	Kurangnya pemahaman pemerintah daerah terhadap dokumen GDPK	timbulnya permasalahan kependudukan di daerah	OPD Provinsi/Kab/Kota
13	Sasaran Kegiatan	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen profil pembangunan kependudukan.	belum tersedianya data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen	Risiko Operasional	Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar pihak	kurang optimalnya kualitas dan efektivitas dokumen yang dihasilkan	OPD Provinsi
14	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan	ASFR (Age Specific Fertility Rate) 15 - 19 tahun	Cakupan kegiatan pemberdayaan belum menjangkau keseluruhan kelompok PIK Remaja	Risiko Operasional	kurangnya kesadaran orangtua, budaya masyarakat yang	Peningkatan angka prevalensi stunting , AKI dan AKB	Anak

No	Jenis Konteks Risiko	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				masih mendukung pernikahan usia muda kurangnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi Pengawasan/kontrol orangtua atau keluarga terhadap pergaulan anak keterbatasan anggaran	rendahnya pemahaman remaja mengenai risiko kehamilan di usia anak	
15	Sasaran Kegiatan	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok UPPKA yang aktif	Tidak ada pendampingan bagi kelompok UPPKA sehingga kelompok menjadi vacum atau tidak aktif	Risiko Operasional	Kurangnya komitmen dari OPD KB atau OPD terkait dalam pendampingan kelompok	Kelompok UPPKA menjadi vacum atau tidak aktif	Kelompok UPPKA
			Persentase kelompok tribina yang aktif	Belum meratanya pengetahuan kader dalam pendampingan keluarga balita, remaja dan lansia Tidak tersampainya materi kepada anggota kelompok atau sasaran keluarga balita, remaja dan lansia	Risiko Operasional	Belum semua kader mengikuti pelatihan pendampingan keluarga balita, remaja dan lansia Ketidakaktifan anggota kelompok Tribina dan	kapasitas kader dalam pendampingan keluarga balita, remaja dan lansia masih rendah keluarga balita, remaja dan lansia tidak materi tentang pendampingan	Kelompok, anggota dan sasaran Tribina

No	Jenis Konteks Risiko	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						sasaran keluarga balita, remaja dan lansia tidak masuk dalam keanggotaan kelompok	keluarga balita, remaja dan lansia	
16	Sasaran Kegiatan	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pengguna Kontrasepsi MKJP	Kurangnya minat masyarakat dalam menggunakan kontrasepsi MKJP sehingga meningkatnya drop out KB	Risiko Operasional 1	Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait KB MKJP	Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk	PUS
17	Sasaran Kegiatan	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB	Unmetneed KB	Kehamilan yang tidak diinginkan	Risiko operasional	Norma sosial dan budaya , seperti tekanan dari pasangan atau keluarga untuk tidak menggunakan kontrasepsi. Kurangnya akses terhadap layanan kontrasepsi , baik karena lokasi geografis, biaya.	Beban sosial dan ekonomi keluarga karena kehamilan yang tidak direncanakan	PUS
18	Sasaran Kegiatan	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pendataan aplikasi SIGA	Petugas Input Data aplikasi SIGA pada kab/kota tidak optimal	Risiko Operasional 1	Belum semua petugas data mempunyai pemahaman yang benar terkait proses penginputan	Data pada Aplikasi SIGA tidak update dan validitasnya kurang	Petugas Data, Pengguna data

No	Jenis Konteks Risiko	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						data pada aplikasi SIGA		
19	Sasaran Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Manipulasi bukti pembayaran, kuitansi, atau dokumen pendukung.	Risiko Fraud	Dorongan mencari keuntungan pribadi/kelompok (gratifikasi atau penggelapan)	Pegawai atau pihak terkait bisa dikenai tuntutan pidana korupsi, sanksi administratif, maupun pengembalian kerugian negara.	DP3AP2KB

Tabel 2
Analisis Risiko

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Indikator Program									
Hasil Rekomendasi Pengawasan APIP belum signifikan memperbaiki kinerja PUG di OPD	3	4	12	Ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rakor Pokja PUG Kabupaten/Kota/Provinsi 2. Workshop PUG OPD Provinsi 3. Konsultasi PUG 4. Penguatan PUG bagi Kabupaten/Kota 5. Sosialisasi Kebijakan dan Pendampingan PUG Sinergitas Pentahelix 	Memadai	2	3	6
Pemkab dan Pemdes belum memfasilitasi dalam pengembangan usaha yang dilakukan oleh perempuan (misal pemasaran dan perijinan)	4	3	12	Ada	Pelatihan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP) dengan 5 tahap	Memadai	3	2	6
Masih ada Pemerintah Kab/kota yang kurang berkomitmen dalam membentuk UPTD	2	4	8	Ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Workshop penguatan kelembagaan penyedia layanan di Kab/Kota 2. Kegiatan Rapat Pertemuan penguatan kelembagaan bersama lembaga penyedia layanan 	Memadai	-	-	-
Kabupaten/Kota tidak memiliki Kebijakan terkait Ketahanan Keluarga	3	3	9	Tidak					

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Belum terdapat renaksi pemenuhan hak anak di Kab/kota	4	3	12	Ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak 2. Koordinasi Implementasi Pemenuhan Hak Anak 3. Fasilitasi dan Koordinasi Keterlibatan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak Jawa Tengah 	Memadai	2	3	6
Meningkatnya jumlah anak korban kekerasan	3	4	12	ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan FGD Penyusunan Kebijakan Perlindungan Anak 2. Rakor Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak 3. Workshop Pencegahan dan Penanganan Anak yang memerlukan perlindungan khusus 	Memadai	3	3	9
Komitmen Tim Penyusun GDPK Kab/kota masih rendah	2	4	8	Ada	Advokasi Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar	Memadai	2	3	6
Kurangnya komitmen Pemerintah Desa dalam meningkatkan peran kelompok kegiatan Kampung KB	2	4	8	Ada	Advokasi Pengelolaan Rumah Data Kependudukan di Kampung Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan dan Peduli Anak	Memadai	2	3	6
Kehamilan yang tidak diinginkan meningkat yang berisiko stunting	3	4	12	Ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Peningkatan Pelayanan KB MKJP 2. Percepatan Penurunan Stunting 3. Pengembangan Konten Media KIE 	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kurangnya pemahaman petugas data Kab/Kota dalam mengisi ketersediaan data gender dan anak	3	3	9	Ada	Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Data Gender dan Anak	Memadai	-	-	-
Pelaksanaan tingkat ketercapaian kinerja kurang dari target	3	3	9	Ada	1. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan 2. Konsultasi keterpaduan pusat dan daerah 3. Rapat Koordinasi Urusan PPPA dan Dalduk KB	Memadai	3	2	6
Masyarakat Tidak puas terhadap pelayanan OPD	2	2	4	Ada	1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Pelayanan Informasi 3. SOP Pelayanan Bantuan Korban Kekerasan	Memadai	2	2	4
Indikator Kegiatan									
Komitmen yang kurang dalam mengidentifikasi ARG	4	4	16	Ada	1. Rakor POKJA PUG OPD Provinsi 2. Workshop PUG OPD Provinsi 3. Konsultasi PUG 4. Sosialisasi Kebijakan dan Pendampingan PUG Sinergitas Pentahelix	Belum Memadai	4	3	12
Peserta tidak memahami Materi yang disampaikan	4	3	12	Ada	1. Pelatihan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP) 2. Workshop Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Perempuan Jawa Tengah 3. Pengembangan UMKM Perempuan Berdaya Melalui Program Inkubasi	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					4. Sosialisasi Implementasi Serat Kartini				
Belum semua Kab/kota mempunyai kemampuan untuk menyediakan rumah perlindungan di setiap kecamatan	4	4	16	Ada	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor dalam Rangka Pencegahan KtP dan TPPO 2. Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan KtP dan TPPO 3. Kegiatan Workshop penguatan kelembagaan penyedia layanan di Kab/Kota 4. Kegiatan Rapat Pertemuan penguatan kelembagaan bersama lembaga penyedia layanan 5. TOT Fasilitator Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten/Kota 6. Fasilitasi Pembentukan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kecamatan 	Belum Memadai	4	3	12
Masih ada lembaga penyedia layanan yang belum menerapkan mekanisme layanan dan perlindungan perempuan sesuai standar	3	3	9	Ada	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Workshop penguatan kelembagaan penyedia layanan di Kab/Kota 2. Kegiatan Rapat Pertemuan penguatan kelembagaan bersama lembaga penyedia layanan 	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Data asesmen kasus rujukan kekerasan terhadap perempuan tidak lengkap	2	3	6	Ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2. Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 3. Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Provinsi 4. layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Provinsilayanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Provinsi 5. layanan kesehatan yang tidak dijaminBPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah 	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Provinsi dan Lintas Daerah Provinsi 6. layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Provinsi				
Penyusunan kebijakan pembangunan ketahanan keluarga di Kab/kota berjalan lambat dan kurang optimal sehingga program-program pembangunan kualitas keluarga di kab/kota kurang mendapatkan prioritas dukungan	3	3	9	Ada	1. edukasi dan sosialisasi peningkatan ketahanan keluarga di kab/kota 2. pendampingan implementasi kebijakan ketahanan keluarga di kab/kota	Memadai	3	2	6
Terdapat layanan keluarga yang meliputi edukasi, konsultasi dan konseling tidak terselenggara sesuai standar di kab/kota	3	3	9	Ada	1. edukasi dan sosialisasi peningkatan ketahanan keluarga di kab/kota 2. pendampingan implementasi kebijakan ketahanan keluarga di kab/kota	Memadai	2	2	4
Pemahaman Gugus Tugas KLA terhadap indikator penilaian kurang optimal	2	4	8	Ada	1. Bersurat kepada kepala daerah kab/kota terkait penilaian KLA 2. Koordinasi dan Pemantauan Capaian Pengembangan KLA 3. Pelaksanaan Evaluasi dan Verifikasi KLA tingkat Provinsi	Memadai	2	3	6
Lembaga masyarakat dan Dunia Usaha belum sepenuhnya	4	2	8	Ada	Fasilitasi dan Koordinasi Keterlibatan Dunia Usaha dalam	Memadai	3	2	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bersinergi dalam peningkatan kualitas hidup anak					Pemenuhan Hak Anak Jawa Tengah				
belum semua kecamatan di kabupaten/kota yang mendukung terbentuknya rumah perlindungan anak	3	3	9	Ada	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Bagi AMPK	Memadai	2	3	6
AMPK tidak mendapatkan layanan secara terpadu	2	3	6	Ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Penyediaan Bantuan Kebutuhan Khusus bagi AMPK 2. FGD penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan AMPK 3. Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Bagi AMPK 	Memadai	2	2	4
Data asesmen kasus rujukan kekerasan terhadap anak tidak lengkap	2	3	6	Ada	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Memadai	2	2	4
Pembangunan 5 pilar kependudukan belum dilaksanakan oleh semua pemerintah daerah	2	4	8	Ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lomba Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas 2. Advokasi Pengembangan dan Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan dan Peduli Anak 3. Advokasi Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar 	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					4. Advokasi Pendidikan Kependudukan dalam Rangka Sosialisasi Gerakan Jo Kawin Bocah serta Cegah AKI dan Stunting 5. Sosialisasi Pengelolaan Rumah Data Kependudukan di Kampung Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan dan Peduli Anak				
belum tersedianya data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen	2	4	8	Ada	Advokasi Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk (SIPERINDU)	Memadai	2	3	6
Cakupan kegiatan pemberdayaan belum menjangkau keseluruhan kelompok PIK Remaja	4	3	12	Ada	1. Sosialisasi Penurunan Angka Stunting Melalui Kelompok BKB 2. Sosialisasi Penurunan Angka Stunting dan AKI Melalui Kelompok BKR 3. Workshop Advokasi Peningkatan Kualitas Hidup Lansia Melalui Kelompok BK 4. Sosialisasi JKB melalui kelompok PIK remaja (buktikan dengan notulensi dll)	Memadai	3	3	9
Tidak ada pendampingan bagi kelompok UPPKA sehingga kelompok menjadi vacum atau tidak aktif	3	3	9	Ada	1. Workshop Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Kelompok UPPKA 2. Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Produk dan Jaringan Usaha Kelompok UPPKA				
Belum meratanya pengetahuan kader dalam pendampingan keluarga balita, remaja dan lansia serta Tidak tersampainya materi kepada anggota kelompok atau sasaran keluarga balita, remaja dan lansia	3	3	9	Ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Penurunan Angka Stunting Melalui Kelompok BKB 2. Sosialisasi Penurunan Angka Stunting dan AKI Melalui Kelompok BKR 3. Workshop Advokasi Peningkatan Kualitas Hidup Lansia Melalui Kelompok BKL 4. Sosialisasi Kegiatan Tribina dan UPPKA dalam Upaya Penurunan Angka Stunting di Jawa Tengah 5. FGD Penyelenggaraan Kegiatan Tribina dan UPPKA di Jawa Tengah (Dalam Daerah) 	Memadai	2	3	6
Kurangnya minat masyarakat dalam menggunakan kontrasepsi MKJP sehingga meningkatnya drop out KB	4	3	12	Ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Safari Pelayanan KB MKJP 2. Pengembangan Konten Media KIE 3. Penggerakan KB Pria Bersama Mitra 4. Advokasi Peningkatan Kesertaan KB Perusahaan 	Memadai	3	3	9
Kehamilan yang tidak diinginkan	3	3	9	Ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Advokasi Peningkatan Kesertaan KB Perusahaan 2. Pengembangan Konten Media KIE 3. Sosialisasi Peningkatan Pelayanan KB MKJP 	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Petugas Input Data aplikasi SIGA pada kab/kota tidak optimal	2	2	4	Ada	Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Data Gender dan Anak	Memadai	2	2	4
Manipulasi bukti pembayaran, kuitansi, atau dokumen pendukung.	3	4	12	Ada	1. Terapkan sistem arsip digital dan backup 2. Audit Internal kelengkapan dokumen secara berkala	Memadai	2	2	4

Tabel 3
Risiko Prioritas

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
Indikator Program				
Hasil Rekomendasi Pengawasan APIP belum signifikan memperbaiki kinerja PUG di OPD	12	Kepala Bidang KGPP	Kurang optimalnya kinerja APIP dalam melakukan pengawasan PUG di OPD	Pembangunan Daerah belum berorientasi pada isu gender
Pemkab dan Pemdes belum memfasilitasi dalam pengembangan usaha yang dilakukan oleh perempuan (misal pemasaran dan perijinan)	12	Kepala Bidang KGPP	Kurangnya komitmen Pemkab dan Pemdes	Perempuan yang difasilitasi pelatihan tidak menjdai wirausaha
Belum terdapat renaksi pemenuhan hak anak di Kab/kota	12	Kepala Bidang PHPA	Belum ada mekanisme evaluasi terhadap kinerja Gugus Tugas KLA	IPHA tidak mencapai target
Meningkatnya jumlah anak korban kekerasan	12	Kepala UPTD PPA	Kurangnya komitmen dari pemangku kebijakan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak	Tidak terpenuhinya hak anak atas perlindungan
Kehamilan yang tidak diinginkan meningkat yang berisiko stunting	12	Kepala Bidang KBKIE	Kurangnya Advokasi sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan KB Modern	Menurunnya Kualitas hidup ibu dan anak
Indikator Kegiatan				
Komitmen yang kurang dalam mengidentifikasi ARG	16	Kepala Bidang KGPP	Pergantian personil yang menangani ARG sering terjadi	Nilai Evaluasi PUG tidak mencapai target
Peserta tidak memahami Materi yang disampaikan	12	Kepala Bidang KGPP	Metode penyampaian materi kurang tepat	Peserta tidak meningkat pemahamannya
Belum semua Kab/kota mempunyai kemampuan untuk menyediakan rumah perlindungan di setiap kecamatan	16	Kepala Bidang KGPP	Kebijakan masih baru sehingga belum ada kesiapan sumber daya di kecamatan	Kecamatan belum mempunyai Rumah Perlindungan Perempuan
Cakupan kegiatan pemberdayaan belum	12	Kepala Bidang Daldukds	kurangnya kesadaran orangtua, budaya masyarakat yang masih	Peningkatan angka prevalensi stunting , AKI dan AKB

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
menjangkau keseluruhan kelompok PIK Remaja			mendukung pernikahan usia muda kurangnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi Pengawasan/kontrol orangtua atau keluarga terhadap pergaulan anak	
Kurangnya minat masyarakat dalam menggunakan kontrasepsi MKJP sehingga meningkatnya drop out KB	12	Kepala Bidang KBKIE	Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait KB MKJP	Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk
Manipulasi bukti pembayaran, kuitansi, atau dokumen pendukung	12	Sekretaris	Dorongan mencari keuntungan pribadi/kelompok (gratifikasi atau penggelapan)	Pegawai atau pihak terkait bisa dikenai tuntutan pidana korupsi, sanksi administratif, maupun pengembalian kerugian negara.

Tabel 4
Rencana Tindak Pengendalian

Program/ Kegiatan PD	Indikator Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program								
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender di OPD Provinsi	Hasil Rekomendasi Pengawasan APIP belum signifikan memperbaiki kinerja PUG di OPD	12	Kurang optimalnya kinerja APIP dalam melakukan pengawasan PUG di OPD	Pembangunan Daerah belum berorientasi pada isu gender	Pembahasan kinerja APIP dalam pengawasan PUG pada rapat internal Pokja PUG Provinsi	Kepala Bidang KGPP	Semester II Tahun 2026
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perempuan yang difasilitasi pelatihan menjadi wirausaha	Pemkab dan Pemdes belum memfasilitasi dalam pengembangan usaha yang dilakukan oleh perempuan (misal pemasaran dan perijinan)	12	Kurangnya komitmen Pemkab dan Pemdes	Perempuan yang difasilitasi pelatihan tidak menjadi wirausaha	1. Melakukan Koordinasi dengan stakeholder terkait untuk mengintervensi permasalahan dalam pemberdayaan perempuan 2. Melakukan koordinasi dengan kab/kota dan pemdes dalam pemberdayaan perempuan untuk berwirausaha	Kepala Bidang KGPP	Semester II Tahun 2026
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak	Belum terdapat reaksi pemenuhan hak anak di Kab/kota	12	Belum ada mekanisme evaluasi terhadap kinerja Gugus Tugas KLA	IPHA tidak mencapai target	Pendampingan dan monitoring ke Kab/kota (data dukung dilampirkan)	Kepala Bidang PHPA	Semester II Tahun 2026

Program/ Kegiatan PD	Indikator Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Meningkatnya jumlah anak korban kekerasan	12	Kurangnya komitmen dari pemangku kebijakan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak	Tidak terpenuhinya hak anak atas perlindungan	1. Pelaksanaa n FGD Penyusunan Kebijakan Perlindungan Anak 2. Rakor Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak 3. Workshop Pencegahan dan Penanganan Anak yang memerlukan perlindungan khusus	Kepala UPTD PPA	Semester II Tahun 2026
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	Kehamilan yang tidak diinginkan meningkat yang berisiko stunting	12	Kurangnya Advokasi sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan KB Modern	Menurunnya Kualitas hidup ibu dan anak	1. Sosialisasi Peningkatan Pelayanan KB MKJP 2. Percepatan Penurunan Stunting 3. Pengembangan Konten Media KIE	Kepala Bidang KBKIE	Semester II Tahun 2026
Kegiatan								
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Nilai Evaluasi PUG Provinsi	Komitmen yang kurang dalam mengidentifikasi ARG	16	Pergantian personil yang menangani ARG sering terjadi	Nilai Evaluasi PUG tidak mencapai target	Mendorong OPD untuk memberdayakan focal point PUG	Kepala Bidang KGPP	Semester II Tahun 2026
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi	Persentase perempuan yang mendapat fasilitasi pengembangan	Peserta tidak memahami Materi yang disampaikan	12	Metode penyampaian materi kurang tepat	Peserta tidak meningkat pemahamannya	Mengganti metode sosialisasi dalam	Kepala Bidang KGPP	Semester I Tahun 2026

Program/ Kegiatan PD	Indikator Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	kapasitas meningkat pemahamannya					bentuk brainstorming		
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang mempunyai rumah perlindungan perempuan	Belum semua Kab/kota mempunyai kemampuan untuk menyediakan rumah perlindungan di setiap kecamatan	16	Kebijakan masih baru sehingga belum ada kesiapan sumber daya di kecamatan	Kecamatan belum mempunyai Rumah Perlindungan Perempuan	Peningkatan Kapasitas SDM yang menangani di level kecamatan	Kepala Bidang KGPP	Semester I Tahun 2026
Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	ASFR (Age Specific Fertility Rate) 15 - 19 tahun	Cakupan kegiatan pemberdayaan belum menjangkau keseluruhan kelompok PIK Remaja	12	kurangnya kesadaran orangtua, budaya masyarakat yang masih mendukung pernikahan usia muda kurangnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi Pengawasan/kontrol orangtua atau keluarga terhadap pergaulan anak	Peningkatan angka prevalensi stunting , AKI dan AKB	Koordinasi dengan OPD KB Kab/Kota untuk melakukan advokasi kepada semua PIK Remaja di Kab/Kota	Kepala Bidang Daldukds	Semester I Tahun 2026
Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pengguna Kontrasepsi MKJP	Kurangnya minat masyarakat dalam menggunakan kontrasepsi MKJP sehingga meningkatnya drop out KB	12	Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait KB MKJP	Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk	Safari Pelayanan KB MKJP	Kepala Bidang KBKIE	Semester I Tahun 2026
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Manipulasi bukti pembayaran, kuitansi, atau dokumen pendukung	12	Dorongan mencari keuntungan pribadi/kelompok (gratifikasi atau penggelapan)	Pegawai atau pihak terkait bisa dikenai tuntutan pidana korupsi, sanksi administratif, maupun pengembalian kerugian negara.	1. Sosialisasi Anti Korupsi dan kampanye anti Gratifikasi 2. Terapkan sistem arsip	Sekretaris	Semester I Tahun 2026

Program/ Kegiatan PD	Indikator Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						digital dan backup 3. Audit Internal kelengkapan dokumen secara berkala		

SASARAN RPJMD	MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA BE
---------------	-----------------------------------

TUJUAN	Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan Anak
STRATEGI	Meningkatkan peran perempuan dalam semua bidang pembangunan
TARGET	IGK (Indeks Ketimpangan Gender) baseline 2023 : 0,336 ; 2024 : 0,308 Target 2025 : 0,306 ; 0,304 ; 0,301 ; 0,3 ; 0,297 ; 0,296

SASARAN	Meningkatnya peran dan kapasitas perempuan dalam bidang pembangunan
INDIKATOR	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
TARGET	Baseline 2023 : 93,31 ; 2024 : 93,44 Target : 93,45 ; 93,47 ; 93,49 ; 93,5 ; 93,52 ; 93,55

UNIT/SUB UNIT KERA	BIDANG KGPP		BIDANG KGPP		BIDANG KGPP		UPTD		BIDANG PHPA		BIDANG PHPA	
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Program Peningkatan Kualitas Keluarga		Program Perlindungan Perempuan		Program Perlindungan Perempuan		Program Pemenuhan Hak Anak		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
SASARAN STRATEGIS PROGRAM	Meningkatnya Anggaran Respons Gender di Provinsi		Meningkatnya kapasitas perempuan di bidang ekonomi		Meningkatnya jumlah layanan lembaga layanan perlindungan perempuan di tingkat kab/kota sesuai standar		Meningkatnya pelayanan korban kekerasan perempuan secara komprehensif		Meningkatnya kualitas pemenuhan hak anak		Meningkatnya kualitas lembaga layanan keluarga yang responsif gender dan hak anak di Kabupaten/Kota	
OUTPUT	Persentase Anggaran Respons Gender di OPD Provinsi (DO : jumlah ARG pada Belanja Operasi dan Modal dibagi jumlah awal Biaya Corect APD) (Batas Bawah : 100%, Batas Atas : 100%)		Persentase Perempuan yang difasilitasi pelatihan menjadi wirasaha (DO : perempuan yang menjadi wirasaha dibagi perempuan yang sudah diarah)		% kab/kota yang memiliki kebijakan terkait ketahanan keluarga (DO : Kab/kota yang memiliki kebijakan ketahanan keluarga dibagi jumlah kab/kota di Jawa Tengah)		% LPTD PPA kab/kota sesuai standar layanan (DO : UPTD PPA yang memenuhi standar layanan dibagi dengan jumlah UPTD yang sudah terbentuk)		% korban kekerasan perempuan yang mendapat layanan komprehensif (DO : perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif, mendapatkan layanan dari UPTD PPA)		INDEKS PEMENUHAN HAK ANAK (IPHA) (DO : jumlah layanan keluarga yang terarah dibagi jumlah layanan keluarga yang terarah yaitu subsektor, program, LKNU, layanan di Kabupaten/Kota)	
TARGET	Baseline 2024 : 10,37 Target : 11,12, 13, 14, 15,16		Baseline 2024 : 80 Target : 80,80,90,90,90		Baseline 2024 : 100% Target : 10, 20, 25, 30, 35,40		Baseline 2024 : 10 updi (14%) Target : 71,85,95,100,100,100		Baseline 100% Target : 100, 100, 100, 100, 100		Baseline 2023 : 60,76 Target 2025 : 63,1, 65,5, 62, 62,5 ; 63, 63,5	

UNIT/SUB UNIT KERA	SEKSI KG		SEKSI KG		SEKSI PP		UPTD		SEKSI PHA		SEKSI PHA			
	Kegiatan Pemberdayaan PUG pada lembaga pemerintah Kewenangan Prov		Kegiatan Pemberdayaan Perempuan bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi di Ombia Kewenangan Provinsi		Kegiatan pengabdian dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		Kegiatan pengabdian dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Prov dan lintas daerah kab/kota		Kegiatan Pengembangan PHA pada Lembaga Pemerintah, nonpemerintah & dunia usaha Kewenangan Provinsi			
SASARAN STRATEGIS PROGRAM	Tersedianya hasil evaluasi penyelenggaraan PUG di Provinsi		Meningkatnya kapasitas perempuan dalam keterampilan diberbagai bidang pembangunan		Meningkatnya kualitas pembangunan ketahanan keluarga		Meningkatnya jumlah lembaga penyedia layanan di Kab/Kota yang terstandarisasi		Tersedianya korban kekerasan perempuan yang membutuhkan layanan rujukan lanjutan		Meningkatnya jumlah lembaga layanan pemenuhan hak anak yang mendapat KE Layanan Rumah Anak			
OUTPUT	Nilai hasil evaluasi PUG Provinsi (100,000,000,000,000) (DO : nilai hasil evaluasi PUG terhadap implementasi PUG di Provinsi)		Persentase perempuan yang mendapat fasilitas pengembangan kapasitas meningkat pemahamannya (DO : jumlah perempuan yang mendapat pemahamannya dibagi perempuan yang mendapat fasilitas pengembangan kapasitas)		Persentase kab/kota yang mendapat pendampingan intensif terkait kebijakan pembangunan ketahanan keluarga (DO : kab/kota yang mendapat pendampingan intensif kebijakan pembangunan ketahanan keluarga dibagi 35)		Persentase Kecamatan yang mempunyai rumah perlindungan perempuan (DO : Kecamatan yang mempunyai rumah perlindungan perempuan dibagi 576)		Jumlah lembaga penyedia layanan yang terstandarisasi (DO : jumlah UPTD PPA kab/kota yang memenuhi standar dibagi 35 kab/kota)		Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan (DO : jumlah perempuan korban kekerasan yang sudah mendapat layanan rujukan lanjutan dibagi jumlah korban perempuan kekerasan yang harus mendapat layanan rujukan lanjutan)		Jumlah kab/kota dengan praktik RLA minimal Madya (DO : jumlah kab/kota yang mendapat RLA Minimal Madya)	
TARGET	Baseline 2023 : 903 Target : 900,900,900,900,900		Target : 20, 40, 60, 80, 100,100		Baseline 2024 : 14% Target : 14, 20, 25, 30, 35, 40		Baseline 2024 : 0 Target : 20,25,30,35,50,60		Baseline 2024 : 100 Target : 100,100,100,100,100,100		Baseline 2024 : 29 Target : 29, 30, 31,32,33,34			

SUB KEGIATAN	Peningkatan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi		Adokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi		Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi		Sosialisasi pembangunan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi (SDW)		Adokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi		Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	
	Kerjasama para pihak dalam penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi (DAK)		Adokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi		Adokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi		Adokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi		Adokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi		Adokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	
SASARAN STRATEGIS SUB KEGIATAN	Tersedianya penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi		Tersedianya advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi		Tersedianya advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi		Tersedianya advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi		Tersedianya advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi		Tersedianya advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga	
	Tersedianya penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi		Tersedianya advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi		Tersedianya advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi		Tersedianya advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi		Tersedianya advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi		Tersedianya advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga	
OUTPUT	Jumlah pemangku kepemimpinan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan pendampingan		Jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan		Jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan		Jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan		Jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan		Jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan	
	Jumlah pemangku kepemimpinan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan pendampingan		Jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan		Jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan		Jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan		Jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan		Jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan	
TARGET	5,5,5,5,5		50,50,50,50,50		50,50,70,80,90,100		35 ; 35, 35, 35, 35, 35		3,3,4,4,5,4		80,80,80,80,80,80	

SUB KEGIATAN	Layanan Pengabdian atau Pengkajian		Layanan Pengabdian atau Pengkajian		Layanan Pengabdian atau Pengkajian		Layanan Pengabdian atau Pengkajian		Layanan Pengabdian atau Pengkajian		Layanan Pengabdian atau Pengkajian	
	Layanan Pengabdian atau Pengkajian		Layanan Pengabdian atau Pengkajian		Layanan Pengabdian atau Pengkajian		Layanan Pengabdian atau Pengkajian		Layanan Pengabdian atau Pengkajian		Layanan Pengabdian atau Pengkajian	
SASARAN STRATEGIS SUB KEGIATAN	Tersedianya Layanan Pengabdian atau Pengkajian		Tersedianya Layanan Pengabdian atau Pengkajian		Tersedianya Layanan Pengabdian atau Pengkajian		Tersedianya Layanan Pengabdian atau Pengkajian		Tersedianya Layanan Pengabdian atau Pengkajian		Tersedianya Layanan Pengabdian atau Pengkajian	
	Tersedianya Layanan Pengabdian atau Pengkajian		Tersedianya Layanan Pengabdian atau Pengkajian		Tersedianya Layanan Pengabdian atau Pengkajian		Tersedianya Layanan Pengabdian atau Pengkajian		Tersedianya Layanan Pengabdian atau Pengkajian		Tersedianya Layanan Pengabdian atau Pengkajian	
OUTPUT	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengabdian atau Pengkajian		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengabdian atau Pengkajian		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengabdian atau Pengkajian		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengabdian atau Pengkajian		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengabdian atau Pengkajian		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengabdian atau Pengkajian	
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengabdian atau Pengkajian		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengabdian atau Pengkajian		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengabdian atau Pengkajian		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengabdian atau Pengkajian		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengabdian atau Pengkajian		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengabdian atau Pengkajian	
TARGET	2024 : 60, Target 20, 20,20,20,20,20		2024 : 60, Target 20, 25,30,30,30,30		10,11,12,13,14,15		1,1,1,1,1		10,11,12,13,14,15		1,1,2,2,2	

DAYA SAING DAN BERKARAKTER

Meningkatnya keluarga berkualitas	
Meningkatkan kualitas penduduk dalam upaya membangun keluarga yang berkualitas	
IPKK (Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga), Baseline 2023 : 72,63.	
Target : 76,1 ; 77,06 ; 77,79 ; 78,37 ; 78,84 ; 79,25	

Meningkatnya Perlindungan Anak
IPA (Indeks Perlindungan Anak)
Baseline 2023 : 64,34 (Target : 65 ; 65,35 ; 66,70 ; 66,95 ; 67,2 ; 67,5)

Terkendalinya Jumlah Penduduk
Angka Kelahiran Total (TFR)
(2024 : 2,09, Target : 2,1 ; 2,1 ; 2,1 ; 2,1 ; 2,1)

Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
Indeks Pembangunan Keluarga (BANGGA)
(2024 : 63,9 Target : 64,25 ; 64,75 ; 65 ; 65,3 ; 65,5)

BIDANG PHPA	UPTD
Program Perlindungan Khusus Anak	Program Perlindungan Khusus Anak
Meningkatnya kualitas perlindungan khusus anak	Meningkatnya pelayanan korban kekerasan anak secara komprehensif
Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	% korban kekerasan anak yang mendapat layanan komprehensif (DO : Anak korban kekerasan yang mendapat, ditindak, maupun ditangani, mendapatkan layanan dari UPTD PHA)
Baseline 2023 : 77,86 Target : 78,5 ; 79 ; 79,4 ; 79,9 ; 80,5 ; 81	Baseline 100% Target : 100, 100, 100, 100, 100

BIDANG KB KIE	BIDANG DALDIKUS
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program Pengendalian Penduduk
Meningkatnya keartaban KB	Meningkatnya kab/kota yang mengintegrasikan GDNK 5 pilar ke dalam dokumen perencanaan
% Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	% Penda yang mengintegrasikan dokumen GDNK 5 pilar ke dalam dokumen perencanaan daerah (DO : Penda yang sudah mengintegrasikan GDNK 5 pilar dan memuatkan substansi ke dalam dokumen perencanaan daerah dibagi kab/kota se Jawa Tengah)
Baseline 2024 : 65,5 Target : 69,47 ; 69,48 ; 69,49 ; 69,5 ; 69,51 ; 69,52	Base line 2024 : 68 Target : 71, 75, 80, 85, 90, 95

BIDANG DALDIKUS	BIDANG DALDIKUS
Program Pengendalian Penduduk	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Meningkatnya kab/kota yang mendapatkan GDNK 5 pilar ke dalam dokumen perencanaan	Meningkatnya kampung keluarga berkualitas mandiri dan berkelanjutan
% Penda yang mengintegrasikan dokumen GDNK 5 pilar ke dalam dokumen perencanaan daerah (DO : Penda yang sudah mengintegrasikan GDNK 5 pilar dan memuatkan substansi ke dalam dokumen perencanaan daerah dibagi kab/kota se Jawa Tengah)	% Kampung KB mandiri dan berkelanjutan (DO : menghitung persentase kampung KB Mandiri dan persentase kampung KB Berkelanjutan)
Base line 2024 : 68 Target : 71, 75, 80, 85, 90, 95	Baseline 2024 : 30,7% atau 2.534 dari 8.363 kampung kb. Target : 32,34 ; 36,36 ; 40,43

SEKSI PA	UPTD
Kegiatan Penguatan & pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Prov & lintas daerah kab/kota	Kegiatan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Prov
Meningkatnya kapasitas lembaga layanan perlindungan anak yang mampu memberikan perlindungan khusus yang efektif dan efisien	Terlayannya korban kekerasan anak yang membutuhkan layanan rujukan lanjutan
Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan anak yang telah difasilitasi pengembangannya (DO : Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan anak yang diberikan fasilitasi pelatihan atau mendapatkan advokasi)	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan (DO : Jumlah anak korban kekerasan yang sudah mendapat layanan rujukan lanjutan dibagi jumlah korban anak kekerasan yang harus mendapat layanan rujukan lanjutan)
Baseline 2024 : 10 Target : 10, 10, 10, 10, 10, 10	Baseline : 100 Target : 100,100,100,100,100,100

SEKSI ADVOKASI KIE DAN KB	SEKSI DALDIKUS
Kegiatan Pengembangan Desain Program, Penelitian dan Pelaksanaan Advokasi, Informasi dan Edukasi (IRE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
Meningkatnya Akseptor KB MKP	Meningkatnya kab/kota yang mendapatkan advokasi penyusunan GDNK 5 Pilar
Persentase Pengguna Kontrasepsi MKP	Jumlah pemerintah daerah yang menyusun GDNK 5 pilar dalam pembangunan (DO : Jumlah Kabupaten yang menyusun GDNK 5 Pilar dibagi 35)
Baseline 2024 : 71,1 Target : 77,5 ; 77,9 ; 78,30 ; 78,7 ; 79 ; 79,3	Baseline 2024 : 3,3 Target : 5,5 ; 8,5 ; 9 ; 8,75 ; 8,5 ; 8,4

SEKSI DALDIKUS	SEKSI KS
Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Desain Program Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga
Meningkatnya kab/kota yang mendapatkan advokasi penyusunan GDNK 5 Pilar	Meningkatnya kelompok UPPKA yang aktif
Jumlah pemerintah daerah yang menyusun GDNK 5 pilar dalam pembangunan (DO : Jumlah Kabupaten yang menyusun GDNK 5 Pilar dibagi 35)	Persentase kelompok UPPKA yang aktif (DO : Jumlah kelompok UPPKA yang aktif/melaksanakan kegiatan dibagi jumlah UPPKA yang aktif)
Baseline 2024 : 3,3 Target : 5,5 ; 8,5 ; 9 ; 8,75 ; 8,5 ; 8,4	Baseline 2023 : 17,3 Target : 17,16 ; 16 ; 15 ; 14 ; 13 ; 12

SEKSI DALDIKUS	SEKSI KS
Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Desain Program Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga
Meningkatnya kab/kota yang mendapatkan advokasi penyusunan GDNK 5 Pilar	Meningkatnya kelompok UPPKA yang aktif
Jumlah pemerintah daerah yang menyusun GDNK 5 pilar dalam pembangunan (DO : Jumlah Kabupaten yang menyusun GDNK 5 Pilar dibagi 35)	Persentase kelompok UPPKA yang aktif (DO : Jumlah kelompok UPPKA yang aktif/melaksanakan kegiatan dibagi jumlah UPPKA yang aktif)
Baseline 2024 : 3,3 Target : 5,5 ; 8,5 ; 9 ; 8,75 ; 8,5 ; 8,4	Baseline 2023 : 17,3 Target : 17,16 ; 16 ; 15 ; 14 ; 13 ; 12

BIDANG DALDIKUS	BIDANG DALDIKUS
Program Pengendalian Penduduk	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Meningkatnya kab/kota yang mengintegrasikan GDNK 5 pilar ke dalam dokumen perencanaan	Meningkatnya kampung keluarga berkualitas mandiri dan berkelanjutan
% Penda yang mengintegrasikan dokumen GDNK 5 pilar ke dalam dokumen perencanaan daerah (DO : Penda yang sudah mengintegrasikan GDNK 5 pilar dan memuatkan substansi ke dalam dokumen perencanaan daerah dibagi kab/kota se Jawa Tengah)	% Kampung KB mandiri dan berkelanjutan (DO : menghitung persentase kampung KB Mandiri dan persentase kampung KB Berkelanjutan)
Base line 2024 : 68 Target : 71, 75, 80, 85, 90, 95	Baseline 2024 : 30,7% atau 2.534 dari 8.363 kampung kb. Target : 32,34 ; 36,36 ; 40,43

Advokasi dan sosialisasi penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan advokasi dan sosialisasi	Peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Advokasi dan sosialisasi penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
Terlayannya korban kekerasan anak yang membutuhkan layanan rujukan lanjutan	Terlayannya korban kekerasan anak yang membutuhkan layanan rujukan lanjutan	Terlayannya korban kekerasan anak yang membutuhkan layanan rujukan lanjutan	Terlayannya korban kekerasan anak yang membutuhkan layanan rujukan lanjutan
Baseline 2024 : 10 Target : 10, 10, 10, 10, 10, 10	Baseline 2024 : 10 Target : 10, 10, 10, 10, 10, 10	Baseline 2024 : 10 Target : 10, 10, 10, 10, 10, 10	Baseline 2024 : 10 Target : 10, 10, 10, 10, 10, 10

Layanan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Layanan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Layanan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Layanan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
Meningkatnya Akseptor KB MKP	Meningkatnya Akseptor KB MKP	Meningkatnya Akseptor KB MKP	Meningkatnya Akseptor KB MKP
Baseline 2024 : 71,1 Target : 77,5 ; 77,9 ; 78,30 ; 78,7 ; 79 ; 79,3	Baseline 2024 : 71,1 Target : 77,5 ; 77,9 ; 78,30 ; 78,7 ; 79 ; 79,3	Baseline 2024 : 71,1 Target : 77,5 ; 77,9 ; 78,30 ; 78,7 ; 79 ; 79,3	Baseline 2024 : 71,1 Target : 77,5 ; 77,9 ; 78,30 ; 78,7 ; 79 ; 79,3

Advokasi dan Sosialisasi Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Advokasi dan Sosialisasi Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Advokasi dan Sosialisasi Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Advokasi dan Sosialisasi Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
Terlayannya korban kekerasan anak yang membutuhkan layanan rujukan lanjutan	Terlayannya korban kekerasan anak yang membutuhkan layanan rujukan lanjutan	Terlayannya korban kekerasan anak yang membutuhkan layanan rujukan lanjutan	Terlayannya korban kekerasan anak yang membutuhkan layanan rujukan lanjutan
Baseline 2024 : 10 Target : 10, 10, 10, 10, 10, 10	Baseline 2024 : 10 Target : 10, 10, 10, 10, 10, 10	Baseline 2024 : 10 Target : 10, 10, 10, 10, 10, 10	Baseline 2024 : 10 Target : 10, 10, 10, 10, 10, 10

Advokasi dan Sosialisasi Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Advokasi dan Sosialisasi Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Advokasi dan Sosialisasi Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Advokasi dan Sosialisasi Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
Terlayannya korban kekerasan anak yang membutuhkan layanan rujukan lanjutan	Terlayannya korban kekerasan anak yang membutuhkan layanan rujukan lanjutan	Terlayannya korban kekerasan anak yang membutuhkan layanan rujukan lanjutan	Terlayannya korban kekerasan anak yang membutuhkan layanan rujukan lanjutan
Baseline 2024 : 10 Target : 10, 10, 10, 10, 10, 10	Baseline 2024 : 10 Target : 10, 10, 10, 10, 10, 10	Baseline 2024 : 10 Target : 10, 10, 10, 10, 10, 10	Baseline 2024 : 10 Target : 10, 10, 10, 10, 10, 10

Advokasi dan Sosialisasi Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Advokasi dan Sosialisasi Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Advokasi dan Sosialisasi Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Advokasi dan Sosialisasi Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Advokasi dan Sosialisasi Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
Terlayannya korban kekerasan anak yang membutuhkan layanan rujukan lanjutan	Terlayannya korban kekerasan anak yang membutuhkan layanan rujukan lanjutan	Terlayannya korban kekerasan anak yang membutuhkan layanan rujukan lanjutan	Terlayannya korban kekerasan anak yang membutuhkan layanan rujukan lanjutan	Terlayannya korban kekerasan anak yang membutuhkan layanan rujukan lanjutan
Baseline 2024 : 10 Target : 10, 10, 10, 10, 10, 10	Baseline 2024 : 10 Target : 10, 10, 10, 10, 10, 10	Baseline 2024 : 10 Target : 10, 10, 10, 10, 10, 10	Baseline 2024 : 10 Target : 10, 10, 10, 10, 10, 10	Baseline 2024 : 10 Target : 10, 10, 10, 10, 10, 10

Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan

Me
pe
keker

Menguatnya sistem pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak

Adanya sinergitas lintas sektor pencegahan kekerasan perempuan dan anak

Tersedianya sistem data perlindungan perempuan dan anak sampai level Kecamatan

Kebijakan kekerasan perempuan dan anak telah terimplementasi dengan baik

Meningkatnya fungsi dan peran lembaga layanan korban kekerasan perempuan berbasis gender dan anak

Instansi/lembaga/komunitas berkomitmen dalam pencegahan kekerasan

Penyediaan sarana prasarana publik yang ramah perempuan dan anak

Pencegahan kekerasan diterapkan di lingkungan pendidikan, tempat kerja dan ruang publik

Adanya dukungan dan penguatan terkait pencegahan kekerasan mulai level **desa dan kecamatan**

Strategi pencegahan sudah sesuai dengan kondisi aktual, situasi darurat dan kondisi khusus

Meningkatnya kapasitas SDM pendataan perlindungan perempuan dan anak

Meningkatnya pendataan perlindungan perempuan dan anak

APH menggunakan regulasi yang responsif gender dan anak sebagai acuan dalam kasus hukum

Adanya komitmen para pihak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Adanya pemahaman yang sama tentang peraturan perundang-undangan tentang penanganan perempuan dan anak korban kekerasan

Jejaring UPTD sudah tersedia di kab/kota

Meningkatnya kapasitas SDM termasuk Paralegal dan kader Satyagraha

Upaya pencegahan kekerasan sudah sampai ke semua lapisan masyarakat dan unsur *hexahelix*

Penyebarluasan pencegahan kekerasan telah disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan umur masyarakat sasaran

